

PENDIDIKAN JALAN UTAMA MENUJU INDONESIA KUAT

BERITA INDONESIA[®]

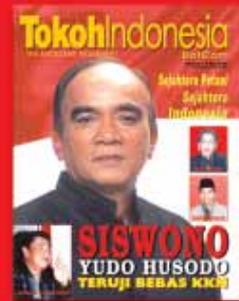
Edisi 10/Th.I/24 Maret - 6 April 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



RETORIKA INTERPELASI





TokohINDONESIA

Majalah Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia



www.tokohindonesia.com

The Excellent Biography



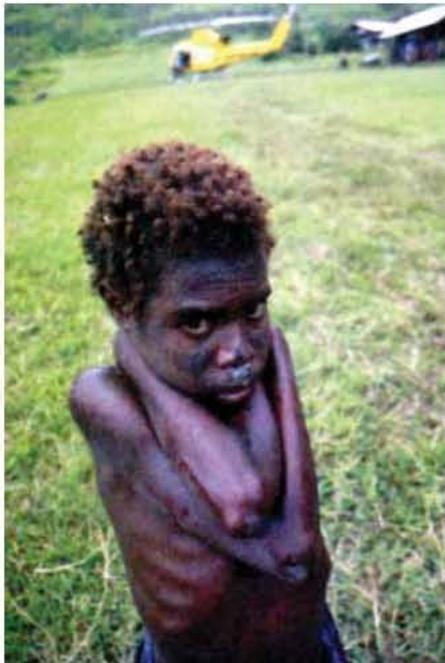
Sampul:
Eri Irawan
Karikatur:
Dandy Hendrias

Edisi No.10/Th.1/24 MARET - 6 APRIL 2006

DARI REDAKSI	4
SURAT KOMENTAR	5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA	7
BERITA TERDEPAN	12
VISI BERITA	13

BERITA UTAMA

DERAI TAWA DI SIDANG PARIPURNA Pemerintah puas, DPR-pun puas lantaran hak inter- pelasi terjawab setelah terkatung-katung selama setahun	14
--	----



Korban Busung Lapar Masih Berjatuhan	16
Generasi Kurang Gizi di Negeri Lumbung Padi	18
Hantu Bernama Gizi Buruk	20
Balada Marasmus, Si Kecil dan Mahasiswa	22

BERITA OPINI Rindu Dunia nan Damai	23
--	----

BERITA WAWANCARA Dr. dr. Siti Fadilah Supari	24
--	----

BERITA KHAS CenturyBank Penuhi Ketentuan BI	26
Kinerja CenturyBank Cemerlang	28
CenturyBank Rintis Kemitraan dengan Al-Zaytun	30

BERITA NASIONAL Rudolf Gubsu Definitif	38
Demo dan Rebana Sambut Condy	39
PT KA Pacu Keandalan dan Waktu	40
Siang Berdarah di Abepura	41



LENTERA PENDIDIKAN JALAN UTAMA MENUJU INDONESIA KUAT Kuat dalam arti mampu mengorganisir diri dalam tataran organisasi negara yang modem, berbasis dari kekuatan yang dimiliki rakyat, diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kesejah- tereraan rakyat dan ditangani oleh rakyat, dalam segala aspek kehidupan	34
--	----

BERITA EKONOMI Pertamina Ganti Direksi	42
Rasa Gula Tak Lagi Manis	44
Isi Pesan Paket Januari 2006	45

BERITA HUKUM Misteri Lima Juta Dolar	46
Pak Menteri yang Dinanti	47

BERITA PROFIL Ir. Humantar Lumban Gaol	48
--	----

BERITA POLITIK PKS - Golkar Saling Intip	50
--	----

BERITA HANKAM Ulang Tahun Kostrad ke-45	52
---	----

BERITA DAERAH Perda Terbit, PSK Terbirit-birit	56
--	----

BERITA IPTEK Chip RFID Hitachi Sebesar Debu	57
---	----

BERITA PEREMPUAN Dua Perempuan di Sisi SBY	58
--	----

BERITA OLAAHRAGA Kemenangan Pelipur Lara	60
--	----

BERITA LINGKUNGAN Kado Banjir untuk Rakyat	61
--	----

BERITA FEATURE Perang Jarak Jauh	62
--	----

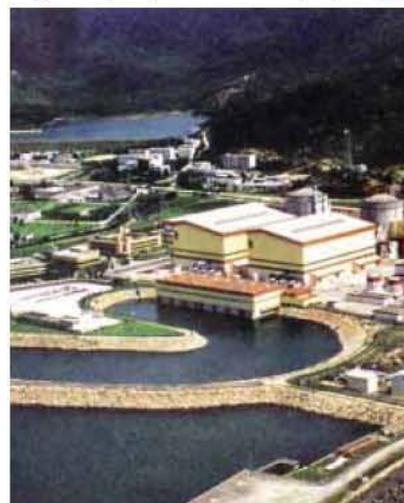
BERITA MEDIA Emas Ibunda Diboyong Amerika	63
---	----

BERITA HUMANIORA Sekolah Gratis Setengah Hati	64
Raju-Eman pun Akhirnya Berpelukan	65

BERITA BUDAYA Karuhun di Kampung Naga	66
---	----



BERITA TOKOH
Mayjen TNI (Purn) Drs. Sulaiman AB, SH, MSc **32**



BERITA MANCANEGARA
China Meloncat ke Depan

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto
Anis Fuadi

Redaktur Pelaksana:

Anna Diponegoro
Mangatur Lorieicide Paniroy (Website)

Sekretaris Redaksi

Retno Handayani

Kepala Litbang dan Pusat Data:

Suryo Pranoto

Staf Redaksi:

Hapusan Tampubolon
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruwas
Christian Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga
Hotman L Gaol

Wartawan Foto:

Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak

Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieicide Paniroy

Desainer:

Eri Irawan, Esero Design

Biro Redaksi:

Medan: H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang **Purwakarta:** Benhard Sihite

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan
PT Citraprinsip Publisitas Indoaprint

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieicide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id



BRIEFING PAGI: Dilaksanakan setiap pagi pada jam kerja untuk meningkatkan kinerja dan kualitas majalah *Berita Indonesia*.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Pembaca yang budiman.

Komitmen *Berita Indonesia* untuk hadir dua kali seminggu, semakin menemukan bentuknya sebagai sebuah majalah berita yang berkualitas. Rapat-rapat rutin redaksi dan kesibukan di divisi *In Head News*, penugasan wartawan ke sejumlah pos strategis, seperti Istana Presiden, DPR, Mabes TNI dan BI, dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja dan kualitas majalah ini.

Dapur yang memasak produk informasi yang kami sajikan (*divisi design*), diperkaya karikatur berita yang penuh dengan ide-ide segar. Semuanya bermaksud agar penampilan majalah ini lebih menarik. Jaringan pemasaran dan distribusi mulai kami benahi untuk memberi pelayanan terbaik kepada sidang pembaca dan semua relasi.

Dalam edisi dwimingguan yang kedua ini, pada laporan sampul "Retorika Interpelasi", kami menampilkan masalah lama, tetapi masih aktual lantaran korban busung lapar dan gizi buruk masih berjatuh, dan adanya interpelasi DPR tentang gizi buruk dan penyakit polio. Sebagai bagian dari pers yang membangun opini yang konstruktif, majalah ini punya komitmen untuk mendukung pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Anahnya di era kebebasan pers sekarang ini, berita-berita tentang derita rakyat miskin kehilangan gaungnya, boleh dibilang dianggap "angin lalu". Kelaparan dibiarkan berlarut-larut sehingga korban berjatuh akibat dari gizi buruk dan busung lapar. Tetapi pada era di mana pers "dikekang" sedikit saja ada berita miring, para petinggi atau pejabat sangat tanggap untuk mengatasi permasalahan yang diberitakan pers.

Kemiskinan yang menjadi akar dari semua kemelut yang diderita rakyat kecil, telah luput dari perhatian pihak-pihak yang terkait. Begitu banyak upaya, begitu banyak LSM yang bergerak di sektor pemberdayaan masyarakat, tetapi tragedi kemanusiaan, busung lapar, masih saja terjadi. Baca juga Visi Berita yang membahas kasus busung lapar secara lebih tajam.

Masih banyak kemasam lain yang menarik. Nantikan kehadiran kami pada edisi berikutnya. Kami senang jika pembaca puas.

Selamat menikmati sajian kami.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sbb:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email: redaksi@berindo.com
- surat: Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
Telp. (021) 70930474
(021) 83701736
Fax. (021) 9101871

Megapolitan Akan Rugi- kan Jawa Barat

Saya sangat keberatan dengan ide Megapolitan dari Gubernur DKI Sutiyoso. Jika gagasan ini terealisasi, maka kota-kota yang menjadi bagian Megapolitan akan menerima banyak para urban dari berbagai kawasan. Akibatnya Ja-

wa Barat lah yang akan memikul beban ini terutama masalah sosial, seperti kesenjangan ekonomi karena bertambahnya pengangguran dan kemiskinan.

Bukan saja masalah sosial, tapi secara kultural, kekayaan adat, seni dan budaya orang Sunda yang khas akan terkikis karena pengaruh keterbukaan daripada kota megapolitan tersebut. Perlu diketahui Jawa Barat sendiri memiliki masalah urbanisasi. Contohnya, kota Bandung telah menjadi kota alternatif bagi para urban yang tidak berhasil di Jakarta.

Apalagi kalau ada megapolitan, tolong jangan ditambah permasalahan Jawa Barat dengan ide tersebut. Justru melihat kenyataan ini Pemprov Jawa Barat harus tegas menolak ide megapolitan. Sa-

ya berharap Pemprov DKI Jakarta mencari solusi lain dalam memecahkan permasalahan kependudukan dan permasalahan lain di Jakarta.

Asep Ardi Suardi,
aasuardi@yahoo.com

Satelit Telkom 2 Bermanfaat

Peresmian satelit Telkom 2 oleh Presiden SBY di Cibinong, Jawa Barat (24/2/06), merupakan indikator kemajuan bidang teknologi komunikasi bangsa Indonesia. Keberadaan satelit baru ini harus bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi kepentingan masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

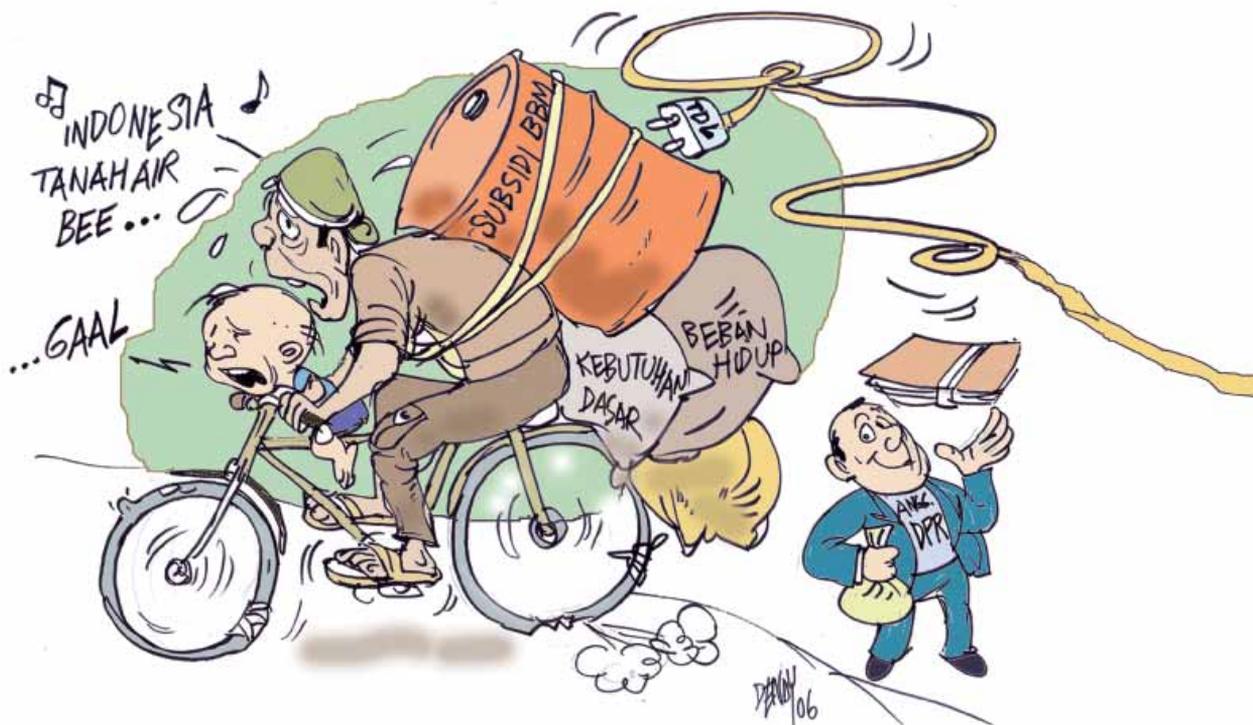
Manfaat tersebut telah di-

buktikan melalui telewicara yang dilakukan Presiden SBY dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Piet A Tallo dan Uskup Atambua, Mgr Anton Pain Ratu. Telewicara tersebut berjalan lancar dan dapat mengetahui langsung terhadap kondisi masyarakat di kabupaten Belu, NTT.

Lebih jauh manfaat satelit tersebut dapat menjadi alat kontrol terhadap wilayah luar Indonesia yang selama ini sulit dipantau karena sulitnya alat komunikasi. Sebagaimana harapan Presiden SBY, semoga keberadaan Satelit Telkom 2 ini dapat merekatkan kembali kebersamaan seluruh warga dan kesatuan wilayah Indonesia yang cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Humaidi Dahnan,
humaididahnan@yahoo.co.id

BUNG WARTO



Tragis, Anak Berumur 8 Tahun Dipenjara

Apapun yang terjadi dan yang sudah pasti salah adalah tindakan hakim yang sewenang-wenang memenjarakan Raju yang baru berusia 8 tahun. Dimana rasa iba seorang hakim (wanita pula) yang begitu tega memasukkan Raju ke dalam penjara orang dewasa yang kriminal pula. Padahal bocah tersebut masih memerlukan bimbingan dari orangtuanya.

Semoga penyelidikan yang akan dilakukan oleh KY tidak direkayasa oleh hakim bersangkutan. Saya sangat prihatin dan mengutuk perbuatan hakim ini yang sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang ada melakukan tindakan tidak terpuji. Ibu hakim tolong ikut penataran lagi supaya anda bisa pikir secara rasional.

Bambang Soetedjo,
bedjojess@wanadoo.nl

Solusi Kasus Korban SUTET

Baru-baru ini peneliti Institut Teknologi Bandung, Dr Ir Bambang Anggoro dalam sebuah seminar soal SUTET di Jakarta mengatakan, medan magnet yang dihasilkan SUTET lebih kecil daripada ponsel. Sedangkan medan listrik yang dihasilkan SUTET masih di bawah ambang batas yang bisa ditoleransi tubuh, yaitu 5 kilovolt/meter.

Hasil penelitian ITB ini sama dengan hasil penelitian dr Corry dari Universitas Indonesia, yang berarti SUTET tidak akan menimbulkan dampak apapun dalam jangka waktu lama.

Pemahaman tentang SUTET ini harusnya disosialisasikan kepada para demonstran yang hingga kini masih melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia, Jl Diponegoro 58, Jakarta.

Sungguh memprihatinkan,

puluhan korban sudah berjatuhan. Tidak cukup dengan aksi mogok makan dan tutup mulut. Belakangan puluhan anak-anak cacat didatangkan ke Posko hanya untuk dieksploitasi cacat tubuhnya.

Ironisnya, sementara politisi dan intelektual yang notebene adalah orang-orang pintar justru "mendukung" aksi itu. Harusnya mencari solusi secara cerdas, dan bukan sebaliknya "bertepuk tangan" di atas kebodohan dan ketidakpahaman orang-orang yang sedang melakukan aksi.

Kalau niatnya ingin menolong dan bersimpatik terhadap korban SUTET, jangan ikut-ikutan memprovokasi, tetapi bagaimana mendesak PLN atau pihak-pihak berkompeten untuk segera menyelesaikan kompensasi yang menjadi hak rakyat.

Aparat keamanan harus bertindak tegas dalam menangani para provokator. Semakin

cepat penyelesaian kasus SUTET, akan semakin baik terutama untuk menghindari banyak jatuhnya korban dan meminimalisir dimanfaatkannya isu SUTET.

Bukan hanya itu, pembangunan SUTET jalur Jawa bagian selatan sangat mendesak untuk menutupi kebutuhan tenaga listrik terus meningkat sekitar 6-8 persen pertahun. Kalau tidak ada pembangunan SUTET berarti ancaman pemadaman bergilir segera mengintai kita semua.

Drs Ferdinand K Doansiba,

Jl Kembangan Baru No 91C Puri Kembangan, Jakarta Barat

RUU Antipornografi/ Pornoaksi Tidak Logis

Saya benar-benar kaget membaca RUU Antipornografi dan Pornoaksi ini. RUU ini benar-benar sudah kebablasan, sangat berlebihan, dan tidak memakai logika/nalar. Saya setuju jika masalah pornografi dan pornoaksi diatur dengan benar, tetapi bukan dibikin anti seperti racun, dan inti permasalahannya jelas bahwa anak di bawah umur (17 tahun ke bawah) tidak boleh mengonsumsi pornografi dan pornoaksi.

Ada dua hal utama yang menjadi keberatan terhadap isi dari Rancangan UU yang sekarang ini.

Pertama, definisi dari pornografi dan pornoaksi yang sudah sangat berlebihan dan kebablasan.

Kedua, dalam rancangan tersebut, DPR tidak berani mengakui dengan tegas, bahwa pornografi dan pornoaksi boleh dikonsumsi dan/atau diekspresikan oleh mereka yang telah dewasa (17 tahun keatas) atau telah menikah. Sebenarnya itu saja intinya, tetapi oleh DPR dibuat berputar-putar masalahnya dan selalu sengaja dibentur-benturkan dengan seni.

Farid Choiruddin,
fa_ruddin@yahoo.com

PASTIKAN

BERITAINDONESIA®

TARIF IKLAN

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Jalan Cucakrawa No.14A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736 Fax. 9101871

▶ 01/03/2006

Tak Ada Karpets Merah Sambut Koruptor

Presiden SBY menyayangkan pihak-pihak yang mencurigai kedatangan debitur BLBI ke Istana Negara. "Tolong kita bicara jernih, rasional, dan jangan membuat rakyat bingung. Terus terang ada kalimat-kalimat yang sangat disayangkan, kok dibilang ada koruptor dikasih karpets merah ketika masuk Istana. Siapa yang kasih karpets merah?" katanya kepada pers di Phnom Penh, Kamboja. Menurut presiden, kedatangan tiga debitur ke Istana Negara beberapa waktu lalu karena mereka ingin bertemu menteri terkait yang saat itu kebetulan sedang berada di istana. Mereka hendak mengembalikan uang negara sekitar Rp 1 triliun.

▶ 02/03/2006

Jaksa Daftarkan Kasasi Kasus Neloe Cs

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Neloe cs, Baringin Sianturi secara resmi mendaftarkan kasasi atas vonis bebannya Neloe cs ke PN Jakarta Selatan. "Setelah mendaftarkan, maka tepat pada dua belas hari ke depan, jaksa akan memasukkan memori kasasi di PN Jakarta Selatan," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta. Pada 20 Februari lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga mantan direksi Bank Mandiri, man-

tan Direktur Utama ECW Neloe, mantan Direktur Manajemen, I. Wayan Pugeg, dan mantan EVP Coordinator Corporate and Government M.Soleh Terripan, dalam kasus pengucuran kredit bank.

▶ 03/03/2006

Provinsi Bali Tolak RUU Antipornografi

Hampir seluruh elemen masyarakat Bali sepakat menolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Sikap ini disampaikan kepada Panus DPR yang menangani RUU tersebut saat berkunjung ke Denpasar, Bali. Selain itu sekitar 1.000 orang melakukan aksi demo di lapangan Puputan Renon, di depan kantor gubernur Bali. "Ini aksi damai untuk menunjukkan penolakan masyarakat Bali," ujar Cok Savitri, koordinator aksi.

Aksi ini bukan hanya sekadar aksi karena melalui Surat Keputusan Gubernur Bali dan Surat Keputusan DPRD Bali, Provinsi Bali secara resmi menolak Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi. Keputusan itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (15/3).

▶ 04/03/2006

SKB Dua Menteri Langgar UUD 45

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama-Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah

dalam jaminan keterlibatan dan kelancaran ibadah, berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "SKB dua menteri 1969 sudah terbukti diskriminatif dan kriminogen (berpeluang menimbulkan kejahatan) dan berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia," kata cendekiawan muslim Dawam Raharjo di Jakarta. Hal itu dikatakannya dalam sebuah pertemuan yang diikuti oleh tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Jemaat Ahmadiyah, Ketua Aliran Kepercayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik, dan pengamat hukum.

Arroyo Cabut Status Darurat

Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo secara resmi mencabut status darurat yang berlaku sejak pekan lalu. Langkah ini ditempuh setelah sejumlah penasihat militernya menyatakan, ancaman kudeta militer terhadap sang presiden telah luruh. Arroyo juga mengancam para lawan politiknya untuk menghentikan aksi-aksi yang dianggap merusak ekonomi negara itu. "Saya gembira bisa melaporkan bahwa kita berhasil menggagalkan upaya-upaya sabotase," kata Arroyo dalam siaran televisi yang disiarkan pemerintah. "Saya yakin situasi akan kembali normal," ujarnya.

Karikatur Berita

▶ 05/03/2006

"Crash" Film Terbaik

Crash, film urban tentang rasialisme dan prasangka, meraih piala Oscar sebagai film terbaik dalam acara penganugerahan Acara Academy Award Ke-78 di Kodak Theater, Hollywood, hari Minggu (5/3) waktu setempat. Hasil ini bukan kejutan besar karena selama ini lebih kurang lima minggu setelah pengumuman para unggulan, Crash dan Brokeback Mountain telah dibicarakan sebagai dua film paling menonjol. Film ini menyampaikan multi-kulturalisme, kesenjangan, rasisme, dalam masyarakat kota lewat sebuah kecelakaan. Sementara Brokeback Mountain berhasil membawa Ang Lee sebagai sutradara Asia pertama yang membawa pulang Oscar, setelah lima tahun lalu berhasil membawa film Crouching Tiger, Hidden Dragon sebagai film terbaik di Academy Award. Selain meraih penghargaan sebagai film terbaik, Crash juga meraih Oscar untuk kategori editing dan naskah asli terbaik.

▶ 06/03/2006

Kenya dan Somalia Terancam Kelaparan

Kepala Program Pangan Dunia (WPF) James Morris memperingatkan akan jatuhnya korban jiwa besar-besaran di Kenya kalau para donor menunda dukungan dalam mengirim pangan bagi sekitar 3,5 juta orang yang menghadapi ancaman kelaparan. Sedikitnya 40 orang atau mungkin lebih telah tewas di Kenya Utara. Ternak sapi, unta dan keledai, juga tewas



Pameran komputer yang bertajuk Mega Bazaar Computer 2006 digelar di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 8-12 Maret. Acara ini diikuti oleh puluhan perusahaan yang bergerak di industri komputer.

dengan kecepatan yang mencemaskan di tengah kekurangan pangan yang parah, yang mengancam sedikitnya 11 juta orang di seluruh daerah Tanduk Afrika. Situasi yang sama seriusnya juga terjadi di Somalia. Di sana 1,7 juta orang menghadapi kekurangan pangan, tetapi pengiriman pangan dipersulit oleh kekerasan di daratan dan pembajakan di Samudra India.

▶ 07/03/2006

Perda Tentang Pelacuran Membuat Perempuan Buruh Resah

Forum Komunikasi Perempuan Banten mensyalir Perda Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran mengandung unsur kejahatan ekonomi bagi perempuan buruh. Pasalnya, pemberlakuan Perda itu membuat perempuan buruh tak berani lembur sampai malam. Keadaan ini jika

diteruskan berpotensi lebih memiskinkan buruh. Hal itu disampaikan Lilis, aktivis pada Serikat Pekerja Nasional (SPN), sesuai diskusi tentang peraturan daerah itu dengan buruh pabrik di Kota Tangerang. "Mereka tak akan berani lembur sebab takut kena razia. Itu berarti buruh tak mendapat tambahan upah. Namun jika mereka sampai di PHK perusahaan karena menolak bekerja pada malam hari, mereka akan lebih termiskinkan oleh sistem ini," kata Lilis.

Diprotes, Wanita Jadi Kaisar

Lebih dari 10.000 warga Jepang berdemonstrasi memprotes usulan yang mengizinkan perempuan dan turunannya memegang tampuk kekuasaan di kekaisaran Jepang. Para pendukung perubahan aturan kerajaan itu dianggap

Karikatur Berita

▶ 09/03/2006

Bandara Polonia Terbakar

Terminal kedatangan internasional Bandara Polonia, Medan Sumatera Utara (Sumut), Kamis dini hari sekitar pukul 03.00 WIB terbakar. Sebagian bangunan hangus termasuk peralatan pemeriksaan (X-ray) Bea dan Cukai, Imigrasi dan fasilitas lainnya. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kejadian tersebut mengakibatkan aktivitas penerbangan domestik dan internasional dari Medan terganggu.

Untuk sementara, terminal keberangkatan internasional berfungsi ganda yakni kedatangan dan keberangkatan. "Dampak kebakaran tersebut mengganggu beberapa penerbangan internasional maupun domestik, tapi Bandara Polonia tidak sampai ditutup," kata Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II Polonia, Medan, Kasmin Kamil. Kebakaran diduga bermula dari korsleting arus pendek di ruang tengah kedatangan internasional.

Aksi di Hari Musik Indonesia

Memperingati hari musik Indonesia, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Perjuangan Anti Pembajakan Musik Indonesia (FPPAPMI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Aksi yang disemarakkan dengan kehadiran penyanyi Vina Panduwinata dan Iga Mawarni ini mengutuk segala bentuk pembajakan yang merugikan kemajuan musik Indonesia.



Bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia (8/3), ratusan perempuan yang tergabung dalam Gabungan Koalisi Perempuan Jakarta melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Menurut para pengunjung rasa, RUU Pornografi tidak memperhatikan hak-hak seksualitas perempuan.

berusaha 'membangun sebuah negara baru dengan mengabaikan tradisi dan sejarah Jepang'. Lebih dari 70 anggota parlemen, dipimpin oleh mantan Menteri Perdagangan Takeo Hiranuma, mendesak kepada lebih dari 10.000 orang di Gedung Budojan untuk membantu unjuk rasa menentang rencana pemerintah mengizinkan perempuan meneruskan takhta kekaisaran di Jepang. Menurut Undang-Undang Jepang tahun 1947, hanya laki-laki yang dibolehkan menjadi kaisar di Jepang.

▶ 08/03/2006

Ari Soemarno Dirut Baru Pertamina

Pemerintah, melalui Meneg BUMN, Rabu sore, mengumumkan sekaligus melantik direksi baru Pertamina. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina

(Persero), Ari H Soemarno, menempati posisi direktur utama menggantikan Widya Purnama. Sedangkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lia Arifin Takhyani, yang selama ini dijagokan menjadi calon kuat pengganti Widya, bakal menempati posisi Wakil Direktur Utama menggantikan Mustiko Saleh. Selain Ari Soemarno, dalam susunan direksi baru ini terdapat beberapa nama yang bukan orang baru bagi Pertamina, yang akan menempati kursi direktur. Seperti Suroso Atmomartoyo, yang akan tetap menempati posisi Direktur Pengolahan. Selain itu, Achmad Faisal, yang belum lama ini dilantik menjadi Deputi Direktur Pemasaran, dipastikan naik jabatan menjadi Direktur Pemasaran dan Niaga menggantikan Ari Soemarno.



▶ 10/03/2006

Pilkada Papua dan Iriabar Jalan Terus

Pemilihan Gubernur Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat berjalan sesuai dengan jadwal, yaitu hari Jumat (10/3) dan Sabtu (11/3). Di Papua pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diikuti 1,43 juta pemilih di 4.066 tempat pemungutan suara yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Masyarakat diberi pilihan secara bebas. Siapa pun dari lima calon itu yang terpilih nanti, persaudaraan sebagai warga Papua tetap dibangun. Menurut perkembangan terakhir yang dihimpun BeritaIndonesia (14/3), hasil sementara tabulasi pilkada Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua menyebutkan pasangan Barnabas Suebu-Alex Hesegem masih unggul dengan mengumpulkan 191.632 suara (30,29 persen), menyusul Enembe-Aituarauw 176.615 suara (27,89 persen), John Ibo-Kossy 149.978 suara (23,68 persen), Constant Karma-Donatus Motte 68.741 suara (10,8 persen), dan Henk Wabisser-Inaury 46.822 suara (7,3 persen).

▶ 11/03/2006

Slobodan Milosevic Meninggal di Sel

Penjahat perang dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, Sabtu meninggal di penjara di Den Haag, Belanda. Milosevic ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya di dalam sel. Penyebab kematiannya masih diselidiki, tapi kemungkinan besar karena penyakitnya (gagal jantung). Meninggalnya Milosevic hanya berselang sepekan dari ke-



Setelah meraup sukses tahun lalu, Jakarta International Java Jazz Festival (JIJFF) kembali hadir di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (3/3). Pertunjukan yang digelar selama 3 hari ini menampilkan sekitar 1000 musisi dalam kurang lebih 150 pertunjukan.

matian penjahat perang Milan Babic yang tewas di penjara karena bunuh diri, 5 Maret lalu. Para ibu dan janda korban kekejaman perang di Srebrenica menyesali kematian Milosevic sebelum pengadilan memutuskan berakhir. Milosevic sampai kematiannya masih menjalani pengadilan atas 60 dakwaan, diantaranya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perang Balkan, termasuk pembantaian 8.000 warga muslim di Srebrenica.

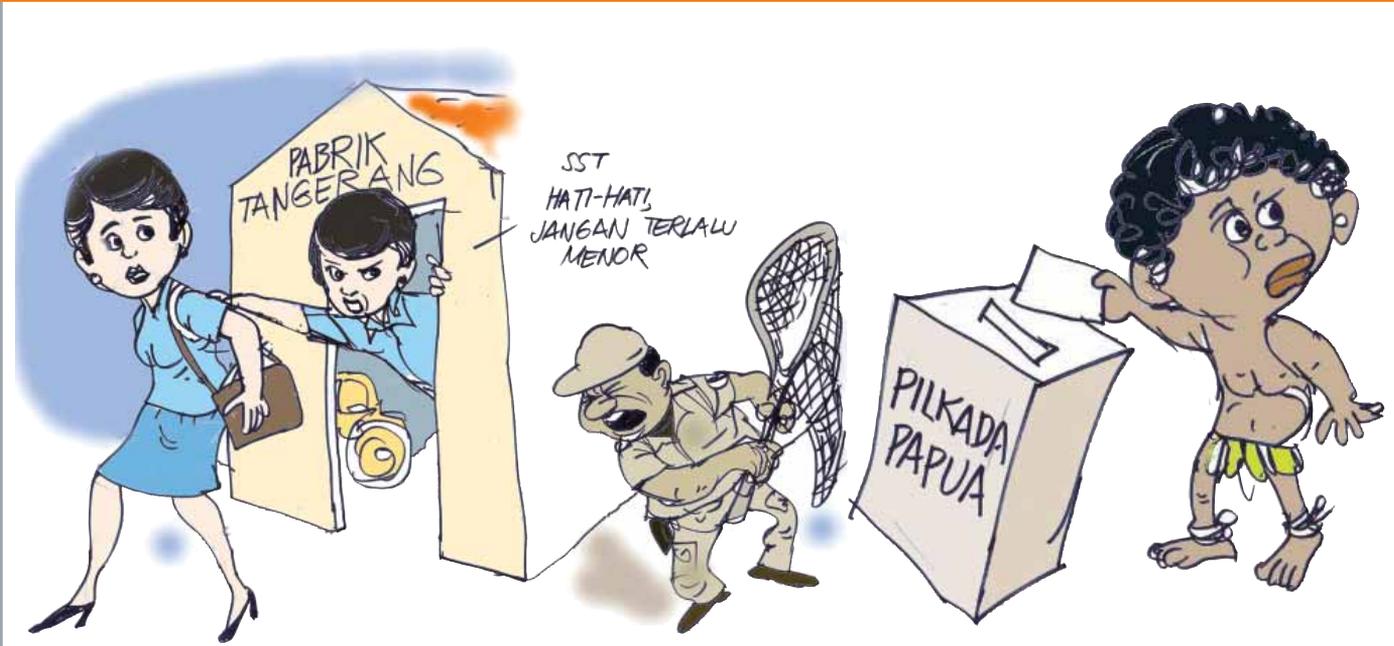
▶ 12/03/2006

RUU Antipornografi Direvisi

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi akhirnya merevisi sejumlah pasal yang selama ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Draf RUU yang baru tidak

lagi mengatur, antara lain, soal sanksi pidana dan pembentukan badan anti-pornografi dan pornoaksi nasional. "Kami sepakat soal sanksi pidana dalam kasus pornografi dan pornoaksi disisipkan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Nantinya, polisi, jaksa, dan hakim yang akan melakukan penegakan hukum antipornografi dan pornoaksi sehingga tidak dibutuhkan lembaga baru untuk menjalankannya," kata Balkan Kaplale, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (Pansus RUU APP), kepada wartawan di Jakarta.

Berbicara di sela-sela diskusi publik mengenai RUU APP di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Balkan mengungkapkan, Pansus telah memangkas draf lama dari 11 bab menjadi delapan bab. Jumlah

KarikaturBerita



Dua siswi Madrasah Al Makmur bermain di depan poster besar yang dipasang petugas Kedubes AS. Madrasah Al Makmur adalah salah satu madrasah dari 990 sekolah setingkat SD-SMU di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah AS.

[HIGHLIGHT BERITA MARET 2006]

Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, menyatakan sangat terkesan melihat aktivitas anak-anak di madrasah tersebut. Mereka, katanya, mempelajari berbagai bidang pengetahuan sesuai dengan kurikulum nasional meski mereka berada di sekolah Islam.

"Saya yakin anak-anak muda itu nantinya akan menjadi orang-orang yang mampu tampil di berbagai bidang dan menunjukkan makna toleransi kepada dunia," ungkapnya. Rice juga bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Perencanaan Boediono dan berpidato di depan forum Indonesia Council of World Affairs.

▶ 15/03/2006

Penandatanganan Kesepakatan Blok Cepu

Kesepakatan Operasi Bersama (Joint Operation Agreement/JOA) Blok Cepu antara PT Pertamina dengan ExxonMobil ditandatangani di kantor Pertamina, Jakarta. Penandatanganan dilakukan antara Dirut PT Pertamina EP Cepu (PEPC), anak perusahaan Pertamina, Hestu Bagyo dan Presiden Direktur ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), Peter Coleman, yang mewakili anak perusahaan Mobil Cepu Limited (MCL) dan Ampolex Cepu Ltd (ACL).

Penandatanganan ini merupakan akhir dari tarik ulur mencari titik temu dalam membuat kesepakatan kerjasama yang terjadi selama berbulan-bulan.

pasal pun dikurangi dari 93 pasal menjadi tinggal 82 pasal.

▶ 13/03/2006

Hamid Penuhi Panggilan KPK

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diminta keterangannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan segel surat suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hamid Awaludin membantah keterlibatan dirinya dalam kasus pengadaan segel surat suara yang menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daan Dimara sebagai tersangka. Ia membantah pernyataan Daan Dimara beberapa waktu lalu yang menyebut keterlibatan dirinya dalam kasus ini. "Jawaban saya ada dua. Pertama, secara

faktual saya tidak tahu menahu tentang segel. Saya hanya menangani surat suara. Kedua, secara hukum saya tidak pernah diangkat sebagai panitia pengadaan segel. Saya hanya diangkat sebagai panitia pengadaan surat suara," kata Hamid di Kantor KPK, saat dicegat wartawan sebelum menjalani pemeriksaan.

▶ 14/03/2006

Menlu AS Kunjungi Jakarta

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice memulai kunjungan dua hari di Jakarta (14-15). Kunjungan yang sempat tertunda beberapa bulan ini merupakan cerminan dari apresiasi AS atas perkembangan yang terjadi di Indonesia. Rice yang sebelum bertemu Menlu Hassan Wirajuda melakukan kunjungan khusus ke Madrasah Al Makmuriyah di



MERETAS JALAN KE NEW YORK

Pergolakan melawan PT Freeport Indonesia bisa tergelincir menuju "gerakan" mewujudkan aspirasi Papua Merdeka.

Kemelut tambang tembaga Freeport Indonesia (FI) di Tembagapura, Timika, terjerat perangkap politik. Demo brutal ratusan anggota Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat di Abepura (16/3) menewaskan 4 aparat keamanan, dan 40 demonstran ditahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat indikasi bahwa gerakan tersebut meningkat dari penolakan FI dan Propinsi Irian menjadi tuntutan kemerdekaan Papua. Seperti demo ratusan anggota Front Persewaan Perjuangan Rakyat Papua Barat, di Jakarta (28/2), menuntut: penutupan tambang FI, penarikan kesatuan militer dan pembebasan tahanan politik Papua.

Pada kesempatan lain, 20 perwakilan masyarakat dan mahasiswa Papua di Jakarta, menemui bekas Ketua MPR Amien Rais, pekan lalu. Amien seolah menyiram bensin pada api yang sedang menyala, setuju FI ditutup sampai adanya kesepakatan tentang pembagian kekayaan yang lebih adil.

Pemilik saham mayoritas FI, Freeport McMoran Copper & Gold (81%), terdaftar di bursa saham New York sebagai perusahaan publik. Pemerintah dan swasta Indonesia, masing-masing memiliki saham 9% dan 10%.

FI memulai operasinya tahun 1973, setelah perjanjian kontrak karya (KK) pertama ditandatangani, 7 April 1967. KK ini semestinya berakhir 2003, namun diperbarui (1991), 15 tahun sebelum batas waktunya berakhir. Karena ada indikasi perluasan operasi penambangan di Graberg, kata bekas Mentamben Ginanjar Kartasasmita kepada *Rakyat Merdeka* (7/3), FI meminta perpanjangan kontrak tahun 1988. Dan disetujui pemerintah Indonesia.

Isyarat yang kasat mata, ketidaksetiaan pada FI sedang meluncur bagai bola salju. Tokoh demo Papua, Marthen Goo, sebagaimana dikutip *Koran Tempo* (1/3), meminta Freeport ditutup selamanya. Namun Wapres Jusuf Kalla telah menegaskan lewat pers, pemerintah tidak mungkin menutup FI.

Memenuhi tuntutan tersebut sama saja menggiring pemerintah Indonesia pada posisi yang sangat dilematis. Sebab,

menutup FI berarti mengingkari komitmen dan melawan kepentingan AS.

Kehadiran AS di Timika punya latar belakang sejarah yang cukup panjang. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda akibat proklamasi kemerdekaan Papua Barat (1/12-1961), menarik perhatian Presiden AS John F. Kennedy. Soalnya, 18 hari kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TriKora) untuk membubarkan pemerintahan boneka Belanda di Papua Barat. Indonesia menyiapkan operasi militer dengan keluarnya perintah Bung Karno bagi pembentukan Komando Mandala (11/1-1962). Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Mandala.



Kennedy mengundang Bung Karno ke Washington DC, April dan September 1961. Kennedy tidak menghendaki peperangan lantaran adanya kepentingan AS di Timika. Karena itu, dia membujuk Bung Karno agar mau berunding dengan Belanda. Bung Karno setuju.

Belanda menolak penyelesaian damai, mengirim Menlu Joseph Luns ke Washington. Semula Luns bersikeras, namun Kennedy membujuknya dengan nada menekan: "Do you want to fight a war about West New Guinea?" Luns melunak dan mau berunding. Akhirnya, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian tentang Papua Barat di markas PBB, New York (15/8-1962).

Belanda mengalihkan administrasi Papua Barat kepada pemerintahan PBB di bawah UNTEA (1/10-62). Lantas UNTEA (1/2-63) mengalihkannya ke pemerintah Indonesia, dengan syarat harus menye-

lenggarakan penentuan pendapat rakyat (Pepera).

Hasil Pepera (14/7-2/8-1969) diterima oleh Majelis Umum lewat Resolusi PBB Nomor 2504, tanggal 19 November 1969. Resolusi itu dicapai dengan suara; 84 setuju, 0 menentang dan 30 abstain. Dengan demikian, Irian Barat (Papua Barat) menjadi bagian wilayah Indonesia yang sah, baik secara hukum internasional maupun etiket demokrasi. Sekarang, daerah yang berpenduduk 2.355.000 jiwa (1998) itu, dibagi dalam dua propinsi: Papua dan Irian Jaya Barat.

Aspirasi Papua Merdeka bangkit kembali setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatan di puncak era reformasi (21/5-1998). Tak kurang dari 100 tokoh masyarakat Papua (26/2-1999) menemui Presiden B.J. Habibie. Mereka menyampaikan keinginan merdeka dan keluar dari NKRI. Gerakan ini mendapatkan energi baru tatkala Presiden KH Abdurrahman Wahid merestui pengibaran bendera Bintang Kejora (1/12-1999) untuk memperingati 38 tahun kemerdekaan Papua Barat (versi Belanda). Tanggal 7 Januari 2000, Gus Dur mengganti nama propinsi Irian Jaya menjadi propinsi Papua. Dia juga merestui dan membuka Kongres Rakyat Papua II (29 Mei-4 Juni 2000) yang merekomendasi keluarnya Papua dari NKRI.

Era kebangkitan kembali bangsa Papua dimulai tahun 1998, tulis Origenes Reagen Ijie di dalam bukunya: *Kongres Rakyat Papua II Merupakan Resolusi Dasar Menuju Papua Merdeka* (Penerbit: PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2003).

Tulis Origenes; gerakan kemerdekaan di Papua, terbagi dalam dua arus utama; (1) kelompok pro otonomi khusus, dimotori oleh birokrat dan politisi, dan (2) kelompok pro merdeka, dimotori para cendekiawan, tokoh agama, adat, mahasiswa dan masyarakat.

Tujuan mereka; menciptakan momentum bagi dialog internasional yang dimediasi PBB dengan menghadirkan pemerintah Belanda, Indonesia, AS dan rakyat Papua. Hasil maksimal yang ingin dicapai: referendum bagi rakyat Papua.

Jadi, searif apapun tawaran pemerintah bagi solusi kasus FI, akan ditolak oleh kelompok pro merdeka yang sedang meretas jalan menuju New York. ■ SH

BUSUNG LAPAR

ASI terasa mengering, tak bergizi, tak memuaskan rasa dahaga dan lapar buat anak-anak malang di pojok timur Indonesia. Di NTT, selama setahun ini, 61 anak Balita mati dengan mengenaskan lantaran menderita busung lapar, bahasa halusnya “kurang gizi.” Dan masih banyak Balita di daerah-daerah lain yang mengidap penyakit serupa.

Menurut standar yang disiarkan Departemen Kesehatan; gizi cukup bagi anak Indonesia (usia 0-6 bulan): berat badan 6 kg, tinggi badan 60 cm, energi 550 Kkal, protein 10 g, Vitamin A 375 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 4 mg dan Vitamin K 5 ug. Sedangkan (usia 7-12 bulan): berat badan 8,5 kg, tinggi badan 71 cm, energi 650 Kkal, protein 16 g, Vitamin A 400 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 5 mg dan Vitamin K 10 ug. Gejala kurang makan yang akut berujung pada penyakit kurang gizi alias busung lapar.

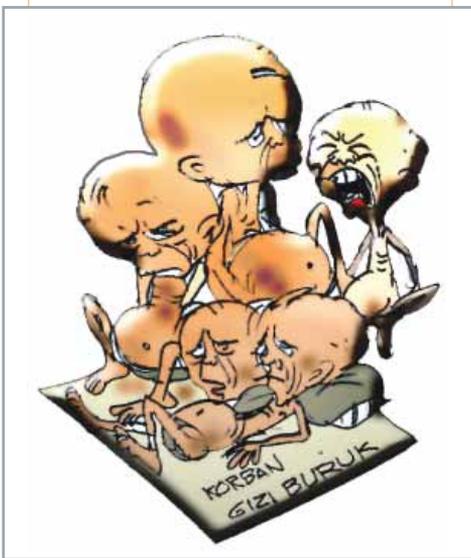
Dunia ini memang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Di Jakarta, orang kaya dengan mudah menghabiskan puluhan juta rupiah di hotel-hotel berbintang dan tempat-tempat hiburan elit, hanya dalam semalam. Padahal orang-orang miskin, baik di desa maupun di kota, membanting tulang sehari-hari untuk memberi makan apa adanya, makanan kurang gizi, kepada anggota keluarga mereka. Sebuah ironi yang menggemaskan, tetapi memalukan.

Aneh, di era yang serba canggih ini, di Indonesia malah terjadi proses pemiskinan. Rumus pemiskinan paling sederhana; harga-harga meroket minus pendapatan rendah atau pendapatan nol.

Belakangan ini, proses tersebut menggumpal ibarat gunung es setelah pemerintah (tahun 2005) dua kali menaikkan harga BBM. Angka RTM-pun serta merta naik dari 15 juta menjadi 15,6 juta. Kenaikan harga BBM yang kedua (1/10-2005) membuat banyak RTM (Rumah Tangga Miskin) terhempas ke lembah busung lapar. Memang pemerintah memberikan kompensasi, yaitu dana bantuan tunai Rp 300.000 untuk setiap RTM.

Tetapi uang tunai itu menguap dalam sekejap karena mereka harus menutup utang dan membeli barang-barang kebutuhan pokok.

Penuh retorika—kalau tidak bisa dibilang sandiwara politik—para anggota parlemen merasa bahwa solusi gizi buruk anak-anak malang tersebut cukup diatasi dengan interpelasi alias penggunaan hak bertanya mereka.



Tidak lebih dari itu. Tidak ada upaya yang lebih serius dan pengamatan lebih mendalam, kenapa ada keluarga—berbulan-bulan—tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun. Kenapa di sudut-sudut desa dan kota yang kumuh, anak-anak harus menderita dan mati kelaparan.

Boleh dibilang para anggota parlemen sudah cukup puas hanya lantaran interpelasi mereka ditanggapi pemerintah. Padahal jawaban pemerintah juga penuh retorika. Tidak banyak menyentuh persoalan dasar. Masalah yang mesti diatasi; ribuan Balita di seluruh penjuru negeri tergeletak tak berdaya dan mati mengenaskan lantaran busung lapar. Memang paling mudah mencari dalih. *Kambing hitam* satu: warisan masa lalu. Dan *kambing hitam* dua: ketidakberdayaan pemerintah mengatasi hambatan politis dan teknis.

Seperti yang terjadi pekan lalu (7/3) di depan sidang paripurna DPR: Aburizal Bakrie, konglomerat yang dipercaya menjabat Menko Kesra,

berbicara tentang terjadinya gizi buruk yang dia kaitkan dengan warisan masa lalu, otonomi daerah, dan lumpuhnya sarana dan prasarana pelayanan. Di sisi lain, reaksi para anggota parlemen yang dipilih oleh sebagian besar pemilih miskin itu, kebanyakan hanya basa-basi. Tak ada tindak lanjut.

Lantas apa hasil konkrit dari penggunaan hak interpelasi DPR? *Nonsen*. Kecuali kegalauan yang muncul di media massa; mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan langsung kepada para wakil rakyat tentang kemelut busung lapar dan penyakit polio, dua sisi suram yang sangat melekat dengan keseharian masyarakat miskin.

Rasanya setelah negeri ini merdeka 61 tahun, semakin banyak orang jatuh miskin, menyentuh angka hampir 100 juta jiwa. Ini yang membuat mereka tak mampu—memenuhi standar gizi, tinggal di rumah yang layak, merawat kesehatan dan mendidik anak-anak mereka.

Semestinya, selama rentang waktu tersebut, negara sudah mampu memberi rakyatnya lapangan kerja dengan penghasilan yang memadai, pendidikan dan perawatan kesehatan secara cuma-cuma. Yang terjadi malah sebaliknya. Indonesia malah tersingkir dari kelompok negara-negara berkembang dan terjerembab ke dalam kelompok negara-negara miskin.

Akibatnya, ribuan calon tenaga kerja wanita dan anak-anak mengalir dari Jawa, Madura, NTB, NTT dan Kalimantan Barat, masuk secara gelap ke Brunai Darussalam, Sabah dan Sarawak. Di sana mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah. Negeri ini menjadi tidak bermartabat, bahkan di depan mata negeri-negeri serumpun.

Muak hidup miskin turun temurun dan bertekad mengubah nasib, mereka pun tergiur rayuan dan janji muluk para calo. Banyak yang masuk perangkap perdagangan manusia, terjerat perdagangan seks dan perbudakan anak-anak. Risiko ini mereka ambil juga supaya tidak menderita kelaparan di negeri sendiri.

Agaknya, peribahasa: “hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang,” tak lagi berlaku bagi mereka. ■

DERAI TAWA DI SIDANG PARIPURNA

Pemerintah puas, DPR-pun puas lantaran hak interpelasi terjawab setelah terkatung-katung selama setahun. Tetapi gizi buruk dan penyakit polio yang dipertanyakan masih meminta korban nyawa.

Hiruk-pikuk tawa di rapat paripurna DPR (7/3) untuk mendengarkan jawaban pemerintah atas interpelasi tentang gizi buruk dan penyakit polio berakhir damai. Soalnya sempat beredar silang pendapat tentang ketidakhadiran Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

untuk menjawab sendiri interpelasi tersebut. Pengamat LIPI, Syamsuddin Haris, dalam artikelnya di *Harian Kompas* (14/3) memandang sinis kejadian tersebut. Tulis Syamsuddin: “Ketika busung lapar dan polio yang dialami rakyat kecil belum sepenuhnya ditangani, diam-diam para wakil rakyat justru merencanakan kenaikan tunjangan pada 2006 ini.”

Itukah alasannya DPR menerima baik jawaban yang disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menkes Siti Fadilah Supari? Amat naif jika itu yang jadi tujuan mereka. Soalnya, dari pojok timur Indonesia, di NTT selama setahun ini, gizi buruk telah menelan jiwa 61 anak Balita, ditambah tiga anak dari Bengkulu dan dua anak dari Banjarmasin.

Ironisnya, tulis Syamsuddin, penggunaan hak interpelasi DPR dalam kasus busung lapar ditanggapi setengah hati oleh pemerintah. Penjelasan dan kebijakan yang diambil pemerintah amat normatif dan jauh dari kesan serius.

KELAPARAN DI YAHUKIMO





APA ADANYA: Keluarga ini terpaksa tinggal di pinggir sungai karena daerah kemiskinan.

Derai tawa dari para anggota Dewan seolah memberi kesimpulan bahwa persoalan busung lapar dan polio dianggap angin lalu dan sudah tuntas.

Sidang penting itu hanya mendengarkan keterangan sepihak dari pemerintah. Tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab. Tetapi ada juga vandalisme. Para pengusul interpelasi tidak jadi bicara karena mikrofon tiba-tiba mati, atau dimatikan? Keanehan lain; pimpinan DPR tidak memberi kesempatan bicara kepada anggota Dewan.

Usai sidang paripurna itu, muncul berbagai kecaman dan kritik. Misalnya, mantan Ketua MPR Amien Rais, menyindir DPR kembali pada fungsinya yang berpuluh-puluh tahun, hanya jadi tukang stempel. DPR semestinya, bukan jadi panggung sandiwara dan retorika, tetapi tempat untuk bertukar pikiran mengenai nasib rakyat dan masa depan bangsa.

Substansi interpelasi jadi kabur, kehilangan momentum. Para anggota parlemen tidak merekomendasikan apa-apa untuk mendesak pemerintah bertindak segera mencegah jatuhnya korban-korban baru. Sepertinya, pemerintah lebih mendekatkan diri pada otoritas DPR, bukan menerima masukan untuk menangani permasalahan lebih tepat dan sungguh-sungguh. Maka muncul suara-suara untuk menambah insentif para anggota Dewan. Agaknya—legislatif dan eksekutif—telah sama-sama kehilangan kepekaan untuk mengatasi kesulitan yang dialami rakyat miskin.

Contoh yang paling konkrit, kasus kenaikan harga BBM rata-rata 128%, tanggal 1 Oktober 2005. Saat itu pemerintah berteriak keras tentang kemungkinan defisit APBN yang teramat serius bilamana harga BBM tidak dinaikkan. Di parlemen muncul asumsi yang sama tentang perlunya kenaikan tersebut, jika tidak ingin pemerintah tak berdaya mengatasi persoalan makro dan mikro ekonomi. Faktanya, semua fraksi di DPR, kecuali PDIP, menyetujui kenaikan harga BBM dengan besaran seperti yang diusulkan oleh pemerintah.

Lantas anggota fraksi-fraksi tersebut, untuk menampilkan diri sebagai sinterklas, meminta pemerintah mengucurkan bantuan tunai langsung kepada setiap RTM yang berjumlah 15 juta. Memang terjadi surplus pemasukan di dalam APBN, tetapi uang Rp 15 triliun menguap seperti air di padang pasir.

Sementara pihak menilai, tunjangan Rp 10 juta per bulan yang diberikan pemerintah kepada setiap anggota dewan tak lain dan tak bukan sebagai “imbalan” atas dukungan DPR pada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.

Begitu kenaikan memicu laju inflasi sampai 18,38% dan ribuan PHK di berbagai industri, fraksi yang mendukung hanya berdiam diri. ■ SH

KORBAN BUSUNG

Ratusan Balita pengidap gizi buruk menanti tambahan makanan dalam penderitaan panjang. Banyak yang tak mampu bertahan.

Sudah setahun DPR mengajukan interpelasi tentang gizi buruk dan penyakit polio. Baru dijawab sekarang, setelah ratusan anak pengidap busung lapar, meninggal dengan mengenaskan. Di NTT saja, belum termasuk daerah-daerah lain, dalam kurun waktu setahun—Maret 2005-Maret 2006—sebanyak 61 penderita meninggal dunia. Berita pilu ini muncul (8/3) hanya sehari setelah interpelasi DPR dijawab oleh pemerintah. Namun jawaban pemerintah yang disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menkes Siti Fadilah Soepari (7/3) sangat normatif.

Penderita gizi buruk dan busung lapar di NTT mencapai 161 Balita, kesialan menimpa 76 anak lantaran tidak masuk di dalam program pemberian makanan tambahan. Sebagian besar dari anak-anak ini (61) akhirnya meninggal dunia lantaran menderita kekurangan gizi yang sangat parah, demikian laporan Harian *Indo Pos* (15/3).

Program Pangan Dunia (WFP) memang telah memberi bantuan susu, namun tak mampu menolong anak-anak malang tersebut. Seolah menyesal, Kepala Puskesmas Batakte, Kupang Barat, dr. Angeliqwe Kuhurima mengungkapkan, dana yang diterimanya dari kantor Menko Kesra hanya untuk melayani 85 Balita. Anak-anak kurang gizi yang dilayani sesuai dengan alokasi Menko Kesra.

Di Bengkulu, tiga bayi pengidap gizi buruk meninggal dunia. Sedangkan dua bayi lainnya, warga kota Banjarmasin, juga meninggal dunia karena



LAPAR MASIH BERJATUHAN



Anak pengidap gizi buruk

mengidap gizi buruk. Menurut laporan Harian Pelita (10/3), di Banjarmasin, dua dari tiga penderita gizi buruk meninggal dunia. Seorang di antara kedua penderita sempat dirawat di RSUD Ulin, Banjarmasin. Tetapi, Dina Safitri, usia 19 bulan, meninggal di rumah sakit (8/3). Sedangkan penderita lain, Raihan, usia 13 bulan, tidak sempat dirawat, meninggal di rumah orangtuanya di Kelayan B, Banjarmasin.



NASIB: Ibu dan anaknya busung lapar merenungi nasib.

Penderita yang masih hidup, Sandri, usia 12 bulan, masih dirawat di RSUD Ulin.

Sampai Maret 2006, di Bengkulu ditemukan 56 Balita yang mengalami gizi buruk, tiga di antaranya meninggal dunia. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Bengkulu Husni Hasanuddin yang dikutip Pelita, mengatakan angka pengidap gizi buruk tahun 2005 mencapai 390 Balita. Semua penderita sudah ditangani, banyak yang pulih setelah diberi makanan tambahan. Tetapi ada juga penderita yang tidak bisa disembuhkan secara total dengan makanan tambahan hanya 4 bulan.

Jawaban pemerintah yang disampaikan Bakrie tidak menyentuh inti persoalan. Busung lapar akibat gizi buruk, menurut Bakrie, merebak tahun lalu karena terjadinya stagnasi dalam penyediaan prasarana pelayanan dasar kesehatan. Kata Bakrie, kasus gizi buruk berkaitan dengan gagal panen, memburuknya ekonomi lokal dan transisi sistem pemerintahan daerah. Jawaban yang jauh panggang dari api.

Pemerintah pusat mempersalahkan pemerintah daerah, lantaran terjadinya pergeseran besar dalam fungsi pelayanan dasar selama delapan tahun terakhir. Sistem otonomi daerah telah melimpahkan tanggung jawab pelayanan dasar, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan kependudukan, ke pundak pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten.

“Jika kebijakan desentralisasi mengurangi kualitas maupun kuantitas pelayanan dasar pada masyarakat, maka kita harus berani memikirkan kembali sekaligus mencari jalan keluar dari persoalan yang ada,” kata Bakrie di depan rapat paripurna DPR. Sidang itu dipimpin oleh Soetardjo Soeryoguritno, Wakil Ketua DPR dari FPDIP.

Dalam soal penyakit polio, Bakrie meminta DPR melihatnya secara proporsional. Sebab virus polio yang menyebar di sini bukan berasal dari wilayah Indonesia, tetapi dari Afrika Barat. Kata Bakrie, masalah polio harus diterima sebagai fakta warisan masa silam, tanpa harus menuding siapa yang salah, dan pemerintah berusaha memperbaikinya.

Menkes Siti Fadilah mengatakan, pihaknya sudah berusaha keras menangani penyakit polio dengan program imunisasi nasional (PIN). Sampai sekarang PIN sudah tiga kali.

“Tidak ada lagi kasus baru penyakit polio. Dengan adanya PIN diharapkan tidak lagi muncul kasus baru,” kata Siti Fadilah kepada harian sore *Sinar Harapan* (7/3).

Pimpinan fraksi oposisi (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai adanya kolusi antara SBY dan Ketua DPR Agung Laksono dalam soal interpelasi. Dia mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjawab pertanyaan para anggota DPR. SBY hanya diwakili oleh dua menternya; Bakrie dan Fadilah. Ini sesuai dengan surat yang disampaikan Agung kepada SBY. Tjahjo mempersoalkan surat Agung ke Presiden, meski-



Anak-anak gizi buruk

pun perwakilan presiden oleh menteri diperkenankan oleh Tatib DPR.

Pernyataan tidak puas juga disampaikan Sekretaris FPDIP, Mayong Padang. Dia menginginkan Presiden hadir di DPR untuk menyampaikan jawaban pemerintah. “Bagaimana kelanjutan interpelasi ini, kita lihat nanti,” kata Mayong.

Sekretaris FPP Lukman Hakiem punya pandangan berbeda. Kedua masalah tersebut, katanya, tidak tiba-tiba terjadi, tetapi melewati proses yang cukup lama. Dia tidak ingin pemerintah sekarang yang dipersalahkan, karena krisis ekonomi yang mengakibatkan merosotnya kualitas gizi terjadi sejak 1997. Sedangkan kasus polio merupakan kecenderungan global.

“Saya yakin kedua masalah ini butuh perbaikan dalam jangka panjang,” kata Lukman. ■ SH

GENERASI KURANG GIZI DI NEGERI LUMBUNG PADI

Peningkatan jumlah penderita gizi buruk seharusnya mendorong pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dalam bidang pembangunan kesehatan. Jangan sampai negeri ini memiliki generasi kurang gizi, padahal lumbung padi ada di sini.

Ninih (4 th) hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tubuhnya yang tinggal kerangka terbalut kulit kian hari kian melemah. Bahkan suara tangispun tak terdengar lagi. Rintihan yang keluar dari mulutnya hanya bisa disambut tatapan nanar mata Sanah, sang ibu. Beberapa anak lain di Desa Mauk, Serpong juga mengalami kondisi yang sama. Bahkan ada beberapa yang sudah meninggal, akibat gizi buruk.

Kondisi serupa bukan hanya di Serpong, tapi juga di beberapa daerah. Masih ada Ninih-Ninih lain di belahan negeri ini. Bahkan kantor Menteri Kesehatan mencatat, hingga Desember 2005, anak penderita gizi buruk telah mencapai 76.178 jiwa. Jumlah ini demikian menyesak dada. Bagaimana tidak? Negeri yang dulu pernah mendapat penghargaan dari badan kesehatan dunia WHO karena keberhasilannya dalam swasembada pangan, dan terkenal sebagai lumbung pangan, kini justru kekurangan pangan. Masyarakat di beberapa daerah sudah mulai mengonsumsi nasi aking dan jagung. Itu pun jika ada. Lalu siapa yang patut dipersalahkan dalam kasus ini?

Pembangunan Kesehatan Masih Terabaikan

Hidup sehat, sebenarnya menjadi hak setiap manusia. Namun, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 10 Desember 1948, hanya tercantum lima hak asasi manusia. Yakni, hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan hak budaya. Sedangkan hak kesehatan seolah-olah terlupakan

begitu saja. Itulah sebabnya maka pembangunan kesehatan tidak mudah dilaksanakan, karena bidang kesehatan tidak pernah menjadi isu politik utama.

Pembangunan bidang kesehatan adalah pembangunan yang bersifat non-fisik. Karena hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu dekat. Sehingga kurang mendapat perhatian. Tidak jarang pemerintah daerah dan DPRD di daerah miskin sekalipun lebih mengutamakan pendirian rumah sakit baru dengan peralatan canggih dan mahal, daripada memperbaiki, melengkapi peralatan dan meningkatkan kapasitas SDM dan Puskesmas yang telah ada. Hal ini diakui Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

“Pemerintah daerah (Pemda) masih banyak yang mengutamakan pembangu-



nan gedung daripada sarana maupun prasarana untuk pencegahan dan perawatan kesehatan. Bahkan desentralisasi kesehatan masih belum berjalan dengan mulus,” ungkapnya suatu ketika.

Ironisnya, gedung megah yang menjulang di setiap inti kabupaten/kota seakan tak mempedulikan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. “Ini karena otonomi daerah yang menjadikan prioritas untuk kesehatan menjadi dikebelakangkan,” lanjutnya.

Kebijakan Anggaran

Kasus gizi buruk, busung lapar dan kasus-kasus penyakit yang menyertainya menandakan buruknya kualitas kesejahteraan sebagian besar penduduk di tanah



INTERPELASI: Menkes Siti Fadilah Supari di sidang interpelasi DPR.



Presiden SBY membesuk anak kurang gizi

air. Akar persoalannya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Karena ini, maka pemerintah lalu dituding kurang serius dalam menangani bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan layanan sosial.

Tudingan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kesehatan ini semata-mata dilihat dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan secara nasional. *Bisnis Indonesia* mencatat, anggaran yang dipersiapkan pemerintah untuk bidang kesehatan secara nasional berkisar antara 2,2 hingga 2PX per tahun. Padahal standar kesehatan WHO menetapkan anggaran ideal untuk bidang kesehatan 5%.

Sehingga anggaran biaya bidang kesehatan di Indonesia dianggap paling rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kondisi ini menjadi lebih berat dengan kemunculan kasus gizi buruk di beberapa daerah belakangan ini. Beban pembangunan kesehatan dengan adanya kasus ini otomatis meningkat.

Direktur Program Pangan Dunia (*World Food Programme*) Indonesia, Mohammed Saleheen menjelaskan, masalah akibat kekurangan gizi ini menyebabkan negara harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. "Menurut perkiraan, Indonesia sendiri menghabiskan sekitar 750 juta dolar AS per tahun karena masalah gizi buruk ini," ucapnya seperti dikutip *Sinar Harapan*.

Meningkatnya beban pembangunan kesehatan akibat kasus gizi buruk, maka kebijakan yang berimbang dan simultan merupakan pendekatan yang sensibel

untuk perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia. Yaitu antara upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif di satu sisi dan upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif di sisi lainnya. Bukan kebijakan kesehatan yang berkesan responsif dan cenderung kagetan. Jadi, lebih antisipatif serta dirumuskan dengan cara yang lebih sistematis berdasarkan fakta di lapangan.

Perjalanan Panjang

Masalah gizi buruk yang kini terjadi, sebenarnya bukan masalah yang semata-mata terjadi saat ini. Masalah ini telah melewati proses yang cukup panjang dan waktu yang lama. Jika Ninih (4 tahun) dan anak-anak lain kini menderita gizi buruk, itu bukan semata-mata karena saat ini orangtua kekurangan makanan.

Proses pertumbuhan dan perkembangan Ninih dan anak-anak lainnya tersebut bermula ketika mereka masih dalam kandungan dan kemudian lahir sebagai bayi. Dari ibu yang juga kurang gizi, lahirlah generasi-generasi yang tidak sekedar kurang gizi, tapi gizi buruk. Tingginya angka kurang gizi pada ibu hamil ini memiliki kontribusi terhadap tingginya angka berat badan lahir rendah (BBLR). Berdasarkan data Depkes 2004, di Indonesia angka berat badan bayi rendah diperkirakan mencapai 350 ribu bayi setiap tahunnya.

Jika dirunut, krisis ekonomi yang mengakibatkan merosotnya komoditas gizi ini sudah terjadi sejak tahun 1997. Dalam kurun waktu 1997 hingga 2006, badai krisis ekonomi memiliki kontribusi besar dalam munculnya kasus gizi buruk yang kini kian marak. Maka anak-anak yang mengalami gizi buruk rata-rata berusia di bawah 9 tahun. Padahal masa-masa usia Balita tersebut adalah masa-masa per-

tumbuhan dan perkembangannya. Bukan saja pertumbuhan fisik, tapi juga psikis dan otaknyanya.

Masa Balita adalah masa yang amat penting, karena masa ini merupakan masa kritis dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia berkualitas. Enam bulan terakhir masa kehamilan hingga dua tahun pertama pasca kelahiran merupakan masa emas, dimana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki.

Menurut catatan UNICEF, anak yang menderita kurang gizi berat memiliki rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan rata-rata anak yang tidak kekurangan gizi. Akibat lanjutan, tingginya berat badan bayi ketika lahir, akibat gizi buruk yang berlanjut kurang gizi pada masa balita, serta tidak adanya pencapaian perbaikan pertumbuhan (*catch-up growth*) yang sempurna pada masa berikutnya, maka banyak anak sekolah kurang gizi. Lebih dari sepertiga (36,1%) anak usia sekolah di Indonesia tergolong pendek dan kurus ketika memasuki usia sekolah. Ketidaksiesuaian antara berat badan, tinggi badan dan usianya, sebagai indikator adanya kurang gizi.

Masalah gizi dan kesehatan di masa datang akan semakin kompleks. Maka, jika tidak segera dihentikan, dalam lima belas tahun ke depan Indonesia akan kehilangan 1,67 dari 2037 juta remaja lainnya akibat gizi buruk. Bahkan di NTB, satu dari setiap sepuluh remaja diprediksikan tumbuh tidak normal akibat gizi buruk. Jadi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bisa-bisa negara ini akan kehilangan generasi unggulnya (*lost generation*) akibat buruknya gizi. ■ RD

Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Mikro

Direktur Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan RI, dr. Rachmi Untoro dalam siarannya yang dipublikasikan *Antara* menjelaskan tentang upaya penanggulangan masalah gizi mikro. Salah satunya adalah dilakukan melalui fortifikasi (pengayaan), penganekaragaman bahan pangan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi.

Menurutnya, selama ini intervensi gizi melalui fortifikasi, suplemasi dan pendidikan gizi terbukti efektif dan efisien untuk menanggulangi berbagai masalah gizi mikro. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa selama ini fortifikasi zat gizi mikro telah dilakukan pada beberapa produk pangan termasuk terigu (untuk zat besi, asam folat, seng, vitamin B1 dan B2), garam (untuk yodium) dan minyak goreng (untuk vitamin A).

Sementara itu terkait dengan upaya penganekaragaman bahan pangan, Rachmi menjelaskan, bahwa pihaknya telah mengampanyekan penggunaan bahan pangan lokal kepada masyarakat melalui kader-kader PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). ■ RD

HANTU BERNAMA GIZI

Di tengah himpitan persoalan ekonomi yang melanda negeri ini, kasus gizi buruk terus menerus menghantui penduduknya, terutama mereka yang miskin.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Subur, makmur, *gemah rimpah loh jinawi*. Negeri yang kaya, tentu berpenduduk sejahtera. Setidaknya, semua orang sehat dan cukup makan. Itu harapan paling minimal.

Kenyataan berkata lain. Banyak penduduk, terutama anak-anak, yang menderita gizi buruk. Hanya sebagian kecil dari penduduknya yang kebutuhan gizinya tercukupi.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengakui, hingga akhir Desember 2005,

seluruhan penderita gizi buruk.

Menurut Siti Fadilah, ada tiga hal yang selama ini menyebabkan gizi buruk. "Pertama, karena kemiskinan dan tidak punya makanan. Kedua, mempunyai makanan, tetapi sang ibu tidak mengerti bagaimana caranya memberi makanan yang baik. Ketiga, karena sakit yang diderita sehingga menyebabkan anak balita tidak doyan makan dan akhirnya berat badannya turun," ujarnya.

Berdasarkan data statistik Kesehatan Depkes RI tahun 2005, yang dilaporkan *Gizi.net*, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk. Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia lima tahun (Balita).

"Jumlah itu lebih sedikit dari jumlah tahun-tahun sebelumnya, sehingga meskipun sekarang hampir setiap hari terjadi gizi buruk, namun tidak setinggi kasus gizi buruk pada tahun 2003-2004 sebagai imbas dari krisis moneter," kata Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan



Sang ayah memandang sedih anaknya yang mengidap gizi buruk

sampingkan. "Dalam tujuh prioritas pembangunan tahun 2006, aspek kesehatan bangsa tidak tersusun dengan jelas, apalagi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025," ujarnya.

Menurut dia, aspek kesehatan memang belum berada di posisi peringkat atas, meski derajat kesehatan masyarakat Indonesia masih berada pada derajat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan dalam APBN sesuai anjuran WHO," jelasnya.

Pemerintah Tidak Serius

Terjadinya busung lapar atau gizi buruk adalah suatu proses, tidak tiba-tiba. Karena itu, apabila pemerintah dan masyarakat mau mengerti dan mau bertindak, terjadinya busung lapar dan gizi buruk dapat dicegah, yakni dengan mengetahui sebab langsung dan tidak langsung gizi buruk. Kedua memantau (*surveillance*), dan lakukan tindakan pencegahan.

Karena itu, merebaknya kasus gizi buruk yang terjadi sejumlah wilayah Indonesia dianggap disebabkan penanganan yang kurang serius oleh Pemerintah.

"Pemerintah tidak serius memberikan perhatian terkait dengan kasus gizi buruk," kata Sekretaris F-PDIP DPR, Jacobus Mayong Padang seperti dikutip *ANTARA*.



Santi 6 tahun, penderita marasmus terkulai lemah dalam dekapan ibunya.

jumlah anak di bawah usia lima tahun atau balita yang masih menderita gizi buruk secara nasional tercatat 76.178 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah itu turun meskipun masih kecil, yaitu hanya 1,1 persen dari total ke-

Depkes, Abdurachman.

Abdurachman membenarkan kesehatan masyarakat Indonesia yang semestinya menjadi prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal, namun hingga kini pemerintah masih menge-

BURUK

Jacobus menjelaskan ketidakseriusan dari pemerintah terlihat dari lemahnya koordinasi di semua sektor, baik itu daerah maupun di pusat. "Jika ada koordinasi antarsektor yakni koordinasi antardaerah dan dari daerah ke pusat, maka gizi buruk tersebut dapat ditekan," katanya.

Disinggung soal dana, Jacobus menilai sebenarnya bukan faktor utama karena yang lebih menonjol dalam hal ini adalah lebih pada faktor koordinasi.

"Karena kasus sudah merebak, maka langkah yang harus segera diambil pemerintah adalah dengan memperbaiki kondisi dengan niat yang tulus," katanya.

Sebenarnya interpelasi gizi buruk, termasuk polio, sudah diajukan DPR ke pemerintah tahun 2005, ketika Menko Kesra masih dijabat oleh Alwie Shihab.

Namun jawaban pemerintah yang disampaikan Bakrie kala itu tidak menyentuh inti persoalan. Busung lapar akibat gizi buruk, menurut Bakrie, merebak tahun lalu karena terjadinya stagnasi dalam penyediaan prasarana pelayanan dasar kesehatan. Kata Bakrie, kasus gizi buruk berkaitan dengan gagal panen, memburuknya ekonomi lokal dan transisi sistem pemerintahan daerah. Jawaban yang jauh panggang dari api.

Pemerintah pusat malah mempersalahkan pemerintah daerah. Sistem otonomi daerah telah melimpahkan tanggung jawab pelayanan dasar, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan kependudukan, ke pundak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.



Tersenyum menerima kartu bantuan tunai

Kemiskinan

Busung lapar dalam bahasa Belanda disebut *honger oedem* (HO). Antara lain dapat terjadi karena masalah ekonomi orang tua yang terimpit kemiskinan. Anak menderita sakit yang tak sembuh-sembuh sehingga susah makan. Sanitasi lingkungan yang buruk dan pemahaman warga terhadap kesehatan kurang. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak memperhatikan keseimbangan gizi.

Hal itu dapat menimpa siapa saja, tidak mengenal status ekonomi. Anak orang yang berkecukupan pun bila tidak diperhatikan keseimbangan gizinya dapat terkena gizi buruk. Tentang kasus busung lapar di NTB, misalnya, meskipun wilayah

itu surplus padi, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani.

Busung lapar disebabkan oleh keadaan kurang gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari mereka sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Keadaan kurang gizi itu biasa disebut dengan kurang energi protein (KEP). Setiap individu tidak akan memiliki metabolisme yang normal apabila kebutuhan kalori (energi)-nya tidak terpenuhi. Sumber energi manusia adalah zat-zat gizi sumber energi seperti hidrat arang, lemak, dan protein. Kekurangan protein juga akan menurunkan imunitas terhadap penyakit infeksi.

Sumber protein utama dari makanan adalah daging, ikan, telur, tahu, tempe, susu, dan lain-lain (umumnya lauk-pauk). Karena sistem imunitas tubuh itu sangat bergantung pada tersedianya protein yang cukup maka anak-anak yang mengalami kurang protein mudah terserang infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, TBC, polio, dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Soekirman dalam sebuah artikelnya di harian *Sinar Harapan*, data dari Indonesia dan di negara lain menunjukkan adanya hubungan antara kurang gizi dan kemiskinan.

Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi persentase anak yang kekurangan gizi; makin tinggi pendapatan, makin kecil persentasenya. ■ RH



ASI yang kurang gizi



SUARA MERDEKA

KURANG GIZI: Siti Nurhazanah (2 tahun 4 bulan), balita yang mengalami gizi buruk digendong ibunya.

BALADA MARASMUS, SI KECIL DAN MAHASISWA

Kekurangan gizi meluas di seluruh pelosok Indonesia. Dari desa sampai kota, dari keluarga miskin sampai orang-orang terpelajar.

Seorang anak berumur tiga tahun duduk di depan rumahnya, di perkampungan kumuh belakang kawasan Sudirman, Jakarta Matanya menatap sayu pada orang-orang yang berlalu-lalang di depannya. Sebentar-sebentar ia menyedot ingusnya. Tubuhnya sangat kurus dan lemah. Kedua lengan dan kakinya hanya tinggal tulang dibalut kulit..

Anak itu cuma salah satu dari ribuan anak-anak penderita gizi buruk (*marasmus*) yang jumlahnya tersebar di seluruh Indonesia. Coba simak berbagai surat kabar nasional yang terbit setiap hari. Hampir selalu ada berita tentang kasus-kasus kurang gizi atau gizi buruk di setiap daerah.

Sebanyak 3.226 balita di Kabupaten Karawang dinyatakan mengidap gizi buruk. Demikian dilaporkan *Media Indonesia*, 26 Januari 2006. 1.226 diantaranya

nyata berasal dari keluarga non miskin. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 386 balita menderita gizi buruk. *Media Indonesia* 4 Januari 2006 melaporkan mereka berasal dari 21 kecamatan.

Suara Pembaruan, 7 Februari 2006, melaporkan 6.000 penderita gizi buruk di Jawa Timur. "Gizi Buruk Muncul Lagi di Kupang", demikian judul laporan *Kompas*, 15 Februari 2006. Sementara *Media Indonesia*, pada hari yang sama melaporkan 1.506 balita di Provinsi DI Yogyakarta mengalami gizi buruk.

Selama tujuh pekan pertama tahun 2006, sebanyak 34 penderita gizi buruk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ajidormo Lebak, Banten. Dilaporkan *Kompas*, 17 Februari 2006, enam diantaranya meninggal karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, *Media Indonesia*, 18 Februari 2006, melaporkan kasus gizi buruk terdapat di enam kecamatan

kabupaten ini.

Berita dari Bogor dilaporkan *Suara Pembaruan*, 11 Februari 2006. "Balita Hingga Mahasiswa Terkena Gizi Buruk," demikian ditulis besar-besarnya. Dilaporkan, selama kurun waktu 2005 sampai awal Februari 2006, 84 balita di Kabupaten Bogor teridentifikasi mengidap *marasmus*. Bahkan satu di antaranya menjurus ke busung lapar. Namun yang paling mengherankan, juga dilaporkan sekitar 40 persen dari 3.000 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) juga teridentifikasi kekurangan gizi.

Hal itu terungkap ketika dilakukan tes kesehatan dengan mengambil sampel darah mahasiswa. Diketahui banyak yang mengidap anemia akibat kurang gizi.

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ansori Matjik menyatakan, mahasiswa yang kurang gizi itu bukan karena miskin, karena ada juga yang anemia dari keluarga berada. Artinya, kekurangan gizi mereka disebabkan pola hidup atau asupan makanan yang kurang diperhatikan. Untuk itu, setahun belakangan ini mereka disuplai makanan tambahan. **RH**

PETA GIZI BURUK DI INDONESIA

- ◆ Sejak Januari – November 2005, sebanyak 71.815 balita mengalami gizi buruk di seluruh Indonesia, 232 diantaranya meninggal dunia.
- ◆ Kasus terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat.
- ◆ Jumlah balita yang paling banyak meninggal di Jawa Tengah. Yakni dari 12.028 kasus, 94 orang meninggal.
 - Di NTB, 3.438 penderita gizi buruk, 33 diantaranya meninggal.
 - Di NTT, 13.969 kasus, 52 orang meninggal.
 - Di Nanggroe Aceh Darussalam, 3.763 kasus, 8 orang meninggal
 - Di Papua, 1.155 kasus, 3 orang meninggal.
 - Di Riau, 56 kasus, 4 orang meninggal.
 - Di Kalimantan Selatan, 56 kasus, 4 orang meninggal.
 - Di Kalimantan Tengah, 39 kasus, seorang meninggal.
 - Di Maluku, 5 kasus, seorang meninggal.
- ◆ Selama 2005, di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk. Masih tersisa 35 balita berstatus marasmus, lima menuju marasmus kwarsiorakor dan seorang positif busung lapar.

RINDU DUNIA NAN DAMAI

Dalam artikel opini di koran sore *Sinar Harapan* (7 Maret 2006) berjudul “Urgensi Dialog Peradaban”, Tom S. Saptatmaja berpendapat bahwa pelecehan terhadap martabat Tuhan, Nabi atau manusia sama saja buruknya karena merusak upaya dialog dan membawa dunia pada konflik.

“Kita semua sudah lelah dengan konflik dan permusuhan. Kita merindukan dunia yang damai. Jika bisa saling menghargai, mengapa kita menghina dan melecehkan? Dialog peradaban yang mengedepankan semangat menerima perbedaan harus terus diperjuangkan,” tulis Tom yang juga seorang teolog.

Menurut analisis Tom, kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW di harian Denmark, *Jylland Posten* (30/9/2005), yang juga dipublikasikan oleh beberapa harian Eropa lainnya, yang menuai protes keras umat Islam di penjuru dunia, didalangi oleh para penganut sekularisme radikal, bukan umat Kristen.

Masih kata Tom, tokoh ekstrim kanan Denmark Brian Mikkelsen (politikus berusia 39 tahun) mengakui, semula kartun itu ditujukan untuk menyelamatkan negaranya dari 200.000 imigran muslim di negeri itu. “Jadi, awalnya adalah semangat ‘xenophobia’ atau anti-orang asing,” imbuh Tom mencermati. Sikap itu dilandasi pemujaan berlebihan terhadap heroisme dan nilai-nilai yang mengagungkan kebudayaan Barat.

Meski begitu, Tom mengingatkan, masih banyak kalangan di Barat yang punya kehendak baik seperti diwakili Vatikan dan lembaga-lembaga kajian agama di universitas-universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada, yang mengusung inklusivitas dan penghargaan pada perbedaan agama.

“Nama-nama Karen Amstrong, Anna Marie Schimmel, Montgomery Watt dikenal sebagai penulis dan tokoh yang punya apresiasi tinggi dan jujur terhadap Islam,” ujar Tom.

Di Indonesia sendiri, kita juga menaruh hormat pada tokoh-tokoh pejuang kerukunan, saling pengertian dan dialog antarumat beragama seperti Gus Dur, A. Syafii Ma’arif, Dawam Rahardjo.

Sementara itu, pada terbitan 6 Maret 2006, *Sinar Harapan* memuat artikel Anak Agung Banyu Perwita, Dekan FISIP Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, yang mengangkat isu peran agama dalam hubungan antar negara



“Politik inklusi ini kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan akan menjadi faktor yang penting dalam interaksi nasional dan internasional,” kata Perwita, mengutip Seiple dan Hoover.

(international relations).

Untuk mencegah terjadinya situasi internasional yang semakin memburuk dewasa ini, Banyu Perwita, lewat tulisannya yang berjudul “Faktor Agama dan Hubungan Internasional” itu, mengusung dua rekomendasi penting yang diajukan Robert A. Seiple dan Dennis R. Hoover, dua editor buku “*Religion and Security: The New Nexus in International Relations*” (Oxford: Rowan and Littlefield Publisher; 2004).

Pertama, pengembangan politik inklusi (*the politics of inclusion*) dalam mekanisme pengambilan keputusan kehidupan politik dalam berbagai level nasional, regional, dan internasional, sesuatu yang bersifat imperatif.

“Politik inklusi ini kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan akan menjadi faktor yang penting dalam interaksi nasional dan internasional,” kata Perwita, mengutip Seiple dan Hoover.

Kedua, pengembangan politik keseimbangan (*the politics of balance*), yang memungkinkan terciptanya budaya dialog dan dialog budaya dalam konteks luas antareleman masyarakat baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Dialog antareleman masyarakat akan memperkuat pemahaman akan perbedaan yang selama ini masih mengganjal antarpada penganut agama.

Dengan mengembangkan kedua rekomendasi di atas, Perwita berharap peristiwa-peristiwa serupa dengan kasus kartun Nabi Muhammad tidak terulang lagi di kemudian hari.

Andreas A Yewangoe, Ketua Umum PGI, dalam opininya di *Suara Pembaruan* (2/3), menulis bahwa Sidang Raya *World Council of Churches* (SR WCC) di Porto Alegre, Brasil, belum lama ini, menyoroti sangat tajam isu kemerdekaan berpendapat.

SR WCC, menyiasati heboh karikatur Nabi Muhammad, menegaskan, penerbitan itu tidak dapat diterima. Bahkan penerbitan seperti itu telah menjadikan rumit dialog dan kerja sama antara orang Kristen dan orang Islam, yang selama ini telah berjalan baik.

“Sidang Raya menolak dengan keras penerbitan karikatur tersebut yang telah melecehkan hal-hal yang disucikan di dalam agama-agama, tetapi Sidang Raya juga menyesalkan terjadinya berbagai kekerasan sebagai akibat dari protes terhadap karikatur itu,” tulis Yewangoe, yang anggota Central Committee World Council of Churches. ■

● Dr. dr. Siti Fadilah Supari (Menteri Kesehatan RI)

PERILAKU MENJADI SALAH SATU PENENTU STATUS GIZI

Sebenarnya masalah penanganan problem gizi buruk telah menjadi prioritas pada program seratus hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, penderita gizi buruk justru semakin meningkat. Mengapa? Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang dinilai masih memprihatinkan, ternyata menjadi problem serius dalam pandangan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Siti Fadilah Supari. Hal tersebut berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

“Buktinya, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) masih sangat tinggi di negara ini,” katanya.

Oleh sebab itu, salah satu program prioritas yang dicanangkan melalui program 100 hari pemerintah SBY-JK adalah dengan meningkatkan kesehatan dasar masyarakat yang ditempuh dengan menangani problem gizi buruk. Namun, seratus hari telah berlalu dan jumlah penderita gizi buruk bahkan semakin meningkat. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab besar dalam persoalan ini, Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari terus berupaya untuk keluar dari kemelut ini. Bagaimana upayanya? Demikian hasil wawancaranya:

Selain masalah gizi buruk, apa program prioritas kesehatan lainnya?

Program prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis. Terkait dengan itu maka ke depan akan dilakukan rekrutmen tenaga medis untuk Puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil yang selama ini SDM-nya kurang tersentuh. Kemudian program prioritas ke tiga adalah peningkatan pelayanan jaringan kesehatan masyarakat miskin. Yaitu dengan memberikan kepada mereka kartu asuransi kesehatan yang akan digunakan sebagai kartu untuk menerima pelayanan kesehatan secara gratis. Dan ini sudah terlaksana.

Menurut ibu, masalah kesehatan apa saja yang kini sedang dihadapi bangsa ini?

Selain terkait dengan konsistensi AKI dan AKB, beberapa pokok masalah lain yang dihadapi antara lain masalah pemerataan dan peningkatan SDM kesehatan, kemampuan



perencanaan SDM, kerjasama lintas sektor dan lintas program yang belum jalan secara baik, dan diklat kesehatan yang belum menghasilkan tenaga kesehatan bermutu.

Terkait dengan munculnya banyak berita akhir-akhir ini mengenai meningkatnya jumlah penderita gizi buruk, benarkah jumlah penderita gizi buruk semakin meningkat tahun ini?

Benar. Bahkan menurut catatan kami, hingga akhir Desember 2005, jumlah anak di bawah usia lima tahun atau Balita yang masih menderita gizi buruk secara nasional tercatat 76.178 orang. Pada Januari-Mei 2005, jumlah anak Balita penderita gizi buruk mencapai 9.592. Pada Juni naik menjadi 59.346 anak Balita. Kemudian pada Oktober-November meningkat lagi menjadi 71.815 anak Balita. Selanjutnya pada Desember penderita gizi buruk meningkat mencapai 76.178 anak Balita.

Daerah mana saja yang hingga kini tercatat masih banyak penderita gizi buruk?

Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nias dan Papua.

Apa akibat dari gizi buruk?

Kecukupan gizi sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan zat gizi dapat menimbulkan berbagai akibat serius bagi kesehatan tubuh serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

Misalnya?

Contohnya, anemia akibat kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang otak pada anak usia 6-24 bulan. Juga dapat menimbulkan gangguan produktifitas pada orang dewasa dan meningkatkan risiko kematian atau melahirkan dengan berat badan bayi rendah (BBLR) pada ibu hamil. Ibu hamil yang kekurangan salah satu zat gizi seperti yodium misalnya, berisiko melahirkan bayi dengan kelainan mental dan fisik.

Lalu, menurut Ibu apa hal utama penyebab terjadinya gizi buruk?

Pertama; karena kemiskinan dan tidak punya makanan. *Kedua;* mempunyai makanan tetapi sang ibu tidak mengerti bagaimana caranya memberi makanan yang baik. *Ketiga;* karena sakit yang diderita sehingga menyebabkan anak Balita tidak doyan makan dan akhirnya berat badannya turun.

Jadi, selain karena kemiskinan, faktor perilaku juga menjadi salah satu penyebabnya?

Ya, para ahli kesehatan masyarakat telah sepakat, bahwa faktor perilaku merupakan salah satu penentu utama keadaan status gizi dan kesehatan masyarakat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga-keluarga yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, risiko untuk kekurangan gizi lebih kecil dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan gizi, meskipun sama-sama miskin.

Artinya, kondisi ini bisa saja terjadi pada kelompok keluarga menengah ke atas?

Ya, perubahan pola hidup menuju pola makan yang tidak seimbang, tidak aktif menandakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang arti gizi dan kesehatan masih perlu ditingkatkan

Lalu bagaimana upaya mengatasinya?

Hasil intervensi program perbaikan gizi, baik nasional maupun global harus disikapi secara baik, sistematis, terintegrasi dan lintas sektor. Sedikitnya empat hal yang perlu diintegrasikan, yakni upaya secara langsung dapat meningkatkan akses pangan keluarga. Selain itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang gizi dan kesehatan. Semua itu dengan harapan dapat menjamin ketersediaan pangan secara aman serta menciptakan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti cuci tangan sebelum makan, olahraga teratur dan menghindari penggunaan obat-obat terlarang. Jika setiap keluarga mampu memantau keadaan gizi masing-masing keluarganya, maka keluarga dapat memahami bagaimana memecahkan masalah. Untuk itu harus mampu memanfaatkan potensi keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mengatasi masalah gizi.

Langkah strategis apa yang dilakukan Departemen Kesehatan?

B I O D A T A

Nama : Dr. dr. Siti Fadilah Supari
Lahir : Solo, Jawa Tengah 6 November 1950
Jabatan : Menteri Kesehatan RI
Agama : Islam
Suami : Ir. Muhammad Supari
Anak : Tiga orang

Pendidikan :
 S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gajahmada (FK-UGM), Yogyakarta 1976, S-2, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), Jakarta 1987, S-3, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), Jakarta

Pengalaman Kerja :
 Staf pengajar Bagian Kardiologi FK-UI Jakarta, Praktek di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

Aktivitas :
 Giat dalam kegiatan seminar maupun penelitian

Alamat Kantor :
 Departemen Kesehatan RI, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Diantaranya kami mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan pemenuhan pangan pokok atau *Food Based Approach* untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kurang gizi. Dalam jangka pendek, penanggulangan kurang gizi dan gizi buruk ini dilakukan dengan salah satunya memberikan suplementasi zat gizi mikro, baik berupa tablet zat besi, kapsul vitamin A maupun kapsul yodium. Sedangkan untuk jangka panjang akan dilakukan dengan pendekatan gizi seimbang.

Ibu juga membuka line pengaduan lewat short message service (SMS). Apakah ini salah satu upaya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan masyarakat di daerah-daerah?

Ya. Melalui *line* khusus itu saya berharap masyarakat bisa melapor kepada Menteri Kesehatan seputar masalah kesehatan yang terjadi di daerah-daerah. Sehingga bisa ditangani dengan cepat.

Mengapa Ibu memakai cara ini?

Banyak kejadian dan keluhan dari masyarakat yang tidak sampai ke pusat, tetapi kemudian muncul di media massa. Sehingga Departemen Kesehatan dinilai terlambat dalam merespon kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat. Maka saya meminta kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk membuat laporan berkala setiap tanggal 5 tiap bulannya.

Khususnya laporan tentang apa?

Laporan tersebut berisi tentang kematian ibu dan bayi, prevalensi gizi kurang/buruk, serta perkembangan kejadian luar biasa seperti penyakit polio, demam berdarah, TBC, malaria dan HIV/AIDS.

Mengapa Ibu mengambil kebijakan ini?

Kebijakan ini diambil karena Departemen Kesehatan selalu merasa ketinggalan oleh media massa jika ada masalah kesehatan di daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebab, laporan kesehatan dari Dinas Kesehatan harus masuk dahulu ke Bupati. Maka, selain laporan ke Bupati, Dinas Kesehatan juga harus membuat laporan kesehatan ke Menkes. Dengan demikian, segala perkembangan dan kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat bisa diketahui arah kecenderungannya. Kalau hanya mengandalkan laporan dari instansi di tingkat bawah, prosesnya akan lama sekali. Dengan ini masyarakat langsung bisa melapor, memberi saran dan kritik seputar masalah kesehatan yang terjadi di daerahnya. Sehingga pemerintah bisa merespon dengan cepat. Termasuk munculnya kasus gizi buruk ini. ■ **AD**

CenturyBank PENUHI

CenturyBank menyambut baik kehadiran Paket Januari 2006 (PakJan), sebuah paket kebijakan terbaru Bank Indonesia (BI) untuk memperkokoh fundamental perbankan di masa datang. Kompetisi di industri perbankan akan semakin sehat.

Tali kekang yang membelenggu industri perbankan dalam negeri selama ini, dilonggarkan oleh Bank Indonesia (BI) lewat PakJan Januari 2006. Paket ini berisikan lima Peraturan BI (PBI), dua Surat Edaran BI (SE-BI). Dari paket tujuh poin ini, enam mengatur bank umum dan satu bank syariah.

“PakJan ini sedikit banyak memberikan kelonggaran bagi perbankan,” komentar Sriyono, Pejabat Eksekutif PT Bank Century Tbk atau CenturyBank, dalam satu kesempatan wawancara khusus dengan tim wartawan majalah *Berita Indonesia*.

Sriyono, menyebut bahwa paket kebijakan tersebut merupakan sebuah ke-sejukan baru yang bisa memberikan kelonggaran kepada setiap perbankan, untuk dapat menyesuaikan diri dengan desain perbankan berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Kelonggaran tersebut mencakup bidang perkreditan, penghimpunan dana, dan lain-lain. Tujuan inti kebijakan tersebut, menurut Sriyono, mengarah kepada upaya perbaikan pengelolaan manajemen risiko, sehingga semua bank memiliki fundamental yang lebih kokoh. Manajemen risiko inilah yang akan dipakai setiap bank, sebagai dasar untuk melakukan aktivitas bisnisnya ke depan, baik di sisi perkreditan, penghimpunan dana, maupun pemasaran produk-produknya.

Berdasarkan PakJan tersebut setiap bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite *Good Corporate Governance* (GCG), dan komite-komite lain. Kehadiran komite-komite ini untuk membantu efektifnya pelaksanaan manajemen risiko di setiap bank.

CenturyBank adalah gabungan tiga bank; PT Bank CIC Internasional, Tbk, Bank Danpac, dan Bank Pikko. Bank hasil merger yang kemudian diberi nama PT Bank Century Tbk atau biasa disebut CenturyBank, ini resmi beroperasi sejak 15 Desember 2004. CenturyBank merupakan salah satu bank kategori bank fokus yang bisa segera memberikan respon positif atas kehadiran paket kebijakan tersebut, dengan cara melakukan sejumlah langkah penyesuaian.

Kelonggaran yang dirasakan Sriyono, misalnya batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk satu obligor. Satu obligor, atau nasabah yang memiliki pinjaman pada beberapa bank, berdasar ketentuan lama, bila koleksibilitas kredit-

nya dinyatakan macet di sebuah bank, maka otomatis di bank lain juga harus dikategorikan macet, kendati pengembalian kreditnya masih bisa lancar, lantaran bisnisnya masih prospektif, dan angsuran pokok dan bunga lancar.

“Di PakJan ini kelihatannya ada perubahan. Jadi, untuk nominal tertentu, akan diperlakukan terpisah. Kalau di bank ini dia masih sehat, baik dari sisi pembayaran angsuran pokok, maupun bunga, dan prospek usahanya pun masih sehat, maka tidak perlu dia harus macet. Kalau dulu tidak mau tahu, pokoknya kalau sudah tercatat di sana macet, otomatis di bank ini macet juga,” jelasnya.

Ketentuan BI ini tertuang dalam PBI No. 8/2/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas



CenturyBank siap memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia (BI).

KETENTUAN BI

Aktiva Bank Umum, sebuah langkah transisi penahapan penyeragaman penilaian aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu debitur atau satu proyek.

Berdasarkan klasifikasi debitur dan atau batas jumlah (limit) aktiva produktif yang diberikan, dibuatlah ketentuan sebagai berikut: (1) Untuk 50 debitur besar dan Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama, kewajiban penyeragaman kualitas Aktiva Produktif tetap berlaku; (2) Untuk Aktiva Produktif di bawah Rp 500 juta dikecualikan dari penyeragaman; (3) Untuk Aktiva Produktif dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta, tahapan penyeragaman kualitasnya diatur sebagai berikut: a).

Jumlah Rp 25 miliar, sejak berlakunya PBI ini tetap harus diseragamkan; b). Jumlah Rp 10 miliar, 6 bulan setelah berlakunya PBI ini harus diseragamkan; c). Jumlah Rp 5 miliar, 1 tahun setelah berlakunya PBI ini harus diseragamkan; dan d). Jumlah Rp 500 juta, 1,5 tahun setelah berlakunya PBI ini harus diseragamkan.

Sementara itu *Corporate Secretary* CenturyBank, Deddy Triyana, mengatakan, sejak pertamakali dipersyaratkan, bank ini sudah memiliki Komite Audit. Juga Komite Manajemen Risiko, dan Komite GCG. CenturyBank akan segera membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, yang disyaratkan BI paling lambat Juni 2007. Sejumlah ketentuan teknis lain, yang diminta BI untuk dipatuhi berdasarkan API, seperti tentang anggota direksi minimal tiga orang, anggota komisaris dan direksi harus tidak boleh ada hubungan keluarga, dan penunjukan direktur kepatuhan, juga sudah dipenuhi CenturyBank.

“Ke depannya kita akan lebih mengacu kepada apa-apa yang diminta BI untuk perbankan, karena GCG ada pada semua perusahaan. Cuma, sebagai bank maka kita mengacu kepada ketentuan BI,” ujar Deddy Triyana.

Kinerja, Layanan & Bunga

Sriyono menilai, ketentuan transisional tersebut merupakan salah satu aspek yang membuat PBI bisa membawa unsur ke-longgaran. Soal pendanaan, kata Sriyono, penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurun secara bertahap, sesuatu yang positif dan menawarkan iklim persaingan baru yang lebih sehat.

Sesuai ketentuan LPS, penjaminan dana nasabah di perbankan akan diturunkan secara bertahap. Sampai dengan Maret 2006, dana nasabah yang dijamin maksimal Rp 5 miliar, September 2006 turun menjadi Rp 1 miliar. Sampai akhir tahun 2007, jaminan pemerintah untuk sebuah bank tinggal Rp 100 juta.

Sriyono mengakui, masalah penjaminan memang bisa merepotkan bagi bank maupun nasabah. Ia menggambarkan, kompetisi yang akan terjadi nantinya, nasabah akan menilai sisi-sisi tertentu dari sebuah bank sebelum mengambil keputusan menempatkan dananya. Karena, sukar bagi nasabah yang memiliki dana

besar untuk membagi-bagi penyimpanan dananya ke sejumlah bank. Misalnya nasabah yang memiliki dana Rp 100 miliar, karena maksimum penjaminan, misalnya, Rp 5 miliar, dia harus membagi-bagikannya kepada 20 bank, untuk memperoleh status penjaminan. Maka, kata Sriyono, hal itu akan sangat merepotkan.

“Makanya, nanti kemungkinan besar nasabah ini, supaya tidak khawatir menyimpan dananya akan terlebih dahulu melihat dan menganalisa banknya. Misalnya, dengan pertimbangan sudah mengetahui kinerja bank, mengetahui kualifikasi manajemennya, melihat aset, CAR dan lain-lain,” kata Sriyono. Tapi, dengan kondisi nasabah yang demikian, biasanya dia akan melakukan *bargaining*, “Oke, saya percaya sama bank *you*, tapi apa kira-kira yang saya dapat dari bank ini.”

Menurut Sriyono pasti akan ada nasabah yang ingin memperoleh bunga tertentu, atau meminta servis pelayanan yang bersifat khusus. Sedangkan, bagi nasabah kecil misalnya, agar lebih merasa aman menabung, bisa saja dia memilih bank yang diyakini aman bagi nasabah tersebut.

“Jadi, nanti akan ketemu beberapa tipe nasabah yang berhadapan dengan strategi masing-masing bank untuk memperebutkan nasabah tadi,” kata Sriyono. Sebelum ketentuan penjaminan berlaku, semua bank dipandang sama saja oleh nasabah, sebab semua dana dijamin penuh oleh pemerintah. Ke depan ketentuan ini berubah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, CenturyBank melakukan beberapa langkah persiapan. Seperti, menampilkan kinerja, baik dari sisi aset, jumlah kredit macet atau *non performing loan* (NPL), profit, rasio kecukupan modal atau CAR, semua dipaparkan secara terbuka ke setiap nasabah.

“Itu, pilihan yang utama. Kalau kinerja bank bagus otomatis nasabah akan memilihnya,” kata Sriyono mantap.

Selain kinerja, kata Sriyono, CenturyBank juga akan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Sebab, kadang-kadang bank yang kinerjanya bagus kalau servisnya kurang, biasanya bisa dijauhi nasabah. Misalnya, karena pelayanan yang lambat, atau penanganan nasabah yang tidak ramah. “Itu, menjadi fokus perhatian kita juga.”

Tingkat suku bunga juga merupakan hal strategis yang harus secara bijaksana ditawarkan kepada nasabah. Penetapan-nya harus kompetitif, namun tidak berlebihan. “Kita yang wajar-wajar saja, tetapi kompetitif,” kata Sriyono. (Berita Indonesia/Hapson

Tampubolon/CRS/SH/WE)



Setahun setelah Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko bergabung, kinerja bank merger, Bank Century Tbk, menunjukkan hasil sangat bagus. Proses merger berjalan harmonis, tidak ada gejolak.

Laju perjalanan PT Bank CIC Internasional Tbk semakin mulus setelah bergabung dengan kedua bank tersebut, 15 Desember 2004. Tidak terjadi gejolak, baik dari segi top manajemen, teknologi informasi, sistem operasional maupun penempatan karyawan. Konsolidasi manajemen pasca merger juga berjalan cukup mulus. Konsolidasi TI dari semula tiga sistem yang berbeda, digabung terintegrasi menjadi satu sistem. Integrasi ini walau sesuatu yang sangat kompleks, terbukti dapat berjalan cukup mulus.

Di bidang pendanaan, misalnya, CenturyBank berhasil melampaui target, dari diproyeksikan naik Rp 1,5 triliun, berhasil dicapai Rp 4 triliun. Aset Bank Century saat merger masih di atas Rp 7 triliun, di akhir 2005 sudah di atas Rp 13 triliun.

Selama tahun 2005 likuiditas CenturyBank selalu surplus. Bahkan, boleh dibilang, di pasar uang antarbank posisi CenturyBank selalu *leader*. "Karena, kami yang banyak memberikan ekstra likuiditas ini ke bank-bank lain dalam bentuk *money market*. Jadi, untuk pendanaan CenturyBank cukup kuat," kata Sriyono.

Di bidang perkreditan, CenturyBank juga mengalami pertumbuhan yang lumayan bagus, walau belum secemerlang bidang *funding*. Bidang perkreditan selama 2005, masih jauh lebih bagus dari 2004. "Memang, LDR (*loan to deposit ratio*, rasio pinjaman terhadap simpanan *-Red*) kita masih rendah, sekitar 25-30%. Tapi saat ini sudah meningkat cukup bagus, dan di akhir tahun ini diproyeksikan akan naik lagi," kata Sriyono.

Walau memiliki likuiditas dan sumber dana yang besar, karena kondisi per-

ekonomian yang belum stabil, CenturyBank lebih hati-hati untuk masuk ke sektor korporasi. "Kita masih perlu hati-hati, karena kondisi umum dan dunia usaha belum aman. Kita cenderung ke ritel," jelas Sriyono.

Kehatian-hatian memasuki sektor korporasi, membuat posisi CenturyBank lebih banyak mengarahkan kucuran kredit ke sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Kemudian kredit kepemilikan mobil (KPM), KPR, kredit konsumsi dan perdagangan, yang nilainya berkisar Rp 1-2 miliar. "*Spread* kita masih bagus, rata-rata 4-5%," tambah Sriyono.

Memasuki tahun 2006 CenturyBank berencana memperkuat kucuran kredit, masih ke sektor UMKM, KPM, KPR, kredit konsumsi dan perdagangan, hingga 40%. Mulai tahun ini, CenturyBank akan berpartisipasi dalam Program Satu Juta Rumah Jamsostek, dengan menyediakan Kredit Kepemilikan Rumah Rumah Sehat Sederhana (KPR-RSH) untuk mendukung program pemerintah. Kucuran kredit ke pangsa pasar UMKM ini, secara persentase tergolong tinggi, namun angka absolut

KINERJA CenturyBank



Sriyono, Pejabat Eksekutif CenturyBank

sebenarnya hanya Rp 1,5 triliun.

CenturyBank bukannya tak berencana mengucurkan kredit ke sektor korporasi. Bank ini melakukan ekspansi ke sektor ini secara unik, akan mengutamakan debitur yang sudah ada di dalam. Karena mereka, hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan plafon kreditnya secara maksimal.

Selama tahun 2006, CenturyBank akan mengupayakan plafon tersebut dimanfaatkan secara penuh, namun tetap mengutamakan kehati-hatian. Sebab, mereka yang sudah ada di dalam, sudah diketahui sebagai debitur yang bagus. Kata Sriyono, kalau plafon dipenuhi, serapan dananya cukup besar, berkisar Rp 500 miliar.

Kondisi sebaliknya terjadi pada bidang pendanaan, yang selama 2006 akan dipertahankan pertumbuhannya hanya 5%.

"Kenapa, karena dari surplus dana tahun 2005 kemarin, masih sangat cukup untuk membiayai ekspansi kredit di 2006 ini," kata Sriyono menjelaskan.

Diferensiasi antara pendanaan dan perkreditan bukan tak mengandung risiko terjadi *negative spread*. Akan tetapi, CenturyBank secara cerdas dan aman akan menyikapinya dengan lebih banyak ber-



CEMERLANG

Sriyono (kiri) dan Deddy Triyana, Corporate Secretary CenturyBank (kanan).

main di *secondary market* yang *fee base*, dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat-surat berharga lainnya. Seperti, obligasi rekap, Surat Utang Negara (SUN), *bank note*, deposito valuta asing khususnya untuk dolar AS dan dolar Singapura, riyal Arab Saudi untuk naik haji, tabungan berhadiah, ditambah transfer cepat. CenturyBank unggul di transfer cepat ini, transfer ke L/H dengan biaya hanya Rp 35 ribu sampai di hari yang sama.

Penempatan dana di *secondary market* hanya bersifat sementara sebelum dialirkan sebagai kredit.

"Bagaimanapun kita tetap akan melakukan penempatan di kredit tapi bertahap. Tahun 2006, kita merencanakan menambah kredit sekitar Rp 1,5 triliun," kata Sriyono. Pertumbuhan kredit akan tetap berlangsung hingga 2007, walau berjalan pelan-pelan, lalu di sisi pendanaan mulai sedikit direm.

Dalam pengertian, komposisi dana mahal

yang masih tinggi secara perlahan akan digeser menjadi dana murah. CenturyBank nantinya akan fokus ke giro dan tabungan, sementara penerimaan deposito akan selektif. Kalau perlu, mengarahkan deposito dalam bentuk valuta asing yang bunganya relatif rendah.

Pasca Merger

Pertumbuhan aset CenturyBank yang meroket hingga 100%, dari Rp 7,1 triliun pada 14 Desember 2004, menjadi Rp 14 triliun lebih Januari 2006, berisiko terjadi penurunan CAR (rasio kecukupan modal terhadap aset). Sebagai gambaran, di akhir 2004 CenturyBank masih memiliki CAR 15,6%, modal dasar Rp 4,2 triliun, modal disetor Rp 1,557 triliun, dan *non performing loan* (NPL) hanya 2,8%. Dengan pertumbuhan pendanaan yang tinggi, otomatis mengakibatkan peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sehingga membuka kemungkinan penurunan CAR.

Karena itu, kata Sriyono, memasuki tahun 2006, pemegang saham pengendali berencana menambah modal disetor sebanyak Rp 500 miliar. Penambahan pertama Maret 2006 sebesar Rp 250 miliar, dan September Rp 250 miliar. Pemegang saham pengendali CenturyBank saat ini adalah First Gulf Asia Holding Limited, dengan kepemilikan saham sekitar 13,03%.

Sriyono mengatakan, proses merger tiga bank justru menambah kepercayaan para nasabah terhadap CenturyBank menjadi semakin tinggi. Terbukti dengan pencapaian pertumbuhan total aset. Inti kepercayaan nasabah tersebut menjadikan kinerja CenturyBank sangat bagus. Dalam hal profit pun, setelah sebelumnya selalu merugi, selama tahun 2005 CenturyBank sudah mulai membukukan laba.

"Jadi, ini merupakan *credit point* bagi para nasabah. Apapun komentar orang, kenyataannya kepercayaan nasabah semakin tinggi," kata Sriyono. ■ HT, CRS, WE, SH

CenturyBank RINTIS KEMITRAAN DENGAN AL-ZAYTUN

Salah satu nasabah istimewa PT Bank CIC Internasional Tbk, yang setelah merger dengan Bank Danpac dan Bank Pikko dikenal sekarang sebagai PT Bank Century Tbk atau CenturyBank, yakni pimpinan Al-Zaytun (AZ), Syaykh AS Panji Gumilang, dimulai dari kebiasaan Syaykh menukar mata uang asing. Saat ini, pondok pesantren terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut menjadi nasabah setia CenturyBank.

Suatu hari tahun 1992, Syaykh AS Panji Gumilang mengalami sedikit masalah ketika menukar mata uang asing di *counter* PT Bank CIC Internasional Tbk, di Kantor Pusat Jalan Fatmawati, Jakarta Se-

latan. Karena itu Syaykh meminta untuk bertemu pihak manajemen CIC. Saat itu, Syaykh diterima oleh Sriyono, Pejabat Eksekutif PT Bank Century Tbk atau CenturyBank, yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi Bank CIC. Sriyono meminta Syaykh menjadi

nasabah CIC, sehingga persoalan-persoalan yang muncul bisa diselesaikan secara kekerabatan.

Sebagai bankir yang profesional, Sriyono memahami betul bagaimana karakter Syaykh yang rekam jejaknya dapat terlihat jelas, yakni sering datang ke Bank CIC melakukan transaksi penukaran mata uang. Sriyono menawarkan, bagaimana kalau Syaykh menjadi nasabah Bank CIC, minimal membuka tabungan dulu. Syaykh setuju membuka tabungan, bahkan sekaligus membuka rekening.

Kesediaan Syaykh memberi kemudahan bagi kedua belah pihak. Apapun transaksi yang dilakukan menjadi pasti dapat ter-

Foto: Mr. Hesham Al Warraq, Chief Executive Officer (CEO) First Gulf Asia Holding Limited, pemegang saham pengendali PT Bank Century, Tbk (CenturyBank), bersama pimpinan Al-Zaytun, Syaykh AS Panji Gumilang, dan Pejabat Eksekutif CenturyBank, Sriyono, saat mengadakan kunjungan ke Al-Zaytun, Selasa 7 Maret 2006. (Foto ini tolong dimintakan ke Pak Imam/Pak Halim, Al-Zaytun).



SYAYKH DR ABDUSSALAM PANJI GUMILANG

atasi. Misalnya terkait dengan uang yang meragukan. Atau jika ada soal-soal lain, itu semua tak akan menjadi satu penghalang sepanjang Syaykh masih memiliki dana simpanan di bank.

Setelah berkali-kali berkunjung, dan bertemu, pertemanan Sriyono dan Syaykh menjadi sangat akrab. Keduanya sering terlibat pembicaraan serius yang sifatnya lebih jauh. Syaykh menjadi sangat terbuka terhadap Sriyono. Seperti, berbicara mengenai adanya rencana Syaykh mendirikan sebuah yayasan pendidikan.

“Syaykh pernah bilang dia punya beberapa rupiah uang. Ada cita-cita uang ini mau bikin yayasan pendidikan yang besar. Nah, kira-kira apa saran terbaik dari bank untuk mewujudkan cita-cita ini dengan rupiah yang ada sedikit ini, dia bilang begitu,” kenang Sriyono.

Sriyono kemudian memberikan saran yang terbaik sebagaimana diminta. Yakni, walaupun yang akan didirikan itu adalah yayasan, karena sifatnya pendidikan,

apalagi dikombinasikan dengan bisnis, maka Syaykh harus bersikap seperti pengusaha. Karena di situ akan ada biaya, dan ada pula manfaat serta beberapa permasalahan yang sifatnya bisnis. Sriyono mengarahkan lagi, kalau bicara bisnis, sebaiknya jangan menggunakan uang tunai atau uang sendiri. Karena, kalau menggunakan uang sendiri, biasanya kesadaran untuk biaya usaha akan kurang. Sebab menganggap, ini bisa beli ini dan itu.

“Lalu saya sarankan, duitnya ditaruh saja di bank, tapi Bapak ambil kredit dari bank, namanya *back to back loan*. Kalau pegang uang boleh pinjam, itu biasanya akan lebih hati-hati, karena kalau salah menggunakan nanti mengembalikannya akan dengan bunga yang tinggi.” Saran ini berbuah manis, terpatri menjadi sebuah falsafah yang mewarnai setiap pergerakan Al-Zaytun.

Syaykh setuju saja dan tak lagi ragu. Pada saat itu juga, tahun 1992, dia me-

naruh sejumlah uang dalam bentuk deposito. Ia juga melakukan pinjaman sesuai yang disarankan, *back to back loan*. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Misal, untuk membebaskan tanah, biaya pengurusan ijin-ijin, peletakan batu pertama, dan lain-lain hingga akhirnya berdirilah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) tahun 1993. Semua proses berjalan terus seolah tiada henti dan tanpa penghalang berarti. Di tahapan ini Bank CIC (sekarang CenturyBank) selalu dilibatkan.

Sejak itu Sriyono menjadi konsultan manajemen keuangan cuma-cuma bagi YPI. Hubungan tersebut sampai sekarang berbuah bisnis, persaudaraan dan pertemanan yang berlanjut. Boleh dibilang kedua pihak menjalin kerjasama abadi yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

“Dari pihak bank merasa mendapat peluang bisnis yang cukup mapan, dan cukup materil,” kata Sriyono, yang mendulang 1.500 hingga 2.000 orang nasabah dari Al-Zaytun. Dari sisi Al-Zaytun sendiri ada kemudahan dalam pengelolaan keuangan, memperoleh semacam nasehat-nasehat bisnis secara tidak langsung, atau konsultasi penggunaan dana untuk melaksanakan misi-misi yayasan.

Yang pasti CenturyBank turut memperoleh kontribusi besar, seperti aliran dana-dana dari siswa, supplier, guru dan karyawan Al-Zaytun. Sebaliknya, CenturyBank aktif membiayai kegiatan bisnis supplier yang butuh kredit, atau karyawan yang membuka usaha kecil dan butuh modal kerja.

Semuanya menjadi turut berkembang maju. Apabila CenturyBank mau ekspansi membuka cabang baru selalu melibatkan Al-Zaytun. Sebab di mana cabang baru dibuka di sana pasti terdapat umat yang dapat memberikan dukungan sebagai nasabah. Sebagai contoh, CenturyBank hendak membuka cabang baru di Pekanbaru, Riau atas rekomendasi Al-Zaytun sebab di sana ada banyak santri dan orangtua santri.

Setiap Al-Zaytun menggelar acara besar, CenturyBank tak pernah absen memberikan bantuan moril, dukungan, sumbang saran atau apa saja yang dibutuhkan dari sisi perbankan. Rencana Al-Zaytun membuka pondok pesantren baru yang lebih modern di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau pun sudah melibatkan CenturyBank sejak perencanaan awal, hingga penandatanganan nota kerjasama (MoU) dengan Pemda setempat. Demikian pula dengan pekerjaan proyek. ■ HT, CRS, WE, SH

◆ MAYJEN TNI (PURN) DRS. SULAIMAN AB, SH, MSC

JENDERAL YANG GIGIH TEGAKKAN HUKUM

Jabatan terakhirnya sebagai Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI. Kendati hanya 2 tahun sebagai pemimpin Puspom ia telah banyak mewarnai institusi ini. Sulaiman AB dianggap berhasil mengangkat citra Polisi Militer. Karena POM tidak saja berhasil menuntaskan sejumlah kasus yang menjadi sorotan masyarakat dan dunia Internasional, tapi juga berhasil membuktikan tegaknya hukum di lingkungan TNI.

Sebagai Danpuspom, tugas dan tanggungjawab Sulaiman kala itu sangat berat. Apalagi saat dilantik, iklim politik dan keamanan belum stabil. Di pusat pemerintahan sedang terjadi masa transisi dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati. Peralihan kekuasaan ini tentu saja sangat mempengaruhi stabilitas lapisan di bawahnya.

Sementara, tuntutan masyarakat agar pemerintah segera melakukan pengusutan sejumlah kasus pelanggaran HAM terus terjadi. Tuntutan masyarakat itu terutama berkaitan dengan dugaan keterlibatan aparat militer yang dianggap belum tersentuh hukum.

Maka begitu dilantik, putra Tamiang, ini lalu mempelajari tugas seorang komandan. Menurutnya, agar pelaksanaan fungsi POM berjalan dengan baik maka perlu penegakan disiplin di lingkungan institusi. Seorang komandan, menurutnya adalah cermin dari institusi. "Jika komandannya tidak disiplin, tidak mempunyai program kerja yang jelas, maka masyarakat akan menilai institusi itu memang tak bisa diandalkan," kata Jenderal yang hobi main biola ini. Tugas POM adalah menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan TNI.

Maka, ia tak hanya mengadakan pertemuan dengan perwira dan jajarannya di lingkungan Markas POM, tapi juga mengunjungi prajurit-prajurit POM di seluruh tanah air. Pada setiap pertemuan dengan prajuritnya, perwira yang memulai karier di POM sejak 1975, ini selalu menekankan visi dan misi polisi militer. Seorang polisi militer harus disiplin, solid, profesional, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Sehingga mampu menjadi TNI yang disiplin, taat dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia.



Dua Tugas Berat

Di awal masa kepemimpinannya, Sulaiman langsung mendapat dua tugas 'berat'. *Pertama*, POM dilibatkan dalam Komisi Penyelidikan Nasional (KPN) untuk mengungkap tabir pembunuhan Theys Hiyo Eleuay, yang tewas pada 11 November 2001. Ketua Presidium Dewan Papua ini tewas setelah mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Satgas (Satuan Tugas) Tribuana X Kopassus (Komando Pasukan Khusus) di Hamadi, Jayapura. *Kedua*, kasus penembakan dua warga Amerika Serikat di Timika. Kedua kasus ini dianggapnya sebagai tugas yang tidak ringan, sebab selain diduga melibatkan aparat TNI, juga mengandung nilai politis.

Pembunuhan tokoh pejuang rakyat Papua ini tidak hanya menyulut emosi pendukungnya, tapi juga dunia internasional. Posisi pemerintah khususnya dalam pelanggaran HAM semakin mendapat sorotan tajam. Sehingga semua pihak mendesak untuk mengusut tuntas pembunuhan itu. Apalagi, isu-isu keterlibatan aparat TNI semakin kuat dan tersebar di mana-mana. Sehingga Presiden Megawati kala itu merasa perlu mengeluarkan Keppres No. 10 tahun 2002 tentang Komisi Penyelidikan Nasional yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Koesparmono Irsan dari Komnas HAM.

Untuk mengungkap kasus ini, KPN dibantu POM memeriksa anggotanya. Sebagai Danpuspom, Sulaiman bertekad mengungkap kasus ini secara tuntas. Tidak sampai dua bulan, tabir pembunuhan Theys terungkap. Di situ Sulaiman mengakui adanya keterlibatan anggota TNI. Dengan kasus ini ia berharap, setidaknya masyarakat akan mengerti, bahwa TNI tak pernah mentolelir anggotanya, siapa pun dan apa pun pangkatnya, jika yang bersangkutan melanggar hukum, tetap akan dihukum.

Demikian juga dengan kasus penembakan bis rombongan karyawan PT. Freeport di Timika, yang menewaskan 3 orang, termasuk warga Amerika. Kasus ini sempat menjadi sorotan dunia Internasional. Bahkan akibat insiden itu, Kongres AS memutuskan untuk menunda dana bantuan pendidikan dan pelatihan militer (IMET – International Military Education and Training) untuk Indonesia.

Untuk mengusut peristiwa ini, Panglima TNI Jenderal Endriarto Sutarto kembali memberikan tugas kepada Mayjen Sulaiman. Bersama Polri, ia membentuk tim terpadu. Namun kemudian Tim ini tidak menemukan bukti-bukti keterlibatan TNI.

Upaya Menghindari Pelanggaran HAM Di Aceh

Sulaiman sangat memerhatikan keberadaan pasukan TNI di daerah konflik, seperti di Aceh. Sudah lama Aceh 'bergejolak', bahkan sejak 1989 hingga 1998, Presiden Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Tentu saja kurun waktu 10 tahun itu menjadi lembaran paling hitam bagi rakyat Aceh. Sebagai putra Aceh, Sulaiman tahu betul permasalahannya.

Sebagai prajurit TNI, Sulaiman sadar, di daerah konflik banyak hal tak diinginkan yang bisa dilakukan aparat TNI, baik disengaja maupun tidak. Ia tidak ingin pelanggaran HAM terjadi di daerah kelahirannya itu. Maka, Sulaiman kemudian mengusulkan kepada Panglima TNI, membuat program pengiriman satuan tugas (Satgas) POM ke daerah konflik, khususnya Aceh. Dengan didukung Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003, Puspom kemudian mengirim satuan tugas POM ke Aceh.

Mereka bertugas memelihara disiplin dan penegakan hukum bagi prajurit TNI yang bertugas di Aceh dan membina para GAM

yang telah menyerah. Selain melakukan penyuluhan hukum, Satgas POM di Aceh juga melakukan penindakan langsung terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum.

Berbagai kalangan mengakui, kehadiran pasukan POM di Aceh terbukti membawa hasil positif. Sejak pengiriman POM ke Aceh, angka pelanggaran yang dilakukan pasukan TNI menurun drastis. Di mata anak pasangan H. Ahmad Basyir dan Hj. Asmah Boru Lubis ini, konflik Aceh memang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi, juga harus dilakukan pendekatan secara damai. Maka, dengan bukti itu banyak kalangan memuji langkah Sulaiman. Bahkan, pengiriman Satgas POM ke Aceh itu dianggap sebagai ide dan prestasi gemilang Sulaiman memimpin kesatuannya. Ia dinilai sebagai Danpuspom yang berhasil membawa visi dan misi polisi militer sebagai penegak hukum. Sulaiman berhenti menjabat Danpuspom pada 5 Agustus 2004.

Prestasi gemilang yang diraih itu tampaknya tak menyurutkan langkahnya. Kendati masa tugas sebagai Polisi Militer telah berakhir, semangat untuk membangun negeri ini tak pernah luntur. Masa-masa pensiun, masih digunakannya untuk 'mengabdikan'. Sebagai putra Aceh yang mendambakan Aceh damai, beberapa kali ia turut serta dalam perundingan perdamaian, antara pemerintah RI dengan GAM. Sehingga ia tahu betul, betapa tidak mulusnya membuat kesepakatan kala itu. Namun, ia kini bisa bernafas lega. Perjanjian damai telah tercapai, konflik di Aceh telah usai. Namun pembangunan di Aceh baru dimulai, apalagi pasca Tsunami. Kini, Sulaiman bergabung dengan Badan Rehabilitasi Konstruksi (BBR) untuk membangun bumi kelahirannya itu. ■ **TI/AD**

BIODATA

NAMA :

MAYJEN TNI (PURN) DRS. H SULAIMAN. AB, SH, MSC

LAHIR :

KUALA SIMPANG, 5 AGUSTUS 1949

AGAMA :

ISLAM

ISTRI :

HJ. DRA. IMAN HANDAYANANINGRUM

ANAK :

KARTIKA CHANDRA ARINI, KHAIRUL BASYAR

PENDIDIKAN :

- SD, SMP, SMA • AKABRI, 1974 • SUSSARCAB POM, 1975
- SUSLAPA POM (1984) • SESKOAD (1993)
- SUSSOSPOL ABRI (1994) • SUSSAR PARA (1998) • KRA XXXII LEMHANNAS PADA 1999/2000

KARIER :

- PERWIRA PERTAMA POLISI MILITER DAERAH MILITER VII DIPONEGORO, 1975 • KOMANDAN DETASEMEN POLISI MILITER V BRAWIJAYA • DANPOMDAM VI TANJUNG PURA DI BALIKPAPAN • SEKRETARIS POM (1998) • PERWIRA AHLI KSAD BIDANG HUKUM • KOMANDAN POLISI MILITER (DANPUSPOM), 2002-2004 • KOMISARIS BANKCENTURY

Oleh: Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang*

Syaykh Al-Zaytun

BAGIAN DUA
DARI DUA TULISAN



Dalam kaitan hidup berbangsa dan bernegara, kita semua harus terus berbuat dan berupaya sekuat tenaga untuk Indonesia, agar masa depan Indonesia menjadi Indonesia yang kuat. Kuat dalam arti mampu mengorganisir diri dalam tataran organisasi negara yang modern, berbasis dari kekuatan yang dimiliki rakyat, diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dan ditangani oleh rakyat, dalam segala aspek kehidupan pemerintahan, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Indonesia kuat adalah Indonesia yang rakyatnya terdidik secara baik, dinamis, dan visioner. Indonesia kuat adalah Indonesia yang mampu berdiplomasi antarbangsa, yang mampu menciptakan *zone of peace* bersama-sama dengan negara lain, sehingga Indonesia masuk dalam lingkaran zona aman, zona demokrasi yang sehat, dan terus mengupayakan kehidupan demokrasi yang hakiki, membuka kebebasan untuk bangsanya kini dan mendatang, sebab nasib bangsa dan negara Indonesia tergantung pada bagaimana kehidupan demokrasi yang sehat.

Lahirnya Al-Zaytun

Al-Zaytun berdiri dilatarbelakangi oleh perjalanan panjang sejarah bangsa dan sejarah umat manusia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang sangat lama, tiga setengah abad terhitung sejak masuknya bangsa Belanda ke Banten tahun 1596 sampai proklamasi kemerdekaan 1945. Dalam menjalankan pemerintahan sendiri selama lebih dari setengah abad, belum mencapai kemajuan yang berarti, khususnya di bidang pendidikan.

Juga berbagai peperangan yang terjadi sepanjang abad ke-20, dan terjadinya blok-blok besar di dunia yang saling ingin menguasai satu dengan lainnya, dan terjadilah perang dingin, yang kesudahannya dimenangkan oleh blok Barat. Berbagai peristiwa dan kejadian sejarah baik nasional maupun internasional tersebut mengilhami pemikiran untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang mampu menciptakan keseimbangan intelektual sehingga dengannya keseimbangan dan perdamaian dapat diwujudkan dalam lingkungan kehidupan umat manusia.

Secara fisik pembangunan sarana pendidikan Al-Zaytun dimulai sejak tahun 1996, tiga tahun kemudian barulah dimulai pembukaan pembelajaran, tepatnya pada 1 Juli 1999M/18 Rabi'



MENDIKNAS BAMBANG SUDIBYO DUDUK BER S

al-Awwal 1420 H, tepat seratus tahun setelah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang berdiri. Al-Zaytun diresmikan oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie pada 27 Agustus tahun 1999. Ide pendirian Ma'had ini selayaknya ide umat manusia yang menginginkan peradaban umat manusia (positif) ini tidak putus-putusnya. Ide seperti itu juga merupakan ide berbagai bangsa yang ada di dunia. Para pendiri Al-Zaytun menyimpulkan bahwa peradaban (positif) umat manusia tidak boleh terputus oleh apapun juga, dan peradaban akan berkesinambungan jika ditata melalui pendidikan, bukan melalui peperangan. Pendidikanlah yang akan mampu melestarikan peradaban umat manusia di dunia.

Banyak orang bertanya tentang pencetus ide pertamanya. Sesungguhnya kebersamaanlah yang mampu menumbuhkan ide-ide besar itu. Termasuk ide pendirian Al-Zaytun ini adalah akibat adanya kebersamaan yang memunculkan sebuah ide, kemudian berjalan bersama untuk merealisasikannya. Kebersamaan ide mampu menyatukan kemampuan individu-individu dalam mengaktualisasikan diri masing-masing secara optimal. Dalam arti kata, masing-masing mengenali potensi positif yang mereka miliki, dan berusaha sekuat tenaga menggali, membiasakan, berkreasi, dan mewujudkan potensi positif yang telah terbina dengan disiplin tinggi dan perjuangan dalam prestasi nyata. Akhirnya prestasi nyata berbentuk pendirian Al-Zaytun ini dapat dicapai, yang tentunya dapat menumbuhkan rasa puas dalam diri dan mungkin juga bagi orang lain.



N JALAN UTAMA INDONESIA KUAT

R SAMA SYAYKH DR ABDUSSALAM PANJI GUMILANG

Dan pewujudan prestasi pendirian Ma'had ini betul-betul diraih dengan upaya keras dan persiapan waktu yang sangat lama.

Pengalaman hidup yang dipersatukan dari banyak orang dapat memberi inspirasi pada pengembangan model-model pendidikan yang dicita-citakan. Gabungan cita-cita bersama itulah yang menentukan model Al-Zaytun. Semangat pesantren berupa sikap mandiri yang kuat, cinta ilmu, dan semangat belajar yang tinggi tetap menjadi spirit Al-Zaytun, dengan terus mengikuti perkembangan zaman, yakni bersistem modern, modern dalam arti kata luas. Modern dalam menyelenggarakan pendidikan harus bervisi dan berorientasi masa depan, berorganisasi kuat, berkecerdasan tinggi, melangkah berdasar ilmu, beretos kerja tinggi dan berdisiplin. Karenanya motto Ma'had ini adalah *Pesantren spirit but modern system*.

Kemandirian menjadi ciri utama Al-Zaytun, kemandirian diwujudkan dalam sikap tidak ketergantungan, dan itulah yang terus akan dikembangkan dalam pendidikan di sini. Akan terus ditanamkan kepada peserta didik sikap mandiri itu. Contoh konkret kehidupan mandiri itu adalah dalam pendanaan pendidikan, kita tidak bergantung kepada subsidi pemerintah. Untuk itu, semua kita berusaha dengan gigih untuk mendapatkannya dari berbagai cara yang terpuji dan baik. Sebab kemandirian bukan alasan untuk menghalalkan segala cara. Dengan selalu membiasakan jiwa mandiri, diharapkan para santri di kemudian hari akan dapat mengangkat harkat dirinya sendiri, dengan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan orang lain.

Semua yang terlibat dalam pendidikan di Al-Zaytun berharap dan berusaha agar *graduate* dari Al-Zaytun ini dapat menjadi manusia dewasa, sebab dalam kehidupan ini sering terjadi, seseorang menjadi cepat tua namun lambat dewasa akibat kurang terdidik. Dalam arti kata *graduate* Al-Zaytun dipersiapkan menjadi manusia cerdas, bajik dan bijak, menguasai

sains dan teknologi, cinta akan negaranya, dan mampu hidup dan bergaul antarbangsa.

Karenanya kita selalu menanamkan pendidikan antarbangsa. Pendidikan antarbangsa yang selalu menanamkan dan melatih para siswa agar membiasakan dan berorientasi pada cara berpikir antarbangsa, bahwa manusia dalam segala bentuk ras, budaya, bangsa dan agama, harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan bersaudara, sebagai penghuni satu bulatan dunia ini. Dengan demikian akan tumbuh solidaritas antarbangsa, yakni akan terbiasa dalam memecahkan problem kemanusiaan tidak mengedepankan kebencian dan buruk sangka rasis dan mengedepankan saling pengertian terhadap wujud *multicultural* yang semula jadi dan semula ada.

Selanjutnya, siswa selaku generasi muda, terus dibekali berbagai kemampuan yang dapat mendorong dan mengantar mereka kepada tatanan hidup antarbangsa. Sehingga ke depan *graduate* Al-Zaytun mampu berpikir dan berorientasi masa depan. Mampu masuk dalam percaturan pasar sumber daya manusia antarbangsa, baik dalam bidang pemerintahan, maupun dalam organisasi-organisasi antarbangsa, dan mampu menjalin hubungan antarbangsa bermodalkan kemampuan yang mereka miliki.

Dan dalam kaitan hidup berbangsa dan bernegara, kita semua peserta didik, pelaku didik dan pekerja didik, terus berbuat, berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk Indonesia, agar masa depan Indonesia menjadi Indonesia yang kuat. Kuat dalam arti mampu mengorganisir diri dalam tataran organisasi negara yang modern, berbasis dari kekuatan yang dimiliki rakyat, diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dan ditangani oleh rakyat, dalam segala aspek kehidupan pemerintahan, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Indonesia kuat adalah Indonesia yang rakyatnya terdidik secara baik, dinamis, dan visioner. Indonesia kuat adalah Indonesia yang mampu berdiplomasi antarbangsa, yang mampu menciptakan *zone of peace* bersama-sama dengan negara lain, sehingga Indonesia masuk dalam lingkaran zona aman, zona demokrasi yang sehat, dan terus mengupayakan kehidupan demokrasi yang hakiki, membuka kebebasan untuk bangsanya kini dan mendatang, sebab nasib bangsa dan negara Indonesia tergantung pada bagaimana kehidupan demokrasi yang sehat.

Perubahan Paradigma

Al-Zaytun berdiri di saat terjadinya pergeseran paradigma. Dunia dengan berbagai macam penghuninya terus bergerak meninggalkan abad industri. Yaitu suatu kurun waktu yang mampu mengubah cara hidup banyak manusia, terutama yang hidup di kota, pinggiran kota dan daerah-daerah yang terikat dengan pusat industri.

Mereka bekerja dengan cepat menggunakan organisasi dan peralatan yang bukan manual. Banyak macam barang dan jasa yang tersedia, kesehatan meningkat, mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan mempunyai waktu luang yang banyak. Abad industri itu menciptakan kesejahteraan yang tidak merata, sehingga kesenjangan sosial dunia menjadi parah. Abad industri yang bercirikan produksi dan distribusi barang telah bergeser kepada abad informasi, dengan ciri produksi dan distribusi pengetahuan dan informasi.

Dalam abad informasi seperti yang kita rasakan dalam kehidupan nyata, sungguh sulit memperoleh keuntungan hanya bersumber dari sumber daya tradisional (tenaga kerja, tanah, dan modal-uang). Kini, informasi dan pengetahuan menjadi penghasil kekayaan utama. Namun pengetahuan tidak murah harganya. Semua negara maju mengeluarkan kira-kira 20% dari



SPIRIT AL-ZAYTUN: Sikap mandiri yang kuat, cinta ilmu, dan semangat belajar yang tetap tinggi.

Penghasilan Negara Bruto (PNB)-nya untuk produksi dan distribusi pengetahuan. Pembentukan pengetahuan dengan demikian sudah merupakan investasi terbesar di setiap negara maju.

Karenanya hasil yang didapat oleh sebuah negara atau sebuah institusi dari pengetahuan tentunya semakin menjadi faktor penentu pada daya saingnya. Makin hari, produktivitas pengetahuan akan semakin menentukan sosial ekonominya.

Kelemahan produktivitas pengetahuan suatu negara (institusi) lebih dari apapun yang lain, merupakan pangkal dari kelambanan, erosi, dan krisis yang tak berkesudahan pada sosial ekonomi negara. Kita di Indonesia jelas pengeluaran untuk produktivitas pengetahuan jauh lebih rendah dari pengeluaran lain-lainnya.

Karenanya, dalam segala bidang produktivitas pengetahuan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara manapun. Bangsa kita juga belum mampu masuk ke dalam produktivitas pengetahuan baru, bahkan gagal sekalipun hanya untuk mengubah pengetahuan yang telah ada menjadi inovasi yang berhasil, pengetahuan yang ada tetap merupakan informasi dan bukannya menjadi pengetahuan yang produktif.

Pendidikan yang Bertanggung Jawab

Terjadinya revolusi informasi teknologi kini komputer meja dan pengiriman data melalui satelit langsung ke ruang kelas sedang melanda

sekolah-sekolah (sekali pun hal ini belum menjadi umum di Indonesia). Kita berada di dalam revolusi tersebut, tentunya akan mengubah cara kita belajar dan cara kita mengajar, dalam dasawarsa mendatang. Dan revolusi ini akan mengubah ekonomi pendidikan, dari yang hari ini kita lakukan, yang keadaannya hampir total padat karya, pendidikan (sekolah) akan menjadi padat modal.



Lembaga pendidikan hanya menekankan disiplin

Lembaga pendidikan selama ini selalu memberikan perhatian penuh kepada anak-anak muda yang belum dianggap sebagai warga negara penuh, karena belum mempunyai tanggung jawab dan belum memasuki angkatan kerja.

Namun dalam masyarakat berpendidikan, lembaga pendidikan merupakan lembaga orang



SYAYKH DR ABDUSSALAM PANJI GUMILANG

dewasa juga, terutama dewasa berpendidikan tinggi. Dan dalam masyarakat berpengetahuan, lembaga pendidikan menjadi bertanggung jawab atas kinerja dan hasil-hasilnya.

Karenanya, lembaga pendidikan di dalam revolusi teknologi informasi ini, harus mampu masuk ke dalam penguasaan teknologi baru dalam pembelajaran (belajar mengajar). Sebab hal itu merupakan satu prasyarat bagi keberhasilan nasional dan kultural, juga bagi daya saing ekonomi.

Dalam khazanah sejarah Islam, sebelum tahun 1550, khilafah Utsmaniyah Turki telah mengejawantahkan Islam secara politis, dan menjadi negara adidaya dunia di setiap gelanggang: politik, militer ekonomi, ilmu dan budaya, sampai dengan tahun 1550 berada di puncak kekuasaan dunia. Dari tahun 1550 dan seterusnya, mengalami kemandekan dan menjadi *introvert (ananiyah)*, menjadi senantiasa defensif. Dalam masa seperti itu lembaga pendidikan menjadi semakin dilihat sebagai penghambat kemajuan dan perlawanan terhadap lembaga pendidikan merupakan pangkal surut bagi segala pembaharuan kebudayaan besar Islam.

Sedangkan di dunia barat, lembaga pendidikan atau sekolah jadi dipandang sebagai lembaga “progresif” dan sebagai motor kemajuan di segala bidang-bidang kebudayaan, seni, sastra dan ilmu, ekonomi, politik, dan militer.



Lembaga pendidikan dalam revolusi teknologi informasi.

Selanjutnya dalam era revolusi teknologi dalam pendidikan, ada satu pelajaran yang dapat kita petik bahwa, teknologi itu sendiri menjadi tidak lebih penting ketimbang perubahan-perubahan yang dipicunya dalam substansi, muatan, titik berat pelajaran dan lembaga pendidikan itu sendiri. Perubahan dalam substansi, muatan, dan titik berat pendidikan itulah yang sesungguhnya menjadi masalah dalam teknologi pembelajaran (belajar mengajar).

Bagaimana Meresponnya?

Lembaga pendidikan kita harus menekankan disiplin, ditanamkan dalam berbagai macam kegiatan apapun, melalui pelatihan dan pembinaan yang tiada henti-hentinya. Dan kita tidak boleh menampik secara apriori berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh siapapun.

Kita harus meletakkan diri bukan sebagai “kaum terpelajar” yang elit, yang terpisah dan berbeda dengan orang-orang biasa. Dan dalam muatan serta substansi, lembaga pendidikan kita harus menarik banyak segala sesuatu yang dapat dipelajari dari negara-negara maju dan pendidikannya. Kita tidak seharusnya apriori kepada budaya barat maupun timur, mestinya kita dapat dan mampu menyerap kebajikannya yang seterusnya kita Indonesiakannya.

Mestinya kita tidak usah takut menjadi modern, menjadi “terwesternisasi” dalam ekonomi, teknologi, institusi-institusi politik dan kemiliterannya asalkan kita tetap menjadi muslim yang taat dan Indonesia yang utuh.

Teknologi, biarpun penting dan tersedia, bukanlah segi paling penting dari transformasi pendidikan. Yang akan menjadi sangat penting ialah pemikiran kembali tentang peran dan fungsi pendidikan sekolah. Sekalipun teknologi tetap penting artinya, sebab teknologi akan memaksa kita untuk melakukan hal-hal baru dan bukan sebaliknya. Dengan demikian tantangan sebenarnya yang harus dihadapi bukanlah teknologi itu sendiri, namun untuk apa penggunaannya.

Selanjutnya kita harus mampu menetapkan atau memiliki sistem pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpengetahuan.

Dalam hal ini mungkin kita dapat menetapkan sekalipun dalam garis-garis besar saja tentang spesifikasi pendidikan sekolah dan sekolah-sekolah yang mungkin sesuai dengan kenyataan-kenyataan masyarakat berpengetahuan.

1. Lembaga pendidikan yang diperlukan harus menyediakan alat-alat yang menunjang kemelekhurufan universal lebih dari “kemelekhurufan” dalam pengertian yang telah ada.
2. Lembaga pendidikan yang diperlukan harus mengilhami para siswa dari segala tingkat dan segala umur dengan motivasi untuk belajar dan dengan disiplin untuk belajar secara berkelanjutan.
3. Lembaga pendidikan yang diperlukan haruslah merupakan satu sistem terbuka, bisa dicapai oleh orang berpendidikan tinggi maupun orang yang oleh sebab apapun tidak mendapatkan akses ke pendidikan lanjutan pada masa mudanya.
4. Lembaga pendidikan yang diperlukan harus menanamkan pengetahuan, baik sebagai substansi maupun sebagai proses.
5. Lembaga pendidikan sekolah tidak lagi bisa dimonopoli oleh sekolah, melainkan menyebar ke dalam seluruh masyarakat.

Segala jenis organisasi yang mempekerjakan orang-orang - perusahaan, badan pemerintahan, organisasi nirlaba - harus menjadi lembaga pembelajaran (belajar mengajar). Lembaga pendidikan semakin harus bekerja dalam kemitraan dengan para majikan dan organisasi-organisasi yang mempekerjakan orang. Semua ini akan kita coba memulainya di Al-Zaytun, Insha Allah. ■

RUDOLF GUBSU DEFINITIF

Inilah kali pertama pelantikan gubernur berlangsung ramai hingga menyedot perhatian pers dan masyarakat luas.

Rudolf M. Pardede, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) 2003-2008 baru yang definitif, ini adalah putra tertua “Pak Katua” TD Pardede, seorang pengusaha tekstil pendiri TD Pardede Holding Company.

Rudolf kelahiran Balige 4 April 1942, sebelumnya menjabat Wakil Gubsu, naik menjadi Gubernur menggantikan Almarhum Mayjen TNI (Purn) H. Tengku Rizal Nurdin, yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat terbang Mandala Airlines di Medan, 5 September 2005.

SK pengangkatan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini tertuang dalam Keppres No. 27/M Tahun 2006, tertanggal 8 Februari 2006. Dia dilantik oleh Mendagri Moch. Ma’ruf atas nama Presiden. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Praja, Depdagri Jakarta, dalam sebuah Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Wahab Dali Munte, Jumat (10/3).

Pelantikan Rudolf ramai terkait statusnya yang masih sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu, sampai-sampai *Indo Pos* (11/3) menyebut pelantikan ini cukup mengejutkan.

Untuk menjawab penasaran insan pers, usai dilantik Rudolf segera menggelar jumpa pers. Wartawan kemudian mencecar pemimpin 12 juta rakyat Sumut ini dengan sejumlah pertanyaan tajam. Namun Rudolf dengan taktis berhasil memberikan keterangan. Isinya singkat namun padat, jelas, sekaligus menjawab keraguan.

“Saya merasa tidak bersalah dan saya merasa tidak pernah membuat ijazah palsu. Saya tidak pernah dipanggil mengenai hal ini. Tanya saja pada Polda Sumut,” kata Rudolf, sebagaimana ditulis *Indo Pos*.

Indri Pardede, adik bungsu perempuan dari sembilan mereka bersaudara, kepada majalah *Berita Indonesia* menyebut ayahnya, TD Pardede, memang

benar dahulu mengirim Rudolf bersama kakak perempuan Emmy untuk sekolah SMA ke Sukabumi.

“Mungkin saja ijazah SMA Rudolf hilang, atau dia lupa membuat duplikatnya. Tapi yang pasti dia memang dikirim sekolah ke Sukabumi,” ujar Indri.

Tujuh Arahan Mendagri

Harian *Kompas* menulis terdapat 10 kursi anggota DPRD Sumut yang kosong saat pelantikan. Mereka berasal dari tiga fraksi, yang memang sepakat untuk memboikot pelantikan yakni F-PKS, F-PAN dan F-PBR.

Sedangkan *Suara Pembaruan* menghitung, pelantikan Rudolf dihadiri 51 dari 85 anggota DPRD Sumut. *Media Indonesia* menulis sejumlah janji Rudolf sebagai Gubsu definitif.

Mendagri memberikan tujuh arahan kepada Rudolf. *Pertama*, pengelolaan keuangan daerah supaya transparan dan akuntabel. *Kedua*, supaya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, penguangan kesempatan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi pertanian, serta penegakan hukum.

Ketiga, supaya melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain. *Keempat*, supaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Kelima*, supaya menerapkan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. *Keenam*, supaya memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ketujuh, supaya menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah, yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dali Munte berharap agar Rudolf mengedepankan kearifan dalam memimpin masyarakat Sumut yang majemuk dari segi suku, ras, golongan dan keyakinan.

“Demikian juga kepada Ibu Vera Natari *boru* Tambunan, semoga dapat memberikan pikiran-pikiran yang positif, menjauhkan pikiran-pikiran dari iblis dan setan dalam mendampingi Saudara Doktorandus Rudolf Pardede tentunya,” ucap Dali Munte.

Sejumlah tokoh masyarakat Sumut yang hadir, seperti mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung, anggota DPD Nurdin Tampubolon dan Parlindungan Purba, anggota DPR Panda Nababan, Trimedya Panjaitan dan Effendi MS Simbolon, tokoh pers nasional asal Sumut GM Panggabean, pendiri dan pemilik koran *Sinar Indonesia Baru* (SIB), serta pengurus Kadinda Sumut, Gunawan turut memberikan apresiasinya atas pelantikan Rudolf.

Kata Akbar Tandjung tentang Rudolf, “Kita persilakanlah dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang ada masalah, kita serahkan kepada mekanisme hukum sebab negara kita negara hukum.”

“Kita merasa senang, sebagai anggota masyarakat Sumut, sekarang sudah mempunyai Gubernur yang sudah pasti dan definitif,” kata Nurdin Tampubolon, anggota DPD asal Sumut. “Jadi, saya sarankan dan himbau agar masyarakat Sumut mendukung sepenuhnya program Gubernur ke depan demi kepentingan masyarakat Sumut, bangsa dan negara,” ujarnya.

Gunawan begitu gembira atas peristiwa ini. “Sudah terpilih Gubernur yang definitif. Ini adalah suatu kebesaran, dan kehormatan bagi setiap warga masyarakat Sumut. Inilah yang kita tunggu-tunggu harinya,” ucapnya. ■ HT/CRS/WE



GUBSU RUDOLF M. PARDEDE

DEMO DAN REBANA SAMBUT CONDY

Kendati berbagai reaksi muncul menyambut kedatangannya di Indonesia, kunjungan dua hari Menlu AS ini banyak memberi arti bagi peningkatan hubungan kedua negara.

Sementara sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jl. Medan Merdeka Selatan, Menlu AS, Condoleezza Rice, Selasa (14/3) lalu mendapat sambutan hangat berupa seni musik rebana yang dibawakan para santri ketika tiba di Madrasah Al Ma'muriyah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Condy –sapaan akrab Menlu AS ini– yang mengenakan stelan blazer warna krem dan memakai selendang, tiba bersama Dubes AS untuk Indonesia Lynn B Pascoe dan Direktur USAID William Fred. Rombongan tamu dari AS ini disambut hangat oleh pimpinan Madrasah, Sidi Muralin Singedekane yang juga pimpinan Perguruan Pendidikan Islam Yayasan Masjid Al Ma'mur itu.

Kendati kunjungannya di madrasah itu hanya sekitar 30 menit, Rice mengaku sangat terkesan bertemu dengan para santri. “Saya sangat senang bisa mengunjungi Indonesian Islamic School dan melihat anak laki-laki dan perempuan mengerjakan tugas matematika dan melakukan percobaan ilmu pengetahuan,” papar wanita kelahiran Titusville, Birmingham, Alabama, AS 14 November 1954 itu seperti ditulis *Investor Daily*, 15/3.

Di tempat ini, Rice yang menjabat sebagai Menlu sejak 29 Januari 2005, menggantikan Colin Powell, juga menyampaikan komitmen pemerintahnya membantu pendidikan di Indonesia. Diantaranya melalui Sesame Street versi Indonesia. Yakni pembuatan film animasi yang menampilkan tokoh-tokoh boneka Indonesia. Ini akan membantu pengembangan dasar-dasar keberhasilan proses belajar bagi jutaan anak Indonesia, seperti halnya jutaan anak-anak di seluruh dunia. Program ini akan dilaksanakan selama empat tahun mulai 2007. “Kemitraan Sesame Street Indonesia di bawah koordinasi USAID melengkapi prakarsa Presiden Bush yang lebih luas dalam membantu

pendidikan di Indonesia senilai 157 juta dolar AS,” jelasnya. (*Indo Pos*, 15/3).

Di bawah pengamanan yang super ketat dari petugas keamanan Indonesia maupun petugas keamanan khusus AS, dari Madrasah Al Ma'muriyah Condoleezza Rice kemudian mengadakan pertemuan dengan Menlu Hassan Wirayuda di gedung Deplu, Pejambon yang dilanjutkan dengan makan siang. Setelah itu mengadakan pertemuan dengan Menko Perencanaan Boediono di gedung Depkeu Lapangan Banteng dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di kompleks Istana, Jakarta.

Banyak persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan dengan petinggi Indonesia. Mulai dari masalah ekonomi, kerjasama militer, bantuan pendidikan sampai masalah flu burung.

Bagi Rice, kunjungannya ke Indonesia sangat memberi makna.

Dalam jumpa pers di Deplu, pertemuan yang sebelum terjun ke politik banyak aktif di lingkungan perguruan tinggi berpendapat, Indonesia bisa menjadi inspirasi dan panutan bagi banyak negara dalam hal penegakan demokrasi. “Indonesia memiliki keragaman ras, etnis dan agama. Namun di sini kami bisa melihat demokrasi tumbuh dalam perbedaan,” ujar wanita berdarah Afro-Amerika ini.

Kunjungannya ke Indonesia telah memberi pandangan baru tentang berbagai hal seperti pendidikan di sekolah Islam yang selama ini dikiranya identik dengan terorisme. “Banyak pihak di Amerika memiliki pandangan negatif tentang madrasah. Tetapi, apa yang saya saksikan di sini sungguh berbeda,” akunya.

Terkait dengan hubungan militer, Rice menyatakan AS dan Indonesia telah sepakat meningkatkan kerjasama di bidang militer. Sebelumnya Rice berjanji meningkatkan kerjasama militer karena Indonesia dinilai berhasil melakukan perubahan signifikan

dalam kehidupan berdemokrasi.

Tentang perang melawan terorisme, Rice menegaskan hal itu harus menjadi perhatian semua pemerintah di dunia, tidak terkecuali Indonesia. “Meningkatkan serangan bom terjadi di semua wilayah seperti Bali, London, Madrid, Rusia bahkan New York, saya kira semua sepakat bahwa terorisme harus diberantas,” ujarnya.

Ditanya bagaimana sikap pemerintah AS terhadap banyaknya protes anti AS yang kerap terjadi di Indonesia, Rice mengatakan, hal itu hanyalah perwujudan sikap berdemokrasi. Dia juga menekankan bahwa AS bukanlah bangsa yang memusuhi Islam. Menurutnya, negaranya peduli pada Islam mengingat Islam adalah bagian dari sejarah dan budaya AS.

Dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, menurut Jubir Presiden Dino Patti Djalal, dibahas hubungan Islam dan Barat. Presiden menekankan perlunya dibangun ‘jembatan’ dan dialog dengan mengembangkan semangat demokrasi dalam dunia Islam. Dialog ini juga perlu dilakukan oleh media Barat dan mitranya.

Dari Jakarta, hari Rabu (15/3) Condy melanjutkan kunjungannya ke Australia. ■ HT



Menlu AS, Condoleezza Rice, saat berkunjung di Madrasah Al Ma'muriyah, Cikini.

PT. KA PACU KEANDALAN DAN WAKTU

Berpacu, itulah dinamika yang berkembang pada Perkeretaapian Indonesia. Sarana maupun prasarana terus dikembangkan. Pengguna jasa menjadi perhatian utama, pelayanan prima obsesi KA.



PT. KA: Berpacu dengan waktu.

Perjalanan perkeretaapian Indonesia saat ini berpacu dengan waktu. Perhatian pemerintah terhadap sarana transportasi jalan baja yang terlambat dimasa lalu, saat ini ingin dibalas dengan percepatan pembangunan prasarana maupun sarana KA yang memadai.

Sebagai bukti, KRL Jabotabek yang setiap hari penuh sesak dengan penumpang hingga meluas ke atap-atap gerbong, menjadi pemandangan sehari-hari. Meski Menhub Hatta Radjasa telah menginstruksikan agar KA tidak berangkat bila ada penumpang naik di atap gerbong. Kenyataannya, penumpang yang memilih di atas atap tetap ada. Masalahnya, sarana KA yang ada belum memadai dibanding pengguna jasa KA yang semakin bertambah.

Maka sebagai regulator, pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan, mulai bersikap arif melihat realita yang ada. Jika tidak berbenah saat ini, kapan lagi? Sebab jika terlambat berbenah, makin berat persoalannya. Bahkan hanya akan menjadi

mimpi buruk bagi pengguna jasa yang menginginkan pelayanan terbaik.

Menanggapi kenyataan dan persoalan transportasi, khususnya KA, Dirjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan, Soemino Eko Saputro mengungkapkan, pemerintah hingga akhir tahun 2006 ini akan menambah 218 gerbong kereta api. Dari jumlah itu, 160 diantaranya akan direalisasikan Agustus 2006. Penambahan jumlah itu, akan meelan biaya sekitar Rp. 300 miliar yang bersumber dari dana APBN.

Penambahan terbanyak untuk KRL Jabotabek, dari angka 218 gerbong, 160 diantaranya adalah KRL bekas dari Jepang. Pemerintah juga akan menambah 20 gerbong baru untuk kelas ekonomi. "Dua puluh gerbong yang semula tidak digunakan juga akan direnovasi agar dapat dioperasikan lagi," lanjutnya.

"Memperkuat armada KA juga dilakukan dengan memodifikasi interior dan ekterior 10 KR. Selain itu ada 8 KR yang sudah direnovasi. Anggarannya sudah ada dan pada akhir tahun ini semuanya sudah dapat

dioperasikan, sementara itu untuk KRL sudah direalisasikan Agustus tahun ini," lebih lanjut Soemino mengatakan.

Prasarana

Adanya rencana pembangunan *double track* (jalur ganda) Tanah Abang-Serpong dan Kroya-Cirebon serta pembangunan jalur ganda yang sedang berjalan, itu komitmen pemerintah secara terus menerus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Membangun *performance* yang lebih baik, saat ini maupun masa datang," tutur Mino panggilan akrab Soemino.

Sementara itu di tempat terpisah pemimpin proyek jalur ganda KA Cirebon-Kroya, Hendy Siswanto mengungkapkan, saat ini sedang mempersiapkan praklasifikasi (lelang) secara terbuka. Diharapkan awal tahun 2007 pelaksanaan pekerjaan pembangunan *double track* sudah dimulai. Cirebon-Kroya memiliki panjang jalur 158 Km, dengan bantalan beton dan rel (R 54). Pembuatan terowongan (jalur) baru, akan menembus 2 terowongan, sepanjang 700m dan 600m.

Kondisi ini berbeda dengan jalur ganda yang lain. "Ini merupakan tantangan baru," ungkap Hendy. Pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya mendapat bantuan LON dari China, termasuk pembuatan terowongan, dimana China sudah memiliki pengalaman dalam hal itu. Pembangunan *double track* yang dicanangkan 3 tahun, dimulai 2007 sampai 2009.

Di tempat terpisah, Wasisto Wibowo pimpinan proyek jalur ganda Cirebon-Haurgeulis (Daop III/Cirebon) mengatakan, beberapa prasarana juga akan dilakukan penyempurnaan dan penggantian. Seperti, penggantian bantalan rel (R42) ke R54, pembuatan peron dan jalur baru KA, tempat pemberhentian KA bila ada persilangan dan lain-lain. Juga penyempurnaan sistem, seperti pemasangan kabel sarana komunikasi.

Penyempurnaan dan penggantian berbagai prasarana itu diharapkan dapat meningkatkan percepatan lalu lintas KA, berangkat maupun yang berhenti di stasiun-stasiun Daop III/Cirebon. "Dengan prasarana yang memadai memudahkan dapat meningkatkan pertumbuhan, baik ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan," ungkap Wasisto. Proyek *double track* dimulai 2004 dan target sampai Agustus 2007. Namun, diharapkan Maret 2007 bisa selesai. ■ RI

Siang Berdarah DI ABEPURA

Demo anti Freeport berubah arah. Para demonstran jadi brutal. Empat aparat negara tewas berlumur darah.

Lewat tengah hari Kamis (16/3), ratusan massa Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat yang berkumpul di jalan di depan Universitas Cendrawasih, Abepura, merangsek satuan keamanan, berubah brutal. Empat aparat negara—tiga anggota Brimob dan seorang prajurit TNI-AU—tewas berlumur darah dihakimi massa.

Awalnya, polisi meminta massa membuka jalan umum (Mil 72-74) yang diblokir dengan barikade batu dan batang kayu. Mereka menolak, polisi membuka paksa. Massa yang bringas merangsek, polisi mundur tetapi dilempari batu. Titik api bentrok pun berkobar. (*Kompas*, 17/3).

Ketika polisi bergerak mundur, tiga anggota Brimob dan seorang prajurit AU—Brika Sulaiman Daud, Briptu Arizona, Brigadir Sudirman dan Serda Agung—

terperangkap massa yang mengamuk. Mereka diinjak-injak, dipukuli massa demonstran sampai berlumur darah dan tewas seketika. Sebanyak 19 anggota polisi lainnya, luka-luka. Sorenya, satuan polisi menysisir kampus, menangkap 40 perusuh.

Polisi berhasil mengendalikan situasi, membuka jalur jalan yang diblokir massa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengutus empat petinggi keamanan—Menko Polkamkom Widodo AS, Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar—terbang menuju Papua untuk menangani masalah-masalah yang terkait. Susilo, usai sidang kabinet Kamis siang, berbicara kepada pers, menyesalkan tragedi tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban.

Sebelum itu (20/2), terjadi bentrokan

antara para pendulang emas dan Satpam FI yang dibantu aparat keamanan. Para pendulang tersebut diusir, berlanjut menjadi adu mulut dan adu fisik. Puluhan pendulang luka tergelincir dan empat aparat keamanan luka kena lemparan batu.

Lantas aksi demo merebak. Sekitar 500 warga Kali Kabur dan Banti, distrik Tembapapura, melakukan aksi menutup ruas jalan di Mil 72-74. Jalur ini merupakan satu-satunya akses ke lokasi pengolahan dan penambangan di Graberg dari pemukiman karyawan FI. Akibatnya, mobilitas kendaraan, alat berat dan karyawan terhenti total.

Tentang Freeport, Susilo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup tambang tersebut, karena terkait banyak aspek. “Tentu saja kalau kita mengikuti pemikiran sejumlah orang untuk menutup Freeport sekarang, ada permasalahan secara hukum,” kata Susilo.

Juga Susilo mengingatkan para elit politik agar bersikap arif, tidak mengeluarkan pernyataan yang diartikan sebagai provokasi. Sebab, Susilo melihat indikasi bahwa gerakan tersebut telah meningkat dari tuntutan penutupan tambang FI dan penolakan propinsi Irian Jaya Barat, menjadi tuntutan kemerdekaan Papua. Dan dia meminta masyarakat Papua tetap tenang, menyerahkan penyelesaian masalah kepada aparat keamanan dan hukum. ■ **SP, SH**



PENUTUPAN FI:

20 Februari 2006:

Bentrokan antara satuan aparat gabungan, Satpam Freeport dan para penambang liar. Ruas jalan di Mil 72-74 Tembapapura diblokir massa.

22 Februari 2006:

Pihak direksi PT FI menutup sementara dan menghentikan produksi tambang untuk mencegah meluasnya konflik.

23 Februari 2006:

Ratusan mahasiswa dan anggota Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat melancarkan demo yang rusuh dan brutal di kantor pusat FI di Plaza 89, Jakarta.

27 Februari 2006:

Tak kurang dari 700 anggota Front Pembebasan Masyarakat Papua Barat menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan pemerintah propinsi Papua memproses penutupan tambang FI.

28 Februari 2006:

Majelis Rakyat Papua dan DPRP secara resmi meminta FI dan pemerintah pusat menghentikan kegiatan penambangan FI. KOMPAS-SH

PERTAMINA GANTI DIREKSI

“Hajatan besar” menurunkan Widya Purnama sebagai Dirut Pertamina akhirnya terlampaikan pada Rabu sore, 8 Maret 2006 di Kantor Menneq BUMN, Jakarta. Peristiwa ini menafikan gagasan besar menempatkan Pertamina sebagai pemimpin eksplorasi Blok Cepu. Desi Anwar, *host* sebuah acara dialog di stasiun televisi Metro TV milik Surya Paloh yang sehari-hari juga menjabat Ketua Penasehat DPP Partai Golkar, berkali-kali menyebut pergantian direksi ini sebagai sebuah akhir yang *happy ending*.

Kepada tujuh pendekar baru Pertamina yang dipimpin oleh Dirut Ari H. Soemarno, Menneq BUMN Sugiharto berpesan agar secepatnya dalam 100 hari pertama menyelesaikan persoalan eksplorasi di ladang minyak Blok Cepu, Jawa Tengah. Pesan lain, Pertamina harus dapat menyetor deviden ke kas negara Rp 15,5 triliun.

Pengelolaan Blok Cepu dinilai sangat instrumental bagi APBN 2006. Blok ini memiliki potensi produksi minyak mentah 170.000 barel per hari, menambah 17-20 persen produksi migas nasional. Keuntungan dari blok ini 9,2 juta dolar AS perhari, jika asumsi

gagasan Widya Purnama tersebut.

Widya akhirnya harus tergelincir walau tetap mendapat simpati. Anggota Komisi VII DPR, Zulkifliemansyah, misalnya, menyebut agar pergantian direksi Pertamina jangan sampai menjadi alasan memuluskan langkah ExxonMobil menjadi operator Blok Cepu. Pengalaman eksploitasi Freeport di Timika, Papua, kata Zulkifliemansyah, cukup menjadi pengalaman yang harus dihindari. Apapun alasannya, operator Cepu harus Pertamina supaya memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

Pers memang selalu ramai membicarakan soal rebutan



Pergantian Dirut Pertamina, kini dipimpin oleh Ari H. Soemarno

minyak 60 dolar AS per barel. Karena 93 persen produksi Cepu untuk pemerintah, maka, kalau tak dioperasikan *opportunity loss*-nya 9,2 juta dolar AS per hari. Tapi ada makna strategis lain yang tersembunyi, Blok Cepu memiliki kandungan prospektif miliaran barel dan ada kandungan potensial minyak mentah.

Soal Blok Cepu telah lama menjadi harga diri terbesar yang ingin dipertahankan oleh Widya Purnama, agar Pertamina dapat menjadi operator di sana. Namun sejumlah kalangan justru ingin menyerahkannya ke tangan asing, ExxonMobil. Pernyataan Sugiharto, tentang tugas direksi baru dalam 100 hari pertama, sama saja dengan memberi kebebasan kepada ide lain di luar

Cepu, sekaligus menyebut-nyebut nama yang berkepentingan di dalamnya. Nama-nama yang tak pernah muncul pun namun sangat berkepentingan sekali, itu sesungguhnya pers juga tahu.

Semua persoalan memang lalu mengerucut untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wapres Jusuf Kalla, misalnya, pada awal Maret saat membuka seminar nasional tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyebut, masalah Blok Cepu sudah menjadi sorotan banyak kalangan di tanah air dan dunia internasional. Penyelesaiannya

harus dapat dilakukan secepatnya. Lalu, Meneg BUMN Sugiharto mengaku pula sedang berjuang agar Pertamina memegang kontrol, atau sebagai *chairman operating committee* dalam *joint operation agreement* (JOA) antara Pertamina dengan ExxonMobil.

Keraguan atau tepatnya ketakutan pemerintah mengambil keputusan soal lapangan minyak di Blok Cepu, Jawa Tengah, dikritisi oleh anggota Komisi VII DPR Ami Taher. Dia menyebut pemerintah tidak mau berisiko mengambil alih penyelesaian negosiasi. Pada rapat Kabinet Jumat (3/3), yang dipimpin langsung oleh Presiden pun, kata Taher, tak kuasa mengambil keputusan final. Pemerintah sepertinya sadar, menunjuk ExxonMobil adalah tindakan keliru, tapi menjatuhkan pilihan kepada Pertamina pun ragu-ragu.

Wapres Jusuf Kalla kemudian berinisiatif mengambil siasat lain, yakni dengan mencoba memberikan lima kriteria terhadap calon direksi baru Pertamina. Kriteria ini dinilai oleh tokoh pers Dahlan Iskan jelas-jelas mengarah kepada penunjukan ExxonMobil. Yakni, kemampuan *men-deliver* produksi yang lebih cepat, kemampuan sistem *logistic support* dan *maintenance*, kesiapan *financing*, kemampuan teknologi, dan pengalaman dalam melakukan eksplorasi di daerah lain.



Sama dan Sebangun

Persoalan rebutan antara Pertamina dengan ExxonMobil sama dan sebangun dengan hajatannya menurunkan Widya Purnama. Sinyal kepastian pergantian ini tertangkap saat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan saat berada di Vietnam, bahwa Pertamina perlu melakukan *overhaul*.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana dari Partai Demokrat berkomentar, Pertamina harus dipimpin orang minyak yang jujur, profesional, berpengalaman, dan memiliki keberanian untuk membongkar penyimpangan yang terjadi di internalnya.

Belakangan nama Ari H. Soemarno kemudian melaju sendirian, persis saat nama kakak kandung mantan Menteri era Megawati Soekarnoputri, Rini MS Soewandi, ini dikait-kaitkan dengan deal politik dengan kalangan PDI Perjuangan.

Sugiharto, usai bertemu Presiden, Selasa (7/3) turut memperkuat nama Ari, dengan menyebut Dirut Pertamina segera diganti dengan figur yang berasal dari internal perusahaan. Pemilihan orang dalam dimaksudkan untuk menghindari resistensi dari sekitar 20 ribu karyawan Pertamina. Maka sensasi yang tak lagi sensasional itu terjadi pada hari Rabu, 8 Maret saat direksi baru Pertamina dilantik.

Belajar dari pengalaman sebagai Dirut, yang kursinya selalu digoyang Menteri, Widya memberi respon atas keinginan Presiden agar Pertamina dapat menjadi besar seperti Petronas. Kata Widya, posisi Pertamina sebaiknya langsung berada di bawah Presiden, bukan Meneg BUMN.

“Dengan begitu, saya yakin Pertamina akan jauh lebih besar dari Petronas,” kata Widya Purnama, yang sebelumnya sukses membesarkan nama Indosat ini. ■ HT/AM

7 BOS BARU PERTAMINA

Ari H. Soemarno; Jabatan Direktur Utama; Lahir Yogyakarta, 14 Desember 1948; Pendidikan Studienb Kolleg, Aachen University, Jerman, Chemistry, Aachen University, Jerman; Karir Staf Khusus Direktur Hilir Pertamina, Presdir Petral.

Iin Arifin Takhyan; Wakil Direktur Utama; Lahir Tasikmalaya, 16 Februari 1952; Pendidikan Teknik Perminyakan ITB Bandung, Teknologi Energi Panas Bumi, Universitas Auckland, Selandian Baru; Karir Dirjen Migas, Departemen ESDM, Direktur Manajemen Production Sharing Pertamina (Januari 2001), Perwakilan Indonesia untuk OPEC (1998-1999), Direktur Eksplorasi & Produksi, Ditjen Migas (1998-1999).

Frederick ST Siahaan, Direktur Keuangan; Lahir Pematang Siantar, 10 November 1967; Pendidikan Master Manajemen Bisnis, Asian Institute Manajemen (AIM) Manila, 1995; Karir Ass. Investment Banking Director, Indo Premier Securities (2002), Sigma Batar, Philam Life Investment, Manila, 1995.

Sukusen Soemarinda, Direktur Hulu; Lahir Semarang, 3 Agustus 1951; Pendidikan Teknik Geologi UGM Yogyakarta, Institut Panas Bumi Aukland; Karir GM JOB Lasmo Malagot, GM Geothermal, Dit. Hulu, Pertamina.

Suroso Atmomartoyo, Direktur Pengolahan; Lahir Solo, 7 September 1950; Pendidikan Teknik Kimia, UGM Yogyakarta; Karir Direktur Pengolahan Pertamina, Manajer Senior Kehandalan dan JSP Dit. Hilir, Kadiv. KJO Direktorat Hilir.

Achmad Faisal, Direktur Pemasaran dan Niaga; Lahir Tebing Tinggi, Sumut, 20 Maret 1956; Pendidikan Teknik Fisika ITB Bandung; Karir Deputy Dir. Pemasaran dan Niaga, Kadiv BBM Pertamina, Senior VP Marketing & Trading, PT Pertamina.

Sumarsono, Direktur Umum & SDM; Lahir Banjarmasin, 31 Agustus 1954; Pendidikan Manajemen Industri, STMI, Master of Business Administration, IPPM, Doctor on Management, Univ. of Twente, Belanda, Doctor of Business Administration MSM, Belanda; Karir Kepala Perwakilan Pertamina untuk Asia Timur.



SYAMSUL MAARIF

Rasa Gula Tak Lagi "Manis"

Setelah berhasil mengatasi keberatan sejumlah kalangan, termasuk anggota parlemen di DPR RI soal impor beras, Wakil Presiden Jusuf Kalla beralih mengomentari soal tata niaga gula.

Ada selisih lebih mahal Rp 1.500-1.800 atau 40%-48%/kg.

Dengan perkiraan terdapat selisih dalam persentase yang sama, jika diambil kompromi HDG Rp 5.000, ini harga tengah dari usulan pedagang yang Rp 4.800/kg, dan usulan petani yang Rp 5.275/kg, maka, harga gula di tingkat ritel dipastikan akan terdongkrak pada kisaran Rp 7.000-7.400/kg.

Bahkan, Ketua Komisi VI DPR RI, Didik J. Rachbini menyebut angka itu masih bisa melonjak lagi. "Sebab, harga gula dunia akan terus tinggi. Apalagi sistem perdagangan gula kita begitu solid. Sangat sedikit pedagang di rantai pertama, tentu itu mendorong aksi tahan stok," ujar politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN), ini.

Sindikatis Internasional

Wapres Jusuf Kalla mengakui adanya kartel yang, kemudian mendongkrak kenaikan harga gula. Bahkan, "Kartel merupakan tipikal perdagangan gula sejak dulu," sebutnya.

Pernyataan Kalla menjadi unik sebab ia memberikan solusi yang sama seperti kasus beras, yaitu mempercepat impor gula untuk menambah pasokan gula dalam negeri. Katanya, impor dilakukan transparan melalui mekanisme yang terbuka. "Untuk melawan itu semua, harus dibuka keran impor," ujar Kalla di Jakarta, sebagaimana dikutip koran *Investor Daily* (4-5/2).

Senada dengan Kalla, hasil kajian awal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menyebut besar kemungkinan terjadi kartel perdagangan gula di dalam negeri. Kartel bersifat oligopolis karena dikuasai beberapa pengusaha.

Sayangnya KPPU tak mau menyebut siapa saja nama-nama pengusaha oligopolis dimaksud. KPPU hanya membawabawa lembaga Komisi VI DPR, yang menurut Ketua KPPU Syamsul Maarif secara eksplisit pernah menyebutkan nama-nama perusahaan yang diduga termasuk dalam oligopolis perdagangan gula.

Hingga saat ini KPPU baru akan menyelidiki dugaan adanya kartel dalam perdagangan gula pasir di Indonesia. Pernyataan yang hampir senada kembali diulang Syamsul Maarif, saat bersama hampir

semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pergulaan, kecuali pedagang, mengadakan dengar pendapat masalah pergulaan nasional di Jakarta (*Investor Daily*, 15/2).

Syamsul menyebut akan menganalisa hasil pertemuan, apakah nantinya menjadi perkara, atau dimonitor terlebih dahulu. "Itu semua tergantung analisis kami, karena bisa saja berupa monitoring," kata Syamsul.

Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti), Natsir Mansyur, menduga kartel gula Indonesia dikendalikan oleh sebuah kelompok yang tergabung dalam asosiasi dunia. Ia mendasarkannya atas harga gula yang sangat tergantung importir tertentu, dan harga pasar internasional.

Indikasi lain, setiap dilakukan tender impor selalu dipersyaratkan peserta harus merupakan anggota The Sugar Association of London. Syarat ini menutup kesempatan bagi perusahaan dalam negeri untuk ikut meski mereka bisa menyediakan gula dengan harga lebih rendah.

"Buktinya, yang ikut tender perusahaan-perusahaan itu saja baik tender yang dilaksanakan importir terdaftar maupun oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Perum Bulog," ujar Natsir.

Bulog sendiri dinyatakan gagal melaksanakan tender pengadaan gula, setelah perusahaan-perusahaan lain yang mengikuti tender juga didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat.

Adalah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ardiansyah Parman, yang mengumumkan langsung tentang Bulog tidak berhasil melaksanakan tender karena tidak memenuhi syarat sehingga didiskualifikasi. Bulog merencanakan impor gula untuk keperluan stok penyangga (*stock buffer*). Namun, Ardiansyah memastikan kegagalan Bulog tidak akan mengganggu ketersediaan gula di dalam negeri, kalau dilihat dari perhitungan rencana produksi pada bulan April 2006 ini.

Gula bukanlah beras namun keduanya memiliki kesamaan dalam persoalan. Pihak yang berkepentingan pun agaknya tak jauh-jauh amat. Apakah gula mengalami proses politik yang sama dengan beras, siapa pun belum bisa memastikan. ■ HT

■ a memberi solusi yang sama pula dengan soal beras, lakukan saja impor gula untuk mengatasi kartel perdagangan gula di dalam negeri.

Ceritanya bermula dari tahun 2002, saat para petani mulai merasakan kenikmatan harga gula yang secara perlahan membaik. Petani lalu terdorong memperluas areal tanaman tebu. Produksi yang melimpah berhasil menyelamatkan sejumlah pabrik gula, yang semula sedang mati suri dan hendak tutup karena penurunan pasokan tebu.

Direktur Utama PT Pabrik Gula (PG) Radjawali II, Bambang Prijono, di Cirebon, dan Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Adi Prasongko, di Surabaya, kepada *Kompas* (4/2) mengakui, karena harga gula yang rendah di bawah Rp 2.600/kg sempat membuat petani enggan menanam tebu.

Tetapi sejak tiga tahun lalu pemerintah turun tangan mengatasi dengan membuat tata niaga baru, yang akhirnya berhasil mendongkrak perbaikan harga gula.

Setelah harga gula membaik muncul lagi persoalan lain. Disinyalir terdapat kartel perdagangan gula dalam negeri yang menguasai keseluruhan peta perdagangan, sehingga harga gula melejit sedemikian rupa tingginya. Harga gula di beberapa daerah ada yang mencapai di atas Rp 6.000/kg, meski laju kenaikannya relatif stabil.

Dewan Gula Indonesia (DGI), memang, sudah menetapkan harga dasar gula (HDG) menjadi Rp 4.800-5.275/kg. Namun pelaku industri makanan dan minuman, termasuk pelaku usaha kecil menengah menilai masih terlalu tinggi, sebab harga ritelnya di pasaran bisa-bisa mencapai Rp 7.400/kg.

Mereka beralasan, ketika 20 April 2005 lalu DGI menetapkan harga dasar gula Rp 3.800/kg, buktinya harga di tingkat konsumen mencapai Rp 5.300-5.600/kg.

ISI PESAN PAKET JANUARI 2006

Paket kebijakan ekonomi Bank Indonesia Januari 2006 (PakJan), yang memperlonggar fungsi intermediasi perbankan mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan.

Bank Indonesia (BI) mengambil inisiatif terlebih dahulu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 (PakJan), pada Senin (30/1) lalu.

Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, saat mengumumkannya mengatakan PakJan merupakan upaya memperluas ruang gerak perbankan agar dapat lebih meningkatkan fungsi intermediasinya.

Kebijakan moneter terbaru yang sangat ditunggu-tunggu kalangan dunia usaha ini memperoleh respon sangat baik dari media massa, yang mengulasnya secara mendalam termasuk menampilkan sejumlah pendapat para analis dan pengamat ekonomi/perbankan.

Sebelum PakJan diumumkan, pada pertemuan tahunan perbankan 2006 di Jakarta, 13 Januari 2006, Burhanuddin memang sudah menjanjikan akan mengeluarkan paket kebijakan yang lalu dikenal sebagai PakJan.

PakJan 2006 berisi tujuh ketentuan terdiri lima berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan dua Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI). Enam diantaranya merupakan pengaturan mengenai bank umum, satu sisa lainnya mengenai bank syariah.

"Ketujuh aturan tersebut merupakan bentuk konkret langkah kebijakan BI untuk membuka ruang gerak perbankan agar dapat terus meningkatkan perannya dalam pembiayaan pembangunan, sekaligus memperkuat pondasi perbankan sesuai dengan arah arsitektur perbankan Indonesia," ujar Burhanuddin Abdulah, Gubernur BI era keterbukaan yang dipilih secara demokratis melalui mekanisme *fit and proper test*.

Isi Pesan

PBI No. 8/2/PBI/2006, bersama SE-BI No. 8/2/DNPN, mengatur pelaksanaan penahapan penerapan kualitas yang sama (*uniform classification*) untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih

satu bank, kepada satu debitur atau proyek yang sama. Penahapan didasarkan atas jumlah (limit) aktiva produktif.

Isi pesannya, setiap bank harus mampu mengelola risiko kredit secara memadai, agar potensi kerugian yang ada dapat diminimalisir termasuk dengan menjaga kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan yang cukup. Peraturan ini memberikan kesempatan langkah transisional dalam penerapan *uniform classification*, sehingga dianggap bernafaskan kelonggaran.



BURHANUDDIN ABDULLAH

PBI No. 8/3/PBI/2006 mengatur perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pembukaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Isi pesannya, perlu ada peningkatan kemudahan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah terutama dalam menerima dana simpanan. Bagi bank yang telah memiliki unit usaha syariah, diperbolehkan untuk juga melayani transaksi syariah di kantor-kantor cabang bank konvensional.

PBI No. 8/4/PBI/2006 mengatur pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance, GCG*) bagi bank umum. GCG merupakan tata kelola berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Setiap bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

Isi pesannya, memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

PBI No. 8/5/PBI/2006 mengatur mediasi perbankan jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank. Isi pesannya, melindungi kepentingan nasabah yang apabila melakukan pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan secara memuaskan, sehingga seringkali menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

PBI No. 8/6/PBI/2006 mengatur penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Isi pesannya, mempertimbangkan bahwa eksposur risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak. Maka, setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak.

SE-BI No. 8/3/DPNP mengatur penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit pegawai atau pensiun. Isi pesannya, BI memandang perlu mendorong peran perbankan membiayai kegiatan ekonomi usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan pegawai/pensiunan. BI menurunkan bobot risiko atas Kredit Usaha Kecil (KUK) menjadi 85%, KPR 40%, dan Kredit Pegawai/Pensiunan menjadi 50%.

SE-BI No. 8/2/DPNP bersama-sama dengan PBI No. 8/3/PBI/2006) dimaksudkan mengatur pelaksanaan penahapan penerapan kualitas yang sama untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih satu bank kepada satu debitur atau proyek yang sama. ■ HT

MISTERI LIMA JUTA DOLAR

Kini Neloe harus menghadapi tuduhan pencucian uang oleh Pemerintah Swiss. Rekeningnya masih diblokir.

Meski telah divonis bebas, ECW Neloe tidak serta merta bernapas lega. Mantan Dirut Bank Mandiri itu harus menghadapi dugaan tindak pidana lainnya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Swiss kini tengah menyelidiki dugaan praktik pencucian uang, menyusul transfer dana ke rekeningnya di salah satu bank di negara itu sebesar lima juta dolar AS.

Berita tentang Neloe masih menjadi santapan media massa. Harian *Bisnis In-*

rekening tetap dilakukan. Kejaksaan Agung tengah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas tersebut.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Swiss dalam menyelidiki itu, Kejaksaan Agung segera menggalang kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama juga akan ditempuh dengan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, untuk mengorek informasi asal-usul aliran dana yang masuk ke rekening Neloe.

Neloe dan dua mantan direktur Bank Mandiri, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Gatot Suharnoto dalam kasus korupsi pembe-

rian kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara, yang merugikan negara Rp 160 miliar.

Komisi Yudisial kini tengah memfokuskan pemeriksaan Gatot Suharnoto dkk atas pilihan undang-undang yang dipakai membebaskan ketiga terdakwa.

Sementara itu, pengacara Neloe, Juan Felix Tampubolon menanggapi tetap diblokirnya rekening Neloe sebagai reaksi sikap emosional pihak kejaksaan atas vonis bebasnya Neloe. Seperti dikutip *Kompas*, 1 Maret 2006, ia menduga semula rekening diblokir untuk memudahkan pengembalian kerugian negara jika hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Neloe. Sekarang ia mempertanyakan

dugaan pencucian uang terhadap kliennya.

Target Tim Pemburu Koruptor dalam memburu aset koruptor di dalam dan di luar negeri memang tak main-main. Harian *Indo Pos*, pada hari yang sama, melaporkan bahwa selain membantu Pemerintah Swiss dalam penyelidikan aset Neloe, TPK juga masih memburu aset-aset para koruptor lainnya. TPK telah merilis daftar 10 pengemplang uang negara yang menjadi prioritas untuk diburu. Ke-10 orang dalam kategori *big fish* itu diduga saat ini masih ada di luar negeri. ■ RH



ECW NELOE



nesia, 1 Maret 2006, bahkan menjadikannya *headline* dengan judul "Swiss Usut Rekening Neloe."

Meski tidak disebutkan sejauh mana Pemerintah Swiss menyidik kasus tersebut maupun besarnya aset yang dimiliki Neloe, rekening itu ternyata sudah dibekukan sejak mantan bankir itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di Bank Mandiri tahun lalu.

Menurut Ketua Tim Pemburu Koruptor (TPK) Kejaksaan Agung, Basrief Arief, meski Neloe divonis bebas, pemblokiran

MEMBURU ASET KORUPTOR

Basrief Arief dan timnya mengaku hingga kini baru berhasil mendapatkan Rp 2 triliun – Rp 2,5 triliun yang bisa dikembalikan kepada negara, yakni dari Bambang Sutrisno, Adrian Kiki Ariawan dan Hendra Rahardja. Padahal, target TPK adalah Rp 7 triliun.

Di Hongkong, dilaporkan—*Bisnis Indonesia*, TPK melacak aset alm. Hendra Rahardja, mantan Preskom Bank Harapan Sentosa, senilai 9,3 juta dolar AS. Sementara di Swiss, yang diburu adalah aset Irawan Salim, mantan bos Bank Global, senilai Rp 500 miliar. ECW Neloe tengah diselidiki karena diduga memiliki rekening di Swiss sebesar 5 juta dolar AS. Ketiga aset itu kini diblokir.

Swiss memang menjadi favorit bagi para koruptor. Dana mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos ditaksir 414 dolar AS. Ketika disita sebagian oleh Pemerintah Filipina pada 2003, sudah membengkak menjadi 683 dolar AS.

Mantan PM Pakistan Benazir Bhutto juga dibekukan 12 rekeningnya, yang ditaksir 80 juta dolar pada tahun 1997. ■ RH

PAK MENTERI YANG DINANTI

Hamid Awaluddin sampai kini berstatus saksi. KPK dianggap tebang pilih.

Kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berlanjut. Hamid Awaluddin, mantan anggota KPU yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Dipanggil KPK untuk diperiksa (13/3).

Kelihatannya KPK tidak mau mengejar bola untuk segera memproses pengadaan kotak suara yang melibatkan dua saksi dalam pengadaan kotak suara hasil Pemilu tahun 2004 lalu. Mereka hanya menunggu hasil dari tim penyidik, apakah ada alat bukti untuk merubah status Hamid dari saksi menjadi tersangka bisa saja terjadi dengan alat bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan yang kini ditunggu pihak KPK. "Ya saat ini dia tetap menjadi saksi. Kalau ada yang tanya apakah bisa jadi tersangka, ya kita lihat dulu apakah ada alat bukti lainnya," jelas Tumpak, Wakil Ketua KPK.

Padaahal, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berpendapat, penguasaan Daan Dimara saat diperiksa sebagai

tersangka kasus korupsi pengadaan segel surat suara di KPK, harus ditindak lanjuti oleh KPK. "Memang ada kesan KPK tidak serius menangani Hamid dan Chusnul Mar'iyah. Saya sangat berharap KPK tidak tebang pilih dalam hal ini," harap Trimedya.

Hal senada juga datang dari Guru Besar



HAMID AWALUDDIN

Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romly Atmasasmita, yang sempat mempertanyakan alasan KPK belum memeriksa Hamid dan Chusnul. "Pak Tumpak mengatakan sedang dalam penyelidikan. Hanya dalam pemikiran saya, ketuanya sudah ditahan, seharusnya anggota KPU lainnya juga," jelas mantan penyeleksi pimpinan KPK itu.

Sementara itu, *Koran Tempo*, 2 Maret 2006 juga menurunkan judul "Pemanggilan Hamid KPK Belum Temukan Indikasi". Menurut Ketua KPK Taufiequracman Ruki, sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan Hamid dalam kasus korupsi di KPU. "Tidak bisa karena dia anggota KPU, lalu dia tidak bisa tersangkut," katanya.

Alasan KPK yang menunggu hasil penyelidikan atas keterlibatan Hamid dan Chusnul tentang korupsi ini tidak perlu ditunggu. Kalangan Dewan tidak satu suara atas sikap KPK yang menunggu hasil tim penyidik. "Sepanjang yang kami tahu, kewenangan yang ada pada dua orang itu terkait dengan proses pengadaan (barang untuk kebutuhan Pemilu)," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Mulfachri Harapah. Mulfachri berharap KPK bertindak benar-benar berdasarkan fakta hukum dan bukan pesanan pihak tertentu". ■ AM, RH

KAMAR BARU DI SUKAMISKIN

Lapas Cipinang penuh. Beberapa narapidana kasus korupsi dipindahkan sementara.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang penuh bukan berita baru lagi. Bangunan penjara itu kini tengah direnovasi besar-besaran dan akan ditambah bangunan baru untuk menambah kapasitasnya. Berkaitan dengan itu, maka sejumlah penghuninya akan dititipkan sementara ke lapas-lapas yang lain.

Maka, sebenarnya tidak mengherankan jika Probosutedjo, Abdullah Puteh dan John Hamenda – ketiganya terpidana kasus korupsi – dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Berbagai media memuat berita ini. –*Koran Tempo*, 4 Maret 2006 bahkan menjadikannya *headline* dengan judul "Tiga Koruptor Pindah Penjara".

Mereka bertiga dibagi menjadi tiga blok

yaitu Probosutedjo (76) berada di Blok Timur Atas No. 38, Abdullah Puteh (58) berada di Blok Barat Atas No. 25 dan John Hamenda (48) berada di Blok Timur (Kuningan) No. 3.

Lapas Sukamiskin sesungguhnya bangunan yang memiliki tempat dalam catatan sejarah bangsa, karena di penjara inilah Presiden Pertama RI Soekarno pernah ditahan dan menghasilkan berbagai buah pikirannya. Lapas ini dibangun pemerintah Belanda mulai 1918 – 1924, bentuknya mirip kincir angin jika dilihat dari atas.

Direktur Pengamanan Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Djoko Mardjo menambahkan, tahanan di Blok 3H Lapas Cipinang akan dipindahkan secara bertahap ke sejumlah Lapas sehingga proses pembangunan untuk menambah kapasitas Lapas Cipinang dapat dilaksanakan setelah sebelumnya pembangunan gedung baru di sebelah Timur bangunan lama yang sudah dimulai sejak 2001 akan selesai pada April 2006. "Ter-

pidana lainnya juga akan menyusul dipindahkan seperti Rahardi Ramelan. Mengenai lokasi Lapasnya, kita lihat mana yang kosong dan dapat menampung," jelasnya seperti dikutip *Republika*, 4 Maret 2006.

Ia menambahkan, pemindahan itu dilakukan untuk mempercepat renovasi besar-besaran Lapas Cipinang. "Kalau renovasi selesai, (mereka) tentu akan dikembalikan ke Cipinang. Terpidana lain yang akan dititipkan di sejumlah Lapas, baik di Sukamiskin atau Lapas di Jawa Barat, Banten maupun di Jawa Tengah. Di Bandung, selain di Lapas Sukamiskin, para terpidana akan ditempatkan di Lapas Soekarno-Hatta".

Sementara itu, menurut catatan *Indo Pos*, 4 Maret 2006, di Lapas Cipinang yang masih menunggu giliran untuk dipindahkan ke Lapas lain ialah ada Beddu Amang (kasus *ruislag* Bulog PT Goro Batara Sakti), Rahardi Ramelan (kasus Bulog II), Hendrawan Haryono (kasus BLBI Bank Aspac), Adrian H. Waworuntu (kasus pembobolan Bank BNI) dan Paul Sutopo (kasus korupsi BLBI). ■ AM, RH

◆ IR. HUMUNTAR LUMBAN GAOL

TAK PERNAH PENSIUN PIKIRK

Materi, tak lagi terlalu dikejanya. Ia sudah pensiun dari Pegawai Negeri Golongan Pembina Madya/IV E. Keenam anaknya pun sudah 'mentas' dan semuanya telah menyandang gelar sarjana. Tapi, Ir. Humuntar Lumban Gaol, bukan tipe orang yang cepat puas dengan kesuksesan, jika hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dimasa pensiun, ia masih memimpin usaha dalam bidang pertanian. Humuntar demikian dekat dengan petani, karena 35 tahun bekerja untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani. Ketahanan pangan yang sedang goyah akhir-akhir ini menggerakkan hatinya untuk kembali turut berkiprah. Bersama dengan para pensiunan yang lain, kini ia sedang merintis Dewan Beras.

Berbincang-bincang dengan pria kelahiran Tapanuli, 8 Januari 1938, ini demikian terasa hangat. Bukan saja karena sosoknya yang suka bercanda, tapi juga keterbukaan dan gaya bicaranya yang *blak-blakan* sehingga siapa saja akan lebih mudah berkomunikasi. Pengalaman panjangnya sebagai mantan pegawai pemerintah yang tahu betul bagaimana mengatasi masa-masa krisis pangan di negara ini selalu dibawanya.

Humuntar mengawali kariernya sebagai Staf Produksi BPU, Perusahaan Perkebunan Dwikora, Sumatra Barat pada tahun 1965, setahun setelah ia lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sesuai dengan ilmunya di bidang pertanian, karier yang dirintisnya

dari bawah tak jauh dari disiplin ilmu yang ditekuninya.

Ia pernah duduk sebagai *Official* masalah-masalah BIMAS, pengadaan beras, Tim PL-480 oleh Menteri Keuangan. Kemudian pernah juga menjadi Direktur Urusan Pangan dan Penerimaan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Monitor Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Kemudian setelah diperbantukan sebagai

Staf Ahli Kepala Sekretariat Pengendalian Operasi Pembangunan, ia diangkat sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan Bidang Pembangunan Desa, tahun 1994. Masa tugasnya berakhir pada tanggal 8 Januari 1998, ketika usianya menginjak 60 tahun.

Pengalaman panjang itulah yang kini dijadikannya sebagai pijakan untuk menyumbangkan saran dan masukan kepada pemerintah dalam upaya menegakkan pangan nasional. Mengingat kesuksesan masa lalu, pria enam anak ini yakin upayanya bakal membuahkan hasil. Saat ia menjabat sebagai Asisten III Menko Ekuin dan Pengawasan Bidang Produksi, Distribusi dan Kependudukan, tahun 1984 saat itu pula negara ini berhasil membuat swasembada pangan. "Kita bisa surplus beras pada saat itu. Sehingga Pak Harto (presiden Soeharto-red) kala itu mendapat penghargaan dari FAO," ujarnya mengenang. Surplus beras itu terjadi menurut Humuntar, karena pada waktu itu konsentrasi pemerintah fokus pada kemajuan produksi masyarakat tani.

Namun kini, ia melihat pemerintah mulai bergeser fokusnya tidak lagi pada bidang pertanian. Sekarang ini mulai masuk industri *manufacture*, sehingga seolah-olah petani mulai dilupakan.

Rintis Dewan Beras

Sebagai orang yang sudah 'tidak menjabat' lagi, Humuntar praktis sebagai penonton. Namun, karena bertahun-tahun 'permainannya' di bidang beras dan petani sebagai mitra kerjanya, maka ia sebagai



IR. HUMUNTAR LUMBAN GAOL

KAN PETANI

penonton yang kritis. Ketika ketahanan pangan negara ini sedang dalam masa krisis, pemerintah melalui tangan Bulog tetap memilih untuk impor beras.

Humuntar menyaksikan pergunjangan terhadap kebijakan impor beras tersebut ada yang pro dan ada yang kontra. Ia juga melihat adanya 'kecurigaan' di sana-sini, sampai-sampai ada tim dari DPR yang "menginteli" proses impor ini hingga Vietnam. Para politisi mulai gonjang-ganjing soal beras. Masing-masing membawa kepentingan.

Melihat ini semua, ia mengaku prihatin. Apalagi ketika semua orang berbicara masalah beras, petani malah dilupakan. Pupuk langka sehingga harganya kian tak terjangkau. Belum lagi banyak petani gagal panen karena bencana banjir dan longsor. Akibatnya, harga beras naik tak terbendung. Bukan saja petani yang terpukul, masyarakat pun semakin terpuruk. Hingga di negeri *gemah ripah loh jinawi* ini, muncul kelaparan dan gizi buruk. Yang tidak bisa lagi mengkonsumsi beras, kini makan nasi aking bahkan tiwil dari singkong.

Sebagai orang yang merasa pernah merintis, menyusun konsep dan strategi, membangun sarana dan pra sarana untuk menegakkan ketahananpangan negara, hati Humuntar kembali 'tersentuh' untuk segera turut berbuat. "Saya lalu mengajak teman-teman untuk membuat suatu lembaga dewan pangan," katanya.

Tak tanggung-tanggung. Semua elemen dirangkulnya. Ada dari kalangan politisi, pemerintah, pakar-pakar dari berbagai



BIODATA

NAMA : Ir. Humuntar Lumban Gaol
TEMPAT/TGL LAHIR : Tapanuli, 8 Januari 1938
AGAMA : Kristen Protestan
ALAMAT : Jalan Taman Duta II UF 23, Pondok Indah Jakarta Selatan
NAMA ORANG TUA : Lodewik Lumban Gaol
STATUS : Berkeluarga dengan enam anak
NAMA ISTRI : Mari Siregar. Lahir 9 Mei 1943
NAMA ANAK : (1) Eva Natalie Lumban Gaol, DBA (lahir 19 Desember 1967) (2) Febrina Lumban Gaol, SE. (lahir 24 Februari 1969) (3) Daniel Lumban Gaol, SE (lahir 11 Februari 1970) (4) Henry Lumba Gaol SE (lahir 26 Mei 1971) (5) Ir Roberto Lumban Gaol SE (lahir 24 November 1974) (6) Ir Rosari Magdalena Lumban Gaol, S.H (lahir 13 Maret 1979)

PEKERJAAN PANGKAT : Pensiunan Pegawai Negeri
 : Pembina Utama Muda/IV E

PENDIDIKAN : Tahun 1951 Tamat SD, Tahun 1954 Tamat SMP, Tahun 1957 Tamat SMA, Tahun 1964 Tamat Sarjana Pertanian, dari UGM

PEKERJAAN: Di Dunia Usaha, Direktur Utama PT Gerbang Wida Nusantara, Presiden Komisaris PT Saferto Adhimanta, Komisaris PT Foresta Taranstek **Di Pemerintahan**, Staff Produksi BPU, Perusahaan Perkebunan Dwikora, Sumatera Barat. April 1965-Juni 1966, Pemimpin Proyek Pemasaran BPU Perusahaan Perkebunan Dwikora Sumatera Barat. Juli 1966- Mei 1968, Kepala Sub. Bagian Penelitian dan Analisa Perkembangan dan Penggunaan Produksi Nasional dan diperbantukan SPRI Menteri Keuangan, Departemen Keuangan Juni 1970, Sebagai Officials Masalah-Masalah BIMAS, Pengadaan Beras, Tim PL- 480 oleh Menteri Keuangan 27 Februari 1970, Kepala Bagian Penelitian dan Counterpart pada Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Juli 1972, Kepala Bagian Penelitian dan Konterpan pada Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Oktober 1974, Kepala Bagian Evaluasi Teknis Ekonomis Sekretaris Direktorat Jenderal Monitor, Departemen Keuangan Oktober 1974, Direktur Urusan Pangan dan Penerimaan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Monitor Dalam Negeri, Departemen Keuangan 29 Agustus 1978, Asisten III Menko Ekuin dan Pengawasan Pengawasan Bidang Produksi, Distribusi dan Kependudukan Maret 1984, Diperbantukan sebagai Staff Ahli Kepada Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan Februari 1989, Inpektur Jenderal Pembangunan Bidang Pembangunan Desa Tahun 1994-1998, Pesiun Tanggal 8 Januari 1998

TANDA-TANDA PENGHARGAAN: Bintang Jasa Utama, Satylancana Karya Satya XX Tahun, Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia

HOBBY: Catur, golf, membaca buku-buku tentang Ilmiah ekonomi, pertanian dan politik dll.

disiplin ilmu, kemudian juga merangkul dari kalangan petani. Padahal diantara mereka pro dan kontra itu datang. "Membang saya mengumpulkan orang-orang yang sedang berselisih itu. Biarlah kita berantem dalam satu forum. Kita boleh saling maki-makian, tapi saya berharap setelah keluar nanti akan keluar satu pendapat," lanjutnya.

Dengan cara itu, Humuntar setidaknya berharap agar mereka tidak perlu terlalu banyak bicara, tapi berbuat. Lebih jauh lagi, suami Mari Siregar ini berpikir, 60 hingga 65% rakyat, kehidupannya tergantung dari beras. Produksi beras, ini berkaitan antara petani, pengusaha pupuk, pengusaha bibit, transportasi, pergudangan, lalu pedagang. Banyak elemen yang terlibat dalam komoditi beras. Jika elemen komoditi ini terganggu kehidupannya, maka ekonomi akan terganggu bahkan bisa hancur. Namun sebaliknya, jika elemen masyarakat ini semakin membaik, masyarakat akan tenang, sehingga daya beli meningkat.

Dewan Beras itu kini sedang dirintisnya, bersama dengan Siswono Yudhohusodo, Didik Rachbini (ekonom dan anggota DPR), Beni Pasaribu, dan lain-lain. Kemudian nanti akan dibuat lagi Dewan Beras di tingkat propinsi dan kabupaten-kabupaten. Kendati program-programnya belum dirumuskan secara detail, pria yang hobi membaca ini

mengaku optimis, upayanya akan membuahkan hasil, apalagi didukung sistem otonomi daerah.

Obsesinya

Humuntar memang tak pernah mau diam. Ia sadar, sebagai seorang pensiunan ia tak bisa menyalurkan pikiran-pikirannya. Namun, ia pun tak mau bernostalgia dengan kejayaan masa lalu.

"Saya selalu melihat ke depan. Namun, pengalaman masa lalu sebagai referensi untuk maju di masa depan," ujarnya.

Pria yang sudah berjiwa *entrepreneur* sejak kuliah ini mengakui, masih banyak orang pintar yang berpengalaman, yang kini sudah pensiun. Tapi, pengalaman dan pengetahuan mereka setelah tidak menjabat apa-apa, tidak ada yang mendengar dan memanfaatkan lagi. Sehingga ia merasa perlu memberi 'wadah' untuk mereka bisa berkiprah lagi membangun bangsa ini.

Berjuta-juta mimpi dan cita-cita yang digantungkannya setinggi langit, akan berupaya untuk diwujudkan. Namun, sebagai seorang Kristen Protestan yang taat, Humuntar percaya hanya Tuhan yang bisa menentukan. "Jadi, saya tidak akan merasa kecewa atau kesal jika saya sudah berupaya tapi tak jua saya dapatkan. Yang sudah saya dapatkan itu saya anggap sebagai hasil dari kemampuan yang saya miliki," ujarnya lirih. ■ **HOT, WE, AD**



PKS-GOLKAR SALING INTIP

Partai Keadilan Sejahtera mulai membuat jarak dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa?

Tak ada persekutuan yang abadi. Bagi PKS yang didukung kelompok Muslim patuh (*the Muslims loyalist*), lantaran kasus impor beras, persekutuannya dengan pemerintahan SBY mulai retak. PKS menentang kebijakan impor beras, berada satu *front* dengan PDIP, kekuatan oposisi yang selalu dicemaskan SBY. Sikap agresif kedua partai itu—mengirim tim investigasi ke Vietnam—untuk melacak “keanehan” dalam kasus impor beras, menimbulkan kekusaran di kubu SBY. Partai idola kawala muda ini tak terlalu peduli dengan keamanan tiga kursi menteri di kabinet SBY.

Agaknya SBY masih ingin mempertahankan PKS untuk memperkuat kubunya. Sebab ketika Partai Golkar—rekan tak seiring di tubuh pemerintah—mendesak pencopotan dua menteri dari PKS, SBY tak menggubrisnya. Sebaliknya, meskipun partainya (PKS) mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintah, Menteri Pertanian Anton Apriantono memilih tetap bergabung di dalam kabinet SBY. Dan dua menteri PKS lainnya, Meneg Perumahan Yusuf Asyari dan Meneg Pemuda dan Olahraga Adhityaksa Dault, mengambil sikap serupa.

PKS bersekutu dengan SBY pada pemilihan presiden putaran kedua, setelah Capres Amien Rais menolak apa yang disebutnya *political incest* (perkawinan politik sedarah) antara PAN dan PKS. Saat itu (September 2004), SBY harus menarik dukungan dari partai-partai kecil, karena

tidak mungkin mendekati Golkar, PDIP, PAN dan PPP yang mengajukan calon-calon mereka sendiri. Manuver PKS menjadi agak terbatas, setelah partai pemenang Pemilu legislatif 2004, Golkar di bawah pimpinan Wapres Jusuf Kalla, bergabung dalam pemerintahan SBY.

Perubahan orientasi politik PKS, menjaga jarak dengan pemerintah, agaknya tidak diperhitungkan dengan sangat matang. PKS, kalau memang konsisten membela kelompok mayoritas seperti yang dilakukan kepada para petani, mestinya menolak kenaikan harga BBM (1 Oktober 2005) yang sungguh-sungguh mencekik leher rakyat berpenghasilan rendah. Apalagi kenaikan waktu itu diluncurkan ketika kaum Muslim memasuki bulan puasa.

Memang tidak hanya PKS. Juga partai-partai lain; Demokrat, Golkar, PPP, PBB, PKB dan PAN, yang mendukung kebijakan tersebut, sungguh tidak termaafkan. Kehidupan ekonomi rakyat kecil morat-morut akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, rata-rata 128 persen, kedua dalam tahun 2005. Kenaikan pertama, rata-rata 30 persen, dilakukan 1 Maret.

Tak satu pun fraksi pendukung kebijakan SBY, mengoreksi besaran kenaikan yang sangat tinggi tersebut. Akibatnya, laju inflasi selama 2005 meroket sampai 18,38%, angka inflasi tertinggi pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Tekanan defisit anggaran dan laju inflasi telah memaksa Bank Indonesia, dua kali menaikkan suku bunga pada jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Ini memaksa sektor

moneter, perbankan dan bisnis, mengalami *set back*, dan langkah pemulihan krisis ekonomi berjalan mundur. Dampak kenaikan harga BBM tersebut masih terasa sampai saat ini, tidak hanya oleh sektor rumah tangga, tetapi juga transportasi, industri, listrik dan lapangan kerja.

Sebagaimana kepada SBY, rakyat juga mengandalkan PKS untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang terpuruk. Tetapi langkah politik PKS cenderung meleset, tidak tepat sasaran. Justru ketika PKS menolak impor beras, harga beras di dalam negeri melonjak, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tak mampu menjangkaunya. Harga beras kualitas nomor dua ke bawah, pernah mencatat Rp 5.000 sampai Rp 4.000 per liter. Tadinya, antara Rp 3.500 sampai Rp 2.500 per liter. Tak ada lagi beras Taskin yang berharga Rp 1.000 per liter.

Lonjakan harga beras, kebutuhan pokok seluruh rakyat, memicu inflasi, sehingga laju inflasi tinggi akhir 2005 belum bergeser terlalu berarti. BI harus kembali bekerja keras untuk menekan laju inflasi, dan satu-satunya jalan; mengerem uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga SBI.

Sayangnya, langkah-langkah penting PKS, baik menyetujui kenaikan harga BBM, maupun menolak impor beras, sama-sama berdampak negatif bagi kepentingan kelompok mayoritas penduduk berpenghasilan rendah dan jutaan penganggur.

Ketika PKS memutuskan bersekutu dengan Capres SBY, Golkar yang masih dipimpin Akbar Tandjung, melancarkan manuver politik untuk menghadang pemerintahan SBY-MJK. Akbar dan Megawati, pucuk pimpinan PDIP, sepakat membangun koalisi “oposisi” kebangsaan bersama PDIP.

Namun hanya terhitung bulan, kepemimpinan Golkar beralih dari Akbar ke JK. Sudah tentu, ini membawa konsekuensi pergeseran visi dan orientasi Golkar—dari oposisi ke pendukung pemerintah. Agaknya, masuknya Golkar di pemerintahan, membuat PKS, pendukung utama kekuatan reformasi, merasa gerah.

Soalnya, sebagai kekuatan politik—*status quo* terbesar, Golkar berupaya “mengkang” saingannya, baik di luar maupun di dalam pemerintahan. Saingan terselubung (*the covered competition*) antara PKS dan Golkar sesama “anggota tubuh” pemerintah, sudah tentu meresahkan SBY.

Karena itu, tidak mudah bagi SBY melepas PKS, sama tidak mudahnya merangkul Golkar. ■ SH



PERMADI

RUU Penasihat Presiden

PANSUS DPR yang membahas usul inisiatif RUU tentang Pembentukan Badan Penasihat Presiden tengah mempertimbangkan tiga opsi untuk pembentukan Badan Penasihat Presiden.

Opsi pertama, segera membahas dan menetapkan RUU itu menjadi UU dengan segera mengintegrasikan tim penasihat yang ada saat ini. *Opsi kedua*, sekalipun RUU sudah ditetapkan, pengintegrasian dengan tim penasihat yang dipilih Presiden SBY harus menunggu berlakunya secara efektif UU itu setelah setahun.

Opsi ketiga, menunda terbentuknya Badan Penasihat Presiden hingga Pemilu 2009.

Menurut Wakil Ketua Pansus, Permadi (F-PDIP), opsi itu didasarkan atas begitu banyak dan bervariasi materi RUU yang masuk ke Pansus sehingga pembahasannya perlu dilakukan secara mendalam. ■



SARWONO KUSUMAATMADJA

Wapres Minta DPD Taati Konstitusi

WAPRES Jusuf Kalla meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menaati konstitusi meski ada ketidakpuasan peran lembaga perwakilan baru ini dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Wapres, konstitusi dalam sejarah Indonesia bukan sesuatu yang sakral tetapi dinamis dan terbuka untuk perubahan sesuai tuntutan zaman.

“Kita puas atau tidak puas, tetapi kita harus taat kepada konstitusi,” ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka seminar nasional “DPD dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia” di Gedung DPR/MPR, Jakarta (2/3).

Informasi lain menyebutkan, Sidang Paripurna DPD (3/3) menerima rekomendasi Pansus Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) DPD ihwal calon perorangan dari partai lokal dalam Pilkada di NAD. Rekomendasi DPD itu disampaikan ke Pansus RUU PA DPR.

“Adanya calon perorangan adalah pemberian kesempatan kepada figur yang tidak terakomodasi melalui partai politik,” ujar Ketua Pansus RUU PA DPD, Sri Kadarwati.

Terkait kiprah konkret lembaga yang diketuai Ginandjar Kartasasmita ini, Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD Sarwono Kusumaatmadja (25/2) mengatakan, pihaknya selama 2006 ini akan memperjuangkan enam RUU.

“Jatah Panitia Adhoc II ada enam RUU yang diperjuangkan. RUU tersebut berkaitan dengan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam,” ujarnya. Keenam RUU itu di antaranya RUU Pelabuhan, RUU Penanaman Modal Lembaga Keuangan Mikro, RUU Kelistrikan, dan RUU Pertanian. ■ AP, SP

KALANGAN anggota DPR meyakini adanya persaingan tidak sehat antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menseskab Sudi Silalahi. Kalau dibiarkan, situasi ini akan sangat mengganggu kinerja kabinet atau pemerintahan. Karena itu Presiden SBY diminta mengatur *job description* yang jelas dan menertibkan administrasi di lingkungan kantor Presiden, termasuk



YUSRIL IHZA MAHENDRA

Setneg dan Setkab Dilebur?

kemungkinan melebur lembaga Setkab ke Setneg.

“Saya lihat ada hubungan yang tidak beres di antara dua orang ini (Yusril dan Sudi). Semacam persaingan tidak sehat,” ujar anggota DPR Ade Daud Nasution (F-PBR) di Jakarta. Hal senada juga dikemukakan Mahfud MD (F-PKB) dan Yuddy Chrisnandi dari F-PG. ■



SUDI SILALAH

REPR/INDO/POS

ULANG TAHUN KOSTRAD KE-45

Si Baret Hijau Ingin Wujudkan Profesionalisme

Sebagai pasukan pemukul terdepan satuan Kostrad terus mengasah kemampuannya. Dengan dukungan alat utama sistem senjata, Kostrad tetap ingin wujudkan profesionalisme.

Senin (6/3) lalu, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memperingati hari ulang tahunnya ke-45. Peringatan HUT Kostrad itu dilaksanakan di Markas Divisi Infantri-1 Cilodong, Jawa Barat. Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso.

Dalam amanat singkatnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, 45 tahun sudah satuan Kostrad lahir dan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara bersama rakyat di berbagai medan tugas di seluruh pelosok tanah air. Kostrad dibentuk dan diarahkan sebagai satuan pemukul yang tangguh untuk menumpas segala unsur gangguan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara. Dalam tugasnya, Kostrad telah memberikan sumbangsih dalam menunjang keberhasilan pembangunan bangsa.

Hal itu secara umum dapat dijadikan pertanda bahwa segenap prajurit jajaran Kostrad telah melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya. Namun, rasa syukur tersebut harus diikuti dengan tekad yang kuat, meningkatkan kemampuan guna mempersiapkan diri menjawab tantangan tugas di masa depan. Mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mungkin dihadapi di masa depan harus disiapkan sekarang dalam bentuk pencegahan, melalui startegi penangkalan. Kesatuan operasional yang tangguh, disiplin yang tinggi dan terlatih dengan baik merupakan andalan Kostrad dalam mewujudkan kemampuannya. "Maka, agar itu bisa terwujud, haruslah berlatih, berlatih dan teruslah berlatih. Sehingga jika saatnya kalian digerakkan untuk tugas-tugas pertempuran atau tugas-tugas lainnya, kalian sudah siap," pesannya.

Tantangan profesional yang dihadapi dalam perkembangan dunia yang begitu cepat adalah bagaimana memadukan tugas-tugas yang perlu didukung oleh suatu sistem yang kohesif, disiplin terlatih dan mampu bereaksi cepat dalam suatu keadaan darurat. Untuk menjawab tantangan menurut Djoko setiap prajurit harus meningkatkan kemampuan diri. "Setiap prajurit Kostrad haruslah mampu mewujudkan kemampuan diri sebagai pejuang yang profesional, bermoralitas tinggi, berdedikasi, loyal dan tangguh serta handal dalam setiap penyelesaian tugas," katanya. Untuk itu menurut Djoko, titik beratnya adalah pada aspek manusia dengan tidak mengabaikan modernisasi di bidang peralatan dan alat utama sistem senjata yang dimiliki.

Pada kesempatan tersebut KSAD juga menganugerahkan tiga bintang Satya Lencana Kesetiaan. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun diberikan kepada, Herlansyah, Prajurit Kepala. Satya





FOTO: FOTO.DOK.BERINING

Penyematan Bintang Satya Lencana Kesetiaan oleh KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso

Lencana Kesetiaan 16 tahun kepada Roland Sirati, Sersan Kepala dan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun kepada Hendra Suriaman, Kapten Infantri.

Upacara peringatan hari ulang tahun tersebut juga dimeriahkan dengan demonstrasi terjun payung yang dilakukan oleh para penerjun dari berbagai kasatuan TNI, termasuk penerjun dari Brimob Polri. Juga atraksi beladiri yang terdiri dari berbagai kesatuan yang ada dalam Kostrad.

Ulang Tahun ini dihadiri para mantan Panglima Kostrad seperti, Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Aris Munandar, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo serta beberapa tamu undangan lainnya.

Sejarah Kostrad

Kostrad yang merupakan singkatan dari Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat, adalah bagian dari Bala Pertahanan Pusat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.

Cikal bakal Kostrad berawal ketika muncul sengketa dengan Belanda mengenai status wilayah Irian Barat pada tahun 1960. Kostrad kemudian dibentuk pada 6 Maret 1961 bernama Korra-I/Caduan, berdasarkan surat keputusan Men/Pangad No. ML/KPTS 54/3/1961. Sebagai kesatuan yang paling muda, Kostrad merupakan inti kekuatan Komando Mandala (Operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat). Kemudian berganti nama menjadi Kostrad pada tahun 1963.

Orang pertama yang menjabat sebagai Panglima Kostrad adalah Mayor Jenderal Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden RI kedua). Selama masa Orde Baru, Korps baret hijau ini tidak pernah absen dari berbagai operasi militer di Indone-



Kostrad yang kini dipimpin oleh Letjen TNI Hadi Waluyo tetap ingin wujudkan profesionalisme.

sia. Seperti G-30-S/PKI, Operasi Trisula, PGRS (*Sarawak People's Guerrilla Force*) di Sarawak, PARAKU (*North Kalimantan People's Force*) di Kalimantan Utara dan Operasi Seroja di Timor Timur. Kostrad juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda ke Mesir (1973-1978) dan Vietnam (1973-1975) serta dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam perang Iran-Irak antara tahun 1989 dan 1990.

Tahun 1984, Pangkostrad bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI dalam operasi-operasi pertahanan dan keamanan. Sekarang ini Kostrad memiliki kekuatan pasukan sekitar 35.000 sampai 40.000 tentara dengan dua divisi infantri yaitu Divisi Satu yang bemarkas di Cilodong, Jawa Barat dan Divisi Dua yang bemarkas di Malang Jawa Timur. Setiap divisi memiliki brigade lintas udara dan brigade infantri. Kini, Kostrad dipimpin oleh Letjen TNI Hadi Waluyo. ■ Sb



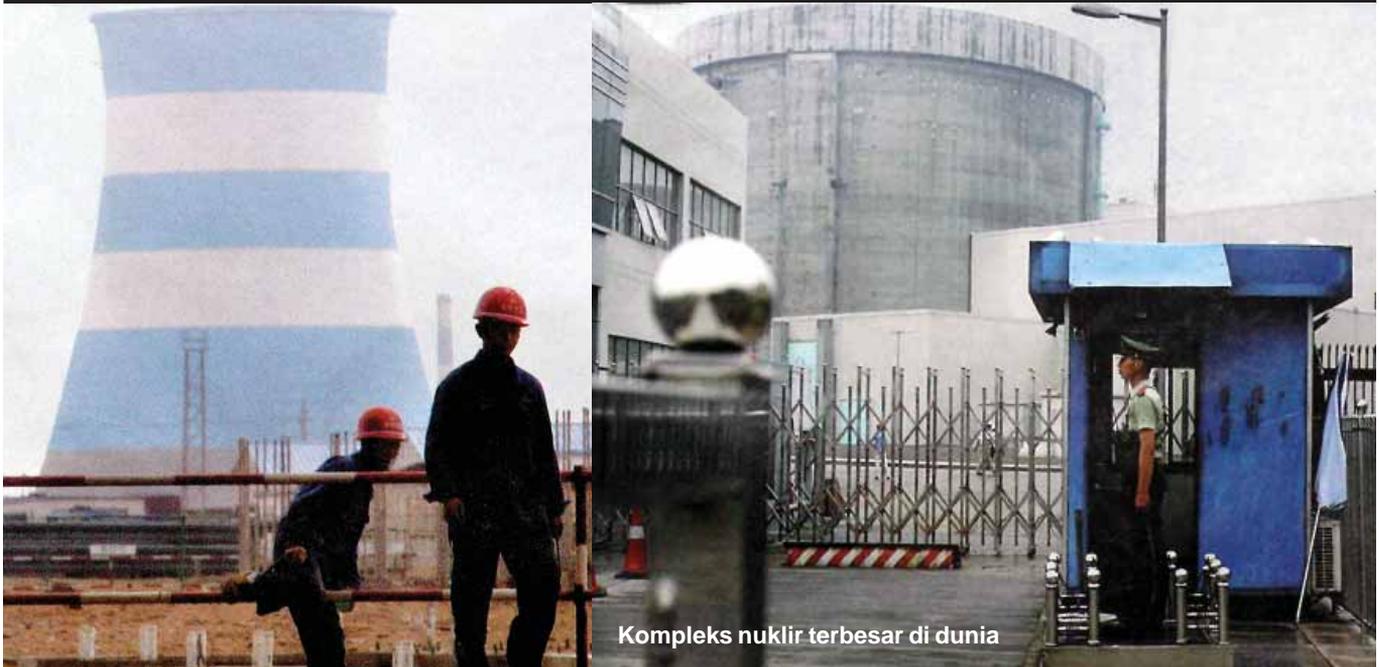
Poco-poco selepas apel

PANGKOSTRAD DARI MASA KE MASA

1.	Mayjen TNI Soeharto	1961-1965
2.	Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma (alm)	1965-1967
3.	Mayjen TNI Kemal Idris	1967-1969
4.	Brigjen TNI Wahono	1969-1970
5.	Mayjen TNI Makmun Murod	1970-1971
6.	Mayjen TNI Wahono (alm)	1971-1973
7.	Mayjen TNI Poniman	1973-1974
8.	Mayjen TNI Himawan Sutanto	1974-1975
9.	Mayjen TNI Leo Lopulisa	1975-1978
10.	Mayjen TNI Wiyogo Atmodarminto	1978-1980
11.	Mayjen TNI Ismail	1980-1981
12.	Mayjen TNI Rudini	1982-1983
13.	Letjen TNI Suweno (alm)	1983-1986
14.	Letjen TNI Supto	1986-1987
15.	Letjen TNI A. Sahala Rajagukguk (alm)	1987-1988
16.	Mayjen TNI Sugito	1988-1990
17.	Mayjen TNI Wismoyo Arismunandar	1990-1992
18.	Mayjen TNI Kuntara	1992-1994
19.	Letjen TNI M. Tarub	1994-1996
20.	Jenderal TNI Wiranto	1996-1997
21.	Letjen TNI Sugiono	1997-1998
22.	Letjen TNI Prabowo Subianto	1998
23.	Letjen TNI Johnny Lumintang	1998
24.	Letjen TNI Djarni Chaniago	1998-1999
25.	Letjen TNI Djaaja Superman	1999-2000
26.	Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (alm)	2000
27.	Jenderal TNI Ryamizard Rycudu	2000-2002
28.	Letjen TNI Bibit Waluyo	2002-2004
29.	Letjen TNI Hadi Waluyo	2004-sekarang

CHINA MELONCAT KE DEPAN

REPUBLIK RAKYAT CHINA SEDANG MEMBANGUN KOMPLEKS NUKLIR TERBESAR DI DUNIA.



Kompleks nuklir terbesar di dunia

Pengusaha Amerika Edwin deSteiguer Snead berkunjung ke China, mencari masa depan bagi pembangkit tenaga nuklir. Dia sangat yakin akan menemukannya. Pada suatu hari yang sangat dingin, Snead meluncur menuju sebuah zona militer barat Daya Beijing, tidak jauh dari salah satu kawasan ternama China, Great Wall (dinding besar).

Di lobi raksasa sebuah bangunan beton yang ditempati oleh pusat kontrol reaktor nuklir, terletak di sebuah dataran tinggi. Ilmuwan nuklir Chang Wei menunjuk sebuah model reaktor, tampak seperti tungku perapian yang di tengahnya terbelah. Dia menjelaskan tentang rancangan bangun—termasuk 27.000 ball uranium yang dibungkus kuat dengan karbit silikon, keramik dan grafit—secara fisik membuat tidak mungkin bagi reaktor tersebut untuk melakukan sesuatu, tetapi akan ditutup bilamana terjadi masalah; bahan uranium berbahaya akan terperangkap di dalam bola-bola, yang memiliki tingkat peleburan jauh lebih panas dari suhu yang bisa dicapai di dalam pembangkit tersebut.

“Ijinkan saya melihatnya apakah saya bisa menggambarkannya di dalam ba-

hasa Inggris aksen Texas,” kata Snead, 76, seorang pengusaha yang berencana membangun sebuah pusat pembangkit tenaga nuklir di kawasan seluas 25 hektar di Texas, kepada majalah *Newsweek* (6/2).

“Apakah tidak akan meledak atau melebur?” tanya Snead. Chang mengangguk. Selanjutnya, dia menjelaskan bagaimana rancangan tersebut hanya membutuhkan sebuah ruang kontrol, kebutuhan sebuah pembangkit yang lebih konvensional. Snead, rupanya terkesan, mengakui mungkin teknologi baru China itu menjadi kunci untuk menghilangkan kecemasan Amerika terhadap nuklir. Dia ingin pulang dan menjual gagasan tersebut kepada Universitas A&M Texas atau perguruan tinggi yang mau mendukung sebuah pusat penelitian. “Saya pikir Amerika akan membeli pusat pembangkit tenaga nuklir dari China dalam lima tahun mendatang,” kata Snead.

Sementara para pakar di AS dan Eropa berbicara tentang penghidupan kembali rencana bagi tenaga nuklir. China, juga dalam banyak bidang lain, sedang memacu ke depan.

China—berencana membangun 30 PPTN—memasuki era tenaga nuklir tahun 1991, jauh di belakang Inggris

JUMLAH PPTN DAN PASOKAN LISTRIK:

Negara	Jumlah PPTN	Pasokan Listrik
AS	104	20%
Prancis	59	78%
Jepang	56	30%
Russia	31	16%
Inggris	23	19%
Korea Selatan	20	38%
Kanada	18	15%
Jerman	17	32%
India	15	3%
China	9	2%

(1956), Prancis (1959), AS (1960), Jerman Barat (1961), Kanada (1962), Italia (1963), Jepang (1963), India (1969), dan Pakistan (1971).

Para insinyur di fasilitas riset di luar kota Beijing sedang berusaha menciptakan versi generasi baru yang menggunakan helium, bukan air, sebagai pendingin. Pusat riset tersebut dikelola oleh Institut Nuklir dan Teknologi Energi Baru Universitas Tsinghua, Beijing, bekerjasama dengan MIT dan Chinergy, sebuah perusahaan milik institut tersebut dan mitranya, sebuah perusahaan milik pemerintah, China Nuclear Engineering Group. ■ **NEWSWEEK-SH**

MARI BERSAHABAT

KETIKA PRESIDEN GEORGE W. BUSH MENDARAT DI NEW DELHI PEKAN INI, INDIA DAN AS BERHARAP MEMBUKA SEGEL PERALIHAN PERANG DINGIN DARI MITRA ANTAGONIS MENJADI MITRA STRATEGIS.



Jika Anda menginginkan cuplikan perubahan dunia, lihatlah foto-foto upacara Mei lalu di Moskow untuk menandai peringatan ke 60 berakhirnya Perang Dunia II. Pada pertemuan para pemimpin dunia tersebut, Jerman berjabat tangan dengan Prancis, Jepang dengan Inggris, dan Presiden Amerika mengajak mitra Rusianya berdiri di bawah bendera ber lambang palu dan arit, di depan patung Lenin.

Dalam PD II, India merupakan sekutu Uni Sovyet. New Delhi dan Washington mendukung pihak-pihak yang berbeda di dalam perang kemerdekaan Bangladesh; selama pendudukan Sovyet di Afganistan, di mana AS dan Pakistan mempersenjatai kelompok perlawanan Mujahidin, India mendukung kebijakan

Moskow di Afganistan. Dan AS mencemaskan percobaan nuklir India tahun 1998, di saat New Delhi meledakkan tiga bom nuklir di gurun Rajasthan. Kemudian disusul percobaan nuklir oleh Pakistan, dan AS mengenakan sanksi kepada kedua negara.

Mantan Dubes AS di India, Robert Blackwill mencatat di dalam pidato perpisahan di New Delhi, 2003: "India tidak dianggap Washington sebagai bagian dari solusi penting dan kooperatif bagi masalah-masalah utama internasional. India salah satu dari problem tersebut—pembangkang nuklir yang kebijakan-kebijakannya mengancam kesepakatan tidak menyebarkan senjata nuklir".

Namun di dalam kunjungannya ke New Delhi, pekan lalu, Bush menandatangani kerjasama nuklir dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh. Mereka menyebutnya sebagai kesepakatan bersejarah yang menjadi landasan kemitraan strategis yang baru antara kedua negara. Kesepakatan tersebut merupakan hasil perundingan intensif selama 8 bulan. Kerjasama tersebut sekaligus mencabut sanksi yang melarang India berbagi teknologi nuklir dengan negara manapun sejak tiga dekade yang lalu. AS juga menghapus sanksi sementara terhadap India yang melakukan percobaan nuklir tahun 1998.

Bush akan berusaha memperoleh persetujuan Kongres AS dan 45 negara anggota Kelompok Pemasok Nuklir supaya membantu India di dalam teknologi nuklir sipil. Bush mengakui upaya tersebut bukanlah perkara mudah.

Bush meminta pengertian Kongres karena dengan terwujudnya nuklir sipil India juga menyangkut kepentingan ekonomi AS. "Tenaga nuklir sipil India bisa membantu mengurangi tekanan permintaan energi dunia," kata Bush.

Kunjungan Bush di India mengundang protes puluhan demonstran di Mumbai. Kelompok kiri mengeritik keras kerjasama nuklir India-AS. Karena, kata mereka, kerjasama tersebut membuka jalan bagi AS untuk mencampuri urusan dalam negeri India. "Hari ini merupakan hari yang sangat memalukan dalam sejarah India," kata Shambhu Shrivastava, jubiir partai sosialis Samata. ■ NEWSWEEK, AP, AFP, SH

IRAN CARI SIMPATI M'SIA

AS mendukung program nuklir sipil India, tetapi membawa ke DK-PBB rencana pengembangan nuklir Iran.

Ingat pengusiran Raja Iran Reza Pahlevi oleh pasukan Imam Khomeini tahun 1980-an? Kemenangan Khomeini dan kekalahan Pahlevi, berdampak pada penyanderaan ratusan warga AS di Iran selama berbulan-bulan. Sejak itu AS memandang Iran sebagai musuh, dan demikian sebaliknya.

AS berhasil membujuk negara-negara besar untuk membawa masalah pengembangan tenaga nuklir Iran ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA). AS mengabaikan alasan Iran bahwa nuklir yang dikembangkannya hanya untuk pembangkit tenaga listrik.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menegaskan bahwa negaranya berhak mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. "Negara saya sudah memilih jalannya sendiri. Kami tidak ingin bentrok dengan negara manapun, tetapi kami mampu mempertahankan diri," kata Ahmadinejad setelah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dalam kunjungan tiga harinya di Kuala Lumpur.

Namun demikian Ahmadinejad menambahkan, negaranya terbuka untuk setiap perundingan. Katanya lagi: "Kami siap berunding dalam segala hal. Tetapi kami tidak mau berunding soal hak kami yang tidak bisa diganggu-gugat."

Sikap Iran itu mendapat dukungan Malaysia selaku ketua OKI dan GNB, masing-masing beranggotakan 57 dan 100 negara. "Kami masih memegang prinsip bahwa kesepakatan nuklir untuk tujuan damai sesuai kesepakatan Non-proliferasi masih diijinkan," kata Menlu Malaysia Syed Hamid Albar.

Untuk kasus Iran, ada perbedaan pendapat antara AS dan Uni Eropa, tetapi Malaysia berharap masalah itu bisa diselesaikan lewat dialog. AP, AFP, IP, SH



PERDA TERBIT, PSK TERBIRIT-BIRIT

Perda No.8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran dinilai multitafsir. Namun Pemda Kota Tangerang bersikukuh tetap memberlakukan.

"Setiap orang yang sikap atau prilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau di tempat lain di daerah".

Itulah bunyi Pasal 4 ayat 1 Perda No.8/2005 yang diterbitkan Pemda Kota Tangerang, Provinsi Banten belum lama ini. Perda ini sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap menimbulkan multitafsir. Beberapa kalangan minta Perda ini segera direvisi dan bahkan ada yang mengusulkan segera dicabut. Namun pihak Pemda Kota Tangerang tetap bersikukuh memberlakukannya.

Latar belakang lahirnya Perda ini konon atas masukan yang berasal dari masyarakat Tangerang itu sendiri, yang peduli akan lingkungannya yang bersih serta bebas dari tempat maksiat. Ide ini muncul menyusul timbulnya kesadaran masyarakat yang peduli atas bahaya pelacuran yang bisa merusak generasi muda bangsa.

"Perda ini lahir atas usulan ibu-ibu dan warga masyarakat

serta berbagai majelis taklim yang ada di Kota Tangerang, yang sensitif dan terganggu dengan tempat-tempat pelacuran. Tidak ada diskriminasi, Tangerang bukan Los Angeles atau Tokyo. Ini kota yang mengusung misi besar *akhlakul karimah*," papar Wahidin Halim, Walikota Tangerang seperti diberitakan *Media Indonesia*, (7/3).

Sebelumnya, Sekda Kota Tangerang HM Harry Mulya Zein menegaskan, Perda ini sudah diuji dan dikonsultasikan dengan publik serta disetujui Mendagri (*Kompas*, 4/3). Perda ini akan diberlakukan di seluruh wilayah Kota Tangerang, termasuk Bandar Udara Soekarno-Hatta. "Kalau ada yang berciuman mengarah ke seksual akan ditangkap. Tidak peduli orang bule atau bukan," tegasnya.

Kendati Perda ini memberi

kewenangan kepada aparat untuk melakukan penertiban, namun sang Walikota mengingatkan kepada para petugas Polisi Pamongpraja Tangerang untuk tidak asal tangkap. Upaya penertiban hendaknya diarahkan ke wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi tempat mangkalnya para pelacur.

Alhasil, setiap perempuan yang dicurigai sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang sering mangkal menunggu pria hidung belang menjadi sasaran petugas. Perda ini membuat para PSK terbirit-birit. "Saya baru saja sampai, belum dapat tamu karena masih sore, baru pukul 20.00, eh... keburu ditangkap," kata salah seorang PSK yang berhasil di-jaring petugas.

Namun, ada juga orang yang salah tangkap. Seperti yang dialami para pengguna jalan yang sedang beristirahat minum teh botol di pinggir jalan dan ikut terkena razia. Mereka pun diadili dan dijatuhi hukuman padahal mereka bukan pelacur.

Nasib naas juga menimpa seorang guru SD Negeri Kota Tangerang, Lilis Lindawati (36). Ibu guru yang tengah hamil dua bulan ini ikut terjaring razia petugas ketika hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah dari tempat kerjanya.

Penderitaan Lilis semakin bertambah, karena sejak awal sampai persidangan selesai digelar ia tidak bisa menghadirkan sanksi untuk menyatakan bahwa dirinya bukan seorang pelacur. Hakim menghukum Lilis membayar denda Rp 300 ribu atau kurungan 8 hari. Semua itu ditolak mentah-mentah oleh Lilis yang bersikukuh dirinya tidak bersalah dan bukan seorang pelacur.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

menolak pemberlakuan Perda ini. Alasannya, Perda ini mempertontonkan ketidakpahaman pejabat publik atas prinsip-prinsip hukum dan penggunaan hukum sebagai sarana pengaturan domain publik. "Beberapa pasal yang ada dalam Perda itu jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan secara teknis yuridis dalam perumusan norma hukum," kata Yasmin Purba, Manajer Program Perempuan dan Anak pada Badan Pengurus YLBHI

sebagaimana diberitakan *Kompas* (7/3).

Purba juga menganjurkan warga masyarakat yang menjadi korban pemberlakuan Perda itu melakukan upaya hukum melalui mekanisme *class action*.

Ahli Hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji menganjurkan

Pemda Tangerang segera merevisi Perda tersebut. Sebab secara substansi maupun acara, Perda itu mengandung kekeliruan mendasar. Yakni bertentangan dengan peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Indriyanto menyatakan, pasal-pasal yang diberlakukan harus dibuat secara jelas dan tidak multitafsir.

"Suatu dakwaan atas pelanggaran sebuah aturan tidak boleh dilakukan karena prasangka, tetapi harus jelas dan tegas. Itu sebabnya dalam KUHP disebutkan barang siapa melakukan....," ujar Indriyanto.

Kendati bermaksud baik dan bermuatan pesan moral yang kuat –yakni untuk mencegah terjadinya pelacuran– Perda ini sebagaimana dikemukakan para pakar hukum nampaknya memang perlu direvisi. Sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir dan multiinterpretasi yang bisa merugikan kepentingan umum. ■ AM, SP



WAHIDIN HALIM



Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tangerang dengan bentangan spanduk.

SEKILAS INFO

Situs SBY Diserbu Cracker

Sejak hari pertama, situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah jadi sasaran cracker yang ingin menjebol dan menjahili. Kejahilan yang muncul mulai dari percobaan serangan Denial of Service (DOS), serangan melalui launch pad di Korea, hingga Cross Site Scripting (XSS). “Menurut data di web server saja, ada jutaan percobaan penyusupan. Belum termasuk data yang terdapat di catatan (log-red) perangkat Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS). Saking banyaknya, log IDS/IPS bisa buat screensaver seperti Matrix (film-red),” jelas I Made Wiryana, Ketua Tim Teknis pengembangan sistem untuk situs PresidenSBY.info.

Penduduk Dunia Capai 6,5 Miliar

Populasi penduduk dunia terus berlipat ganda dan diperkirakan telah mencapai angka 6,5 miliar, Minggu (26/2) pukul 05.16 WIB. Perkiraan ini adalah hasil analisis Pusat Program Internasional di Biro Sensus AS. Populasi sekarang adalah sekitar empat kali lipat dari populasi pada 1900. Jumlah tersebut lebih dari 3,5 kali lipat populasi pada awal abad ke-20 dan sekitar dua kali lipat jumlah penduduk dunia pada 1960. Meskipun ini adalah nilai perkiraan, tapi kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia diperoleh berdasarkan data-data yang mendukung. Laporan yang dikeluarkan lembaga tersebut pada Maret 2004 menyebutkan jumlah populasi penduduk dunia telah mencapai angka 6 miliar orang. Saat ini, rata-rata terjadinya kelahiran adalah 4,4 orang setiap detik.

Microsoft Siapkan 6 Versi Windows Vista

Microsoft Corp. berencana menyediakan enam versi sistem operasi terbarunya Windows Vista. Dari keenam versi Windows Vista, tiga di antaranya ditujukan untuk konsumen pribadi (Home Basic, Home Premium, dan Ultimate), dua untuk kalangan bisnis (Business dan Enterprise), dan edisi bongkar pasang untuk pasar yang terus berkembang. Versi yang diharapkan dapat menjadi populer di kalangan pengguna pribadi adalah Windows Vista Home Premium. Dengan sistem operasi tersebut, pengguna komputer dapat merekam dan melihat televisi berkualitas tinggi atau menulis dalam format DVD dan berbagai fungsi multimedia lainnya.

Chip RFID Hitachi Sebesar Debu

Baru-baru ini, Hitachi mengklaim telah membuat chip RFID paling kecil dan tipis saat ini. Hanya berukuran panjang dan lebar 0,15 milimeter serta tebal 7,5 mikrometer —lebih tipis sepuluh kali atau lebih dibandingkan selembar kertas— chip buatan perusahaan elektronika Jepang tersebut boleh dikatakan sedikit lebih besar dari sebutir debu.

Menggunakan antena eksternal, chip tersebut tergolong pasif. Sumber energinya memanfaatkan energi gelombang elektromagnet yang dipancarkan alat pembacanya.

“Dengan ukuran yang kecil, kami dapat membuat chip jauh lebih banyak dalam setiap lembar wafer silikon sehingga biaya produksinya lebih murah,” kata Tomiko Kinoshita, administrator penelitian di Hitachi. Karena dapat tersedia dalam jumlah yang banyak, penggunaannya pada produk-produk retail dan satuan, misalnya dokumen, menjadi lebih efisien.

Chip juga semakin mudah digunakan pada barang-barang kiriman, misalnya paket antarkota, sehingga dapat dilacak keberadaannya di lokasi-lokasi yang dilaluinya. Selain itu, dapat digunakan pula untuk menandai kupon hadiah, dokumen legal, atau sertifikat. Dengan biaya produksi yang murah, penggunaan RFID diharapkan juga semakin meluas dan tidak terlalu menambah beban operasional.

Penggunaan Chip RFID

RFID adalah suatu teknologi untuk mengidentifikasi dan melacak sebuah produk. Adapun produk-produk yang dirancang untuk bisa dilacak —bisa berupa mainan, peralatan elektronik, dan produk farmasi— harus ditanami semacam mikrochip Auto-ID. Dengan adanya microchip,

Sebagai perbandingan, gambar ini adalah RFID berukuran 0.4 x 0.4mm yang diluncurkan September 2003.

produk tersebut nantinya bisa dilacak menggunakan frekuensi radio.

Dengan microchip ber-antena yang disertakan pada suatu unit barang, perusahaan dapat mengidentifikasi sebuah produk. Microchip berbasis XML ini memiliki identitas yang terdaftar dalam suatu jaringan real time dan otonomis. Artinya jika produk tersebut dipindahkan dari perusahaan manufaktur ke perusahaan eceran, maka setiap pembaca frekuensi radio yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu (seperti pintu dermaga, truk pengiriman, gudang, rak toko, dan bagian check-out) dapat secara teliti memantau keberadaan produk itu.

Selain itu, jika seorang pelanggan mengambil barang dari rak toko, data produk secara otomatis dikirim kembali ke seluruh rantai suplai. Dengan teknologi ini, pelanggan dapat melakukan check-out hanya dengan mendorong kereta belanja mereka melalui sebuah pembaca label. Pembaca label akan mendeteksi semua produk yang ada di kereta belanja dan mendebet kartu debit atau kartu kredit pelanggan. Bagi perusahaan, selain dapat melakukan efisiensi logistik, sistem RFID juga memberikan informasi penting mengenai pola belanja seorang atau sekelompok pelanggan. ■

Setengah Lusin Bintang di Galaksi Bima Sakti Lahir Tiap Tahun

Tim peneliti dari Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics di Jerman telah mendapatkan bukti mengenai seberapa banyak bintang yang terbentuk di galaksi kita setiap tahun: yakni sekitar setengah lusin. Riset yang mereka lakukan juga menemukan bahwa ledakan bintang raksasa sebagai supernova di galaksi Bima Sakti, rata-rata terjadi setiap 50 tahun sekali. Penelitian yang didasarkan pada data dari satelit INTEGRAL milik Badan Antariksa Eropa (ESA) ini dipublikasikan dalam journal Nature awal Januari lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat dua orang puteri mantan presiden menjadi staf dan penasehatnya. Sebuah strategi politik.

Ini terobosan baru bagi seorang presiden RI, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama kali melakukannya. Adalah Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid dan Rachmawati Soekarnoputri, yang dipilihnya sebagai staf di Istana. Yang satu sebagai staf khusus, yang satu lagi sebagai penasehat presiden.

Bukan karena mereka itu perempuan yang menjadikan pengangkatan itu sangat

Direktur Wahid Institut, sebuah lembaga yang mengkaji bidang agama dan kemanusiaan, lalu Wakil Sekjen DPP PKB versi Gus Dur-Muhaimin dan jabatan barunya sebagai staf presiden. Ia bahkan dikabarkan ditawari posisi menteri. Namun menurut Yenny, orangtuanya tak mengizinkan jika ia menjadi menteri karena belum menikah. Alumnus Harvard University ini nantinya akan bertugas meliputi bagaimana menyampaikan pesan dan kebijakan presiden kepada berbagai macam konstituen.

Berbeda dengan Yenny yang menjadi staf khusus, Rachmawati, 55, diangkat sebagai penasehat presiden bidang politik. Pemilik nama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarnoputri ini akan bekerjasama dengan tim penasehat lain seperti TB Silalahi, Ali Alatas dan Dr Syahrir.



RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI

Dua Perempuan di Sisi SBY



YENNY WAHID

menarik untuk dicermati beberapa media. Toh negara memperlakukan perempuan sederajat dengan pria dan banyak perempuan pernah dan sedang jadi menteri. Persoalannya, kedua perempuan itu adalah puteri dua mantan presiden RI yang masing-masing punya karisma politik dan banyak pendukung sampai sekarang.

Yenny Wahid, 31, adalah puteri kedua dari empat bersaudara mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bagi Presiden SBY, Yenny tidak asing lagi karena sering mengiringi kampanye SBY pada Pemilu 2004 lalu. Ia diangkat sebagai staf khusus bidang komunikasi politik dan mendapat jabatan Eselon 1.

Dengan penunjukan itu, berarti Yenny memegang tiga jabatan saat ini. Sebagai

Strategi

Dipilihnya Yenny Wahid menimbulkan wacana. Ada dua hal yang sekaligus diraih Yudhoyono. Selain Yenny punya kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kalangan, menurut Indra J. Piliang, analisis Politik CSIS, dalam artikelnya di *Koran Tempo*, 2 Februari 2006. Pemerintah SBY juga memelihara hubungan konstituen dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pengalaman Yenny selama menjadi Staf Khusus Presiden Abdurrahman Wahid sangat dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Yenny adalah anak emas Gus Dur, baik secara politis, ideologis maupun biologis.

Namun, seperti dikutip *Forum Keadilan*, 12 Februari 2006, Sekjen DPP PKB M. Lukman Edy memiliki pandangan lain. Bergabungnya Yenny di istana menjadi bukti konkret pengakuan pemerintah terhadap DPP PKB Pimpinan Gus Dur-Muhaimin. Sementara Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB mengatakan, PKB bukan Yenny. Penunjukan itu merupakan urusan pribadi dan PKB tetap akan kritis pada pemerintah.

Rachma mengaku sudah diminta ke siapannya jauh-jauh hari. Ia menyangkal anggapan dipilihnya ia sebagai penasehat presiden karena ia menentang sikap oposisi sang kakak, Megawati.

Selama ini, Rachma dikenal sering

berseberangan pendapat dengan kakak kandungnya, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketiga puteri Soekarno yakni Megawati, Rachmawati dan Sukmawati memang dikenal memiliki pandangan politik yang berbeda.

Dalam beberapa pernyataannya, Rachma sering mengkritik PDI Perjuangan yang memilih jalur oposisi. Menurutnya, ajaran Bung Karno hanya mengenal *critical cooperation* (kerjasama kritis) bukan oposisi. Karena banyak berbeda pandangan dengan Mega, pendiri Universitas Bung Karno ini menyebut dirinya anak ideologis Bung Karno, sedangkan Mega hanyalah anak biologis sang Proklamator.

Meski belum memiliki pengalaman birokrasi pemerintahan, ia dikenal gencar mengkampanyekan pemikiran Bung Karno. Sedari kecil, ia memang paling dekat dengan Bung Karno.

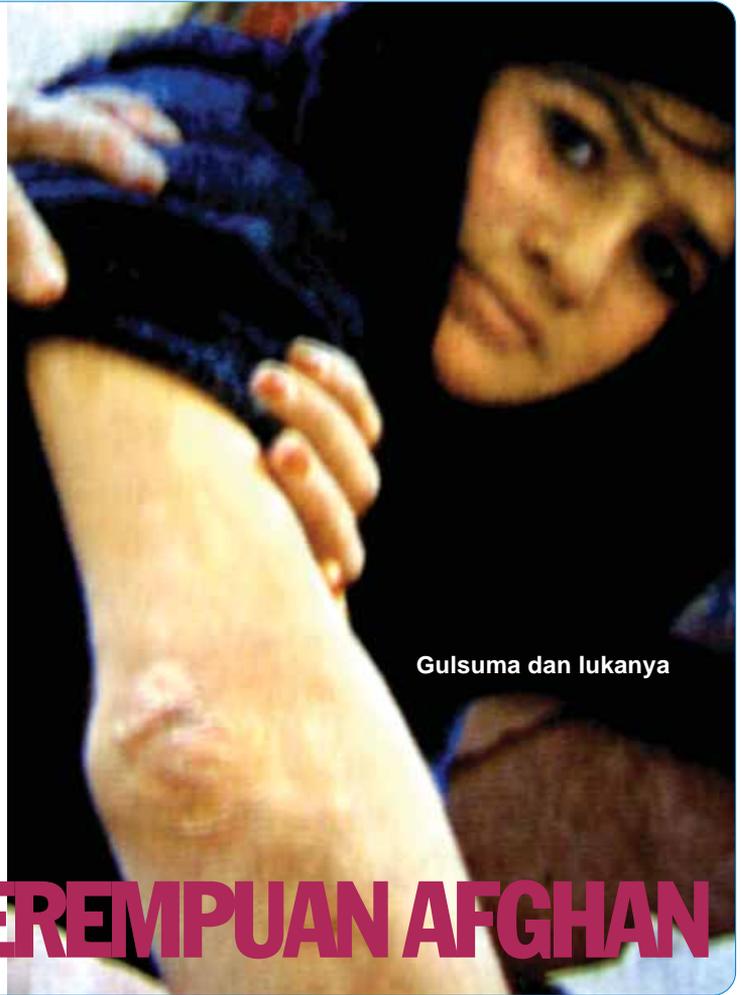
Rachmawati belum resmi menjalankan tugas barunya itu. Pelantikannya masih menunggu selesainya pembahasan RUU tentang penasehat presiden menjadi UU. Saat ini RUU-nya sudah dibawa ke paripurna DPR.

Yang jelas, keberadaan kedua perempuan itu di lapisan dalam Presiden, menunjukkan Yudhoyono selalu berusaha kompromis dan akomodatif. Ia tidak semata berpikir tentang profesionalisme orang-orang di sekelilingnya, tapi loyalitas dan konstituen yang mereka punyai untuk penguatan posisi politiknya. ■ RH

Rezim Taliban yang sudah tumbang menyisakan memar aneka trauma di kalbu dan fisik kaum perempuan Afghanistan. Gulsuma yang masih balita, 4 tahun, dipaksa menikah oleh ibunya. Si kecil yang masih main boneka itu tidak tahu mengapa orang-orang desanya berkumpul di rumahnya sambil menyanyi dan makan-makan. Sang ibu telah 'menjual' putrinya dengan cara menikahkan secara paksa. Dengan uang itu, ibu Gulsuma bisa bertahan hidup setelah ditinggal mati suaminya.

Setelah terpisah dari ibundanya, Gulsuma menjadi bagian dari keluarga suaminya. Namun, pengalaman Gulsuma sungguh tragis tak terperikan, setelah ia diberi baju bagus dan *bangles* merah (titik merah di tengah alis pertanda seorang wanita sudah menikah). Penderitaannya selama berada pada keluarga suaminya itu baru bisa diungkapkannya setelah delapan tahun kemudian. Tubuh mungilnya menjadi saksi bisu kekejaman. Punggung, kaki dan tangannya penuh dengan bekas luka. Di balik rambut hitam ikalnya, ada luka botak bekas luka bakar. "Salah satu kakak ipar saya menuangkan teh panas di kepala saya. Sejak itu rambut saya tak pernah tumbuh," katanya.

Menurut Hafifa Marouf, lebih banyak lagi perempuan Afghanistan yang menderita perlakuan serupa Gulsuma. Penyiksaan terhadap wanita dan anak-anak tersebar luas. "Ada jutaan wanita yang menderita seperti Gulsuma," kata Hafifa dari Komisi HAM Independen Afghanistan (AIHRC). "Bedanya kisah Gulsuma terungkap sedangkan mereka tidak," lanjutnya. Gulsuma dijual 30.000 rupee Pakistan (Sekitar Rp. 4,6 juta) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. ■ **AD**



Gulsuma dan lukanya

KAWIN PAKSA PEREMPUAN AFGHAN

PEGGY BAWA MISI PEREMPUAN KE NEW YORK



Peggy dan Meutia Hatta

Peggy Melati Sukma, mendapat tugas Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta sebagai salah satu delegasi dalam Sidang Komisi Kedudukan Wanita (*Commission on the Status of Women atau CSW*) di New York. Bintang sinetron dan presenter cantik ini didaulat sebagai salah satu delegasi Indonesia dari NGO utusan KOWANI. Acara berlangsung mulai 27 Februari hingga 10 Maret.

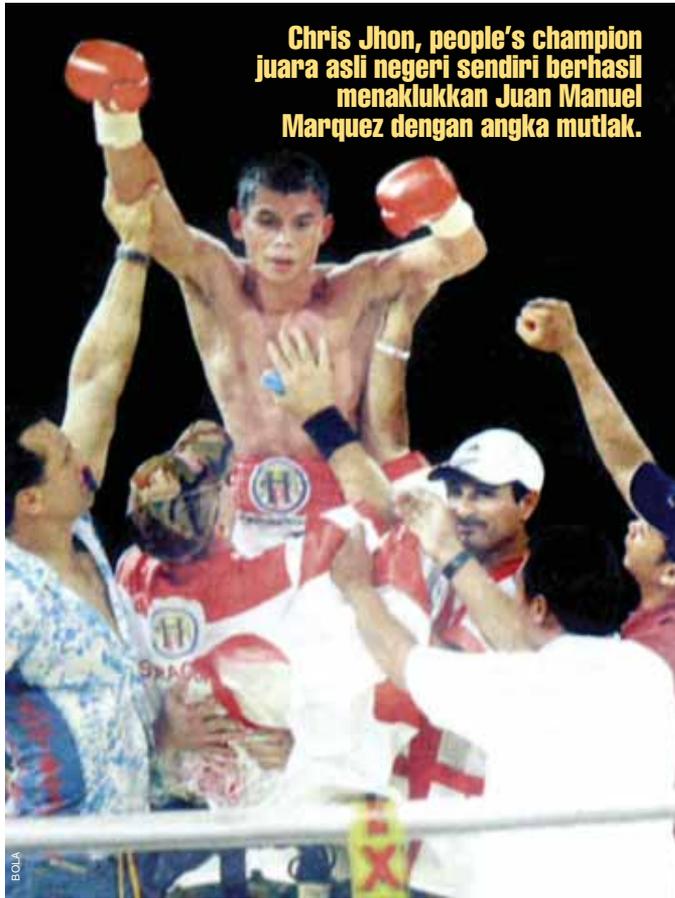
Keberangkatan Peggy itu tidak dengan tangan kosong. Ia membawa bekal makalah

berjudul, *Pengentasan Kemiskinan Perempuan (Miskin Moral, Pendidikan dan Pengetahuan)*. Wanita kelahiran 13 Juni 1976 ini mengaku sangat surprise dengan tugas ini. "Bagi saya ini penghormatan yang sangat besar dari ibu menteri," tuturnya.

Secara umum tugas utama Peggy selama di sana adalah mengadopsi hal-hal penting yang dilakukan negara lain dalam memajukan harkat dan martabat perempuan. "Sebisa mungkin, pemikiran tradisional yang mengatakan bahwa perempuan merupakan *second liners* setelah laki-laki harus ditinggalkan," ujarnya. ■ **AD**

KEMENANGAN PELIPUR LARA

Chris John akhirnya berhasil mempertahankan gelar juara dunia versi WBA kelas bulu. Kemenangannya itu menjadi obat pelipur lara dunia olah raga.



Chris Jhon, people's champion juara asli negeri sendiri berhasil menaklukkan Juan Manuel Marquez dengan angka mutlak.

Suasana gegap gempita menyambut kemenangan Chris John dalam mempertahankan gelar juara kelas bulu (57,1 kilogram) Asosiasi Tinju Dunia (WBA). Kemenangan tersebut diperoleh dalam pertarungan 12 ronde menghadapi petinju Meksiko Juan Manuel Marquez di Golden Gate Arena, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (4/3) lalu. Tentu saja kemenangan ini menjadi obat pelipur lara atas paceklik prestasi di bidang olah raga akhir-akhir ini.

Padahal sebelumnya, lawan mainnya itu diunggulkan banyak orang, apalagi ia penantang nomor satu. Namun, boleh saja Marquez dijagokan, nyatanya Chris John-lah juaranya.

Putra kelahiran Banjarmasin, 14 September 1979 ini telah membuktikan bahwa nama besar lawan bukanlah jaminan. Buktinya, selain Juan Manuel Marquez, sebelumnya Derrick Gainer, mantan juara dunia WBA yang lebih diunggulkan, ia taklukkan juga pada 22 Desember 2004 lalu.

Chris John lalu ditantang Marquez. Lawan asal Meksiko ini

terkenal lebih kuat dan lebih cepat. Namun kecerdikannya kalah dengan Chris John.

Selama ini pemerhati tinju dunia memandang Chris John dengan sebelah mata. Mereka menganggap gelar juara dunia tinju yang disandang Chris John bukan hasil kerja keras. Gelar juara dunia yang diperoleh Chris John hanyalah sebagai kado, titipan dari Marquez (juara dunia IBF). November 2003 lalu Marquez berhasil menundukkan Derrick Gainer (juara dunia WBA) dalam partai unifikasi gelar, namun tidak disetujui WBA.

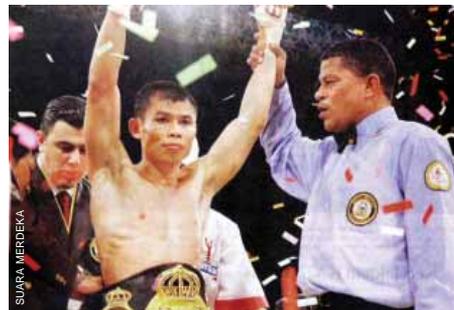
Kekalahan itu membuat Gainer harus merelakan sabuknya diserahkan kepada Chris John, yang menjadi juara *ad interim* setelah mengalahkan Oscar Leon di Bali, September 2003.

Di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Chris John berkibar lagi. Ia berhasil menguburkan impian Marquez untuk menjadi yang terbaik kembali. Perjalanan panjang Marquez melintasi setengah dunia dari Meksiko sia-sia saja. Bisa jadi, dengan kekalahannya ini Marquez akan menggantung sarung tinjunya.

Bukti Chris John

Dilihat dalam laganya, petinju yang sering dijuluki *The Dragon* itu tampil begitu menawan, lincah dan cerdik. Bekas anak asuh Sutan Raming yang kini ditangani pelatih asal Australia, Craig Christian, terlihat lebih garang dan dingin di atas ring. Meski pukulannya tidak terlalu kuat namun akurasinya selalu mengenai sasaran, sehingga banyak mengumpulkan angka dari kepalan tangannya itu.

Dari tiga hakim, semuanya memberikan kemenangan angka bagi Chris John. Hakim Oscar Perez (AS) memberi angka 116-110, Takeshi Shimakawa (Jepang) dengan angka 117-111, Pini Prayadsub (Thailand) menilai 116-112. Kemenangan ini merupakan kesuksesan kelima bagi Chrisjon dalam mempertahankan gelar juara dunianya. Sebelumnya, Chrisjon telah mengalahkan Oscar Leon (Kolombia), Osamu Sato (Jepang), Derrick Gainer (Amerika Serikat), Tommy Browne (Australia), serta satu pertarungan berakhir seri (*draw*) kala menghadapi Jose Rojas (Venezuela).



menangan 33 diantaranya dengan KO dan sekali seri.

Kesuksesan menaklukkan Marquez ini bisa menjadi bukti bahwa sabuk juara dunia yang Chris John dapatkan bukan semata-mata titipan Marquez. Tetapi itu menjadi hak atas kemenangannya secara mutlak.

Scott Mallon, wartawan majalah *Ring Internasional* menilai bahwa pertandingan itu sangat ketat. Di awal ronde, kadang Marquez tampak unggul, namun di akhir ronde Chris John dapat memasukkan beberapa pukulan. "Saya rasa cukup *fair* Chris John menang," kata Scott.

Saat ini di kelas yang sama dengan Chris John, ada tiga juara dunia yakni Takashi Koshimoto dari Jepang (WBC), Valdemir Pereira dari Brasil (IBF) dan Scott Harrison dari Inggris Raya (WBO). ■ SB

Kado Banjir Untuk Rakyat

Dulu, beberapa wilayah 'dikorbankan' dengan genangan air yang tinggi supaya Istana Merdeka tidak banjir. Kini, Gubernur Jakarta berubah pikiran.

Matahari bersinar hangat. Udara cerah. Angin pagi bertiup sepoi-sepoi. Sama sekali tak ada bekas hujan mengguyur Perumahan Cipinang Indah, Jakarta Timur, baik subuh tadi atau malam sebelumnya. Anehnya, sebagian kawasan perumahan itu tergenang banjir luapan Kali Cipinang. Di Cipinang Besar, ketinggian banjir malah satu meter.

Keadaan lebih parah seringkali terjadi di wilayah Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Biasanya, sebagian besar warga yang tinggal berdekatan dengan pinggir sungai mengungsi ke kompleks sekolahan Santa Maria. Mereka menggelar tikar, lembaran kardus, dan koran untuk alas tidur.

Sebagian lagi terpaksa menggelar tikar di sepanjang trotoar Jalan Jatinegara Barat (depan Santa Maria) bersama anak-anaknya yang masih balita. Seperti diberitakan *Suara Pembaruan*, 10 Februari 2006, ketinggian air biasanya mencapai pinggang orang biasa.

Fenomena banjir semacam itu bukan hal baru bagi penduduk Jakarta, terutama di kawasan rawan banjir dan bantaran Kali Ciliwung serta anak sungainya. Meski tak ada hujan lebat, hanya sekedar gerimis atau bahkan tak hujan sama sekali, air kali meluap, mengirim banjir bagi kawasan di sekitarnya. Air berupa genangan, tidak mengalir, biasanya akan lama surut.

Banjir yang datang tiba-tiba meski curah hujan rendah itu seringkali disebut-sebut banjir kiriman. Dan wilayah Bogor seringkali jadi tertuduh. Sebab daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung berhulu di Gunung Gede di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan hilirnya sampai ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sehingga, jika terjadi hujan yang cukup lebat di wilayah hulu, airnya mengalir terus ke wilayah hilir di Jakarta.

Selain Bogor, Istana Negara dan sejumlah kawasan elit seringkali jadi kambing hitam mengapa kawasan yang se-

harusnya tidak kebanjiran, tiba-tiba dapat kiriman banjir. Sebelumnya, ketika banjir bandang di Jakarta, kawasan Istana dan daerah Menteng yang kebanyakan dihuni para pejabat negara dan duta besar asing kering kerontang. Beberapa wilayah 'dikorbankan' dengan genangan air yang tinggi.

Pintu air yang alirannya melewati kawasan Istana ditutup, meski ketinggian air sudah melampaui batas. Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat itu dihujani protes karena kebijakannya itu. Namun kala itu, dia mengelak dengan alasan menjaga simbol kenegaraan.

Banjir Merata

Untuk menghadapi banjir tahun ini, seperti diberitakan *Tempo Interaktif*, 11 Januari 2006, Pemda DKI sudah menyiapkan 40.630 orang personel. Terdiri atas 14.500 orang dari pemerintah daerah, 4.500 anggota TNI, 6.500 aparat kepolisian, 15 ribu dari anggota Palang Merah Indonesia, dan tim SAR sebanyak 130 orang.

Pemerintah Jakarta juga sudah merekrut 40 orang dari daerah yang rawan

banjir. Mereka dilatih cara memberi pertolongan dalam penanggulangan banjir. Peralatan, dapur umum, tenda dan lokasi pengungsian maupun fasilitas kesehatan juga sudah disiapkan.

Pemda DKI juga lebih bijak. Gubernur Sutiyoso memutuskan akan membiarkan air membanjiri Istana dan sekitarnya jika ketinggian air mencapai angka maksimal.

Tahun 2002 lalu, misalnya, luapan air menggenangi ring merah, yakni kawasan yang mendapat penjagaan khusus, akibat limpahan air dari pintu Manggarai yang waktu itu sengaja dibuka oleh Sutiyoso, setelah minta izin Presiden Megawati Soekarnoputri demi menyelamatkan warga yang tinggal di DAS Ciliwung.

Bahkan Agustus 2005, Istana Wakil Presiden di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pun kebanjiran dengan ketinggian sampai sebetis orang dewasa.

Ditegaskan oleh Sutiyoso, tidak mungkin dirinya membiarkan satu tempat tenggelam, sementara tempat lain tidak tergenang sama sekali. Maka andaikata sesuatu yang luar biasa terjadi dan air melebihi ketinggian 950 cm (batas maksimal), maka Pintu Air Ciliwung Kota akan dibuka.

Untuk kedepannya, Pemda DKI Jakarta berencana membebaskan permukiman di sepanjang bantaran Kali Cideng. Rencana itu dilakukan untuk membebaskan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, serta Balaikota DKI Jakarta dari banjir.

Menurut Sutiyoso, penyebab terjadinya banjir yang menggenangi perkantoran yang berada di sekeliling Monumen Nasional hingga Jalan Thamrin disebabkan oleh penyempitan badan Kali Cideng di ruas yang berada di sepanjang Jalan Jati Baru hingga *fly over* Cideng. ■ RH



Banjir kiriman di kawasan Perumahan Cipinang Indah, Jakarta Timur.

PERANG JARAK JAUH

Dari sebuah pangkalan diluar Las Vegas, satu skuadron Angkatan Udara AS melancarkan permainan perang yang sesungguhnya di Irak dan Afganistan. Mereka mengamati jalannya perang dengan *remote control*.

Enam hari dalam seminggu, Shan non Rogers melintasi Interstate 215, menuju tempat kerjanya dekat Las Vegas. Dia menyeterir sendiri selama 30 menit untuk melakukan transisi mental dari seorang kepala rumah tangga menjadi profesional.

Rogers, seorang Mayor AU dan pilot tempur yang berpengalaman, anggota pasukan elite AS yang memainkan peran sangat penting di dalam perang di Irak dan Afganistan. Dari Pangkalan AU Nellis, di luar Las Vegas, Rogers mengendalikan *Predator*, sebuah pesawat mata-mata yang diubah menjadi salah satu senjata pemusnah. *Predator* memainkan peran kunci dalam penangkapan Saddam Hussein, dan telah membunuh para tersangka al-Qaeda di Pakistan dan Yaman.

Apa yang membuat misi *Predator*—dan pekerjaan Rogers—menjadi sangat luar biasa adalah jarak 11.000 kilometer antara pilot dan pesawatnya. Menugaskan para awak bukan di medan tempur, menjauhkan mereka dari keadaan yang berisiko dan menghemat anggaran militer. “Tetapi bagi kami, itu masih tugas tem-

pur,” kata Rogers, 34, yang pernah bertugas di medan tempur dua kali, terakhir di Irak beberapa bulan lalu. “Secara fisik kami memang berada di Nevada, tetapi secara mental kami sedang terbang di atas Irak. Rasanya seperti kenyataan”.

TIME mendapat kesempatan istimewa mengamati langsung operasi Skuadron *Reconnaissance* ke 15-AU yang mengomandoi 25 *Predator* dari Nellis. Saat itu pukul 10:30 pagi di Nevada atau pukul 9:30 malam di Irak. Setelah dua jam menyaksikan para pemberontak menembaki tentara AS, di Irak bagian barat, dari sebuah truk bak terbuka yang mengangkut senjata mesin kaliber-50, Rogers dan operator sensornya, diperintahkan untuk menembak truk tersebut.

Situasi yang berkembang selanjutnya membuat Rogers gemetar—keinginan membunuh musuh tanpa melukai siapapun, bercampur dengan rasa bersalah karena melenyapkan nyawa manusia. Rogers menekan tombol untuk meluncurkan salah satu peluru kendali *Hellfire* dari *Predator* ke arah truk tersebut.

“Apa yang akan kita lakukan, Pak?”

tanya mitranya dengan suara gemetar. “Tetap pada sasaran, berharap dia melaju cepat,” kata Rogers dingin. Truk itu melintas, meledak keras tatkala *Hellfire* menghantamnya. Rogers melebarkan tangannya, melakukan tos dengan mitranya.

Predator adalah sebuah pesawat tempur yang luar biasa. Dalam istilah militer, kendaraan udara tidak berawak atau UAV. Pertama kali diterbangkan satu dekade yang lalu, *Predator* selama bertahun-tahun dipersenjatai hanya dengan sebuah kamera yang tidak canggih untuk mengumpulkan data intelijen.

Tak terkesan berbahaya dengan suara mendengung, *Predator* berukuran panjang 8 meter, dicat abu-abu, tampak dari atas ke bawah seperti sepotong gabus bersayap. Pesawat ini dibuat dari plastik dan logam ringan, memiliki sebuah mesin kecil yang digerakkan oleh baling-baling dengan kecepatan hanya 240 kilometer per jam. Pesawat yang sebelumnya dipiloti Rogers adalah jet tempur supersonik F-15 yang berkecepatan 1.500 km per jam.

Di medan tempur, *Predator* diluncurkan dan didaratkan oleh para tentara, tetapi ketika berada di udara, 24 jam setiap hari, pesawat-pesawat itu dikendalikan oleh para awak AU yang duduk di enam kursi *cockpit* darat di Nellis. Setiap *cockpit* terdiri dari dua set kursi besar yang berhadapan dengan layar komputer yang dilengkapi keyboard untuk mengendalikan “permainan” perang langsung dalam tampilan video. ■ **TIME-SH**

(1) Kapten Matt Buehler mengendalikan penerbangan *Predator* dari jarak 11.000 KM dengan alat pengendali dan keyboard komputer; dia juga menembakkan peluru kendalinya. (2) Letkol Matt Bannon mengawasi semua operasi Skuadron *Reconnaissance* ke 15 *Predator*. (3) Sensor operator Kimberly Mendoza mengoperasikan kamera dan sinar laser, menjaga peluru kendali tetap pada jalurnya setelah ditembakkan.



EMAS IBUNDA DIBOYONG AMERIKA

Judul di atas dipilih oleh Majalah *Gatra* Edisi 11 Maret 2006 sebagai judul laporan utamanya. Majalah itu mengupas masalah kegiatan eksploitasi PT Freeport. Kontrak kerja yang dinilai berat sebelah mestinya dirombak, karena lebih banyak uang yang mengalir ke Amerika meski yang porak poranda dan tercemar adalah tanah Indonesia. Bahkan majalah ini pada sampul depannya menampilkan gambar karikatur lempengan emas yang menjulang keluar dari topi berbendera Amerika, yang diintip oleh seorang bule yang menyerupai Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Boleh dibilang saat ini tiada hari tanpa unjuk rasa atas kasus Freeport, baik itu di lokasi penambangan di Papua maupun di kantor pusat Freeport di Jakarta.

Berita lain yang tak kalah menarik yang dikupas *Gatra* adalah Bisnis Katebelece Setneg. Kasus itu menyangkut surat rekomendasi dari Mensekab Sudi Silalahi kepada Menlu Hasan Wirayudha terkait dengan renovasi Gedung KBRI di Seoul Korea Selatan.

Sementara itu Majalah *Tempo* edisi 6-12 Maret 2006 dalam laporan utamanya menulis upaya penyehatan Pertamina. Widya Purnama akhirnya harus menyerahkan kursinya kepada Ari Soemarno yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan kinerja Pertamina yang menggembarakan. Persoalannya sekarang adalah sejauhmana perhatian itu akan bermuara pada pengambilan keputusan yang tepat dan eksekusi yang prima. Ari Soemarno akhirnya dilantik oleh Meneg BUMN Sugiharto Rabu dua pekan lalu.

Dalam persoalan Pertamina, Widya memang dianggap 'mbalelo' bahkan hingga akhir masa jabatannya dia masih tetap pada keinginannya agar Pertamina bisa menjadi operator ladang emas hitam Blok Cepu, Jawa Tengah.

Investor Indonesia Edisi 7-20 Maret 2006 menulis laporan utamanya : "Bimantara Takkan Dilepas."

Investor mengupas bagaimana sepak terjang perjuangan Hary Tanoesoedibjo yang berhasil menguasai saham PT Bimantara Citra Tbk, yang dibangun oleh Bambang Trihatmodjo tanpa harus merintis dari awal.

Hary secara perlahan dan meyakinkan terus menambah kepemilikan sahamnya di Bimantara hingga kini sudah mencapai 39,62%. Kini saham-saham milik keluarga Cendana sedikit-demi sedikit mulai terlepas dari genggaman. Berebut 'mesin uang'

Cendana, demikian majalah *Investor* menulis judul laporan utamanya.

Majalah *Trust* Edisi 7-12 Maret 2006 mengedepankan fokus utamanya mengenai uang 230 juta dolar AS tanggungan Sukanto Tanoto yang harus dibayarkan kepada BPPN mulai dari masa I Gede Putu Ary Suta hingga Syarifuddin Temenggung.

Kasus tanggungan Sukanto ini sudah mulai muncul ke permukaan. Dalam sebuah rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR RI dengan BI beberapa waktu lalu, terungkap bahwa Sukanto masih memiliki kewajiban berupa wesel ekspor senilai 230 juta dolar AS.

Menurut Deputy Gubernur BI, jika Sukanto membayar kewajibannya, maka seluruh kewajiban Unibank termasuk 28 *negotiable certificate deposit* (NCD) terbitan Unibank senilai 28 juta dolar AS akan bisa dilunasi.

Selain berita di atas, *Trust* juga menyoroti kedudukan Direktur Utama Pertamina Widya Purnama yang akhirnya benar-benar tergeser oleh Ari Soemarno.

Majalah berbahasa Inggris *Newsweek* Edisi 6 Maret menulis Republik Rakyat China sedang membangun kompleks nuklir terbesar di dunia.

Pengusaha Amerika Edwin de-Steiguer Snead berkunjung ke China, mencari masa depan bagi pembangkit tenaga nuklir. Dia sangat yakin akan menemukannya.

"Izinkan saya melihatnya apakah saya bisa menggambarkan-nya di dalam bahasa Inggris aksen Texas," kata Snead, 76, seorang pengusaha yang berencana membangun sebuah pusat pembangkit tenaga nuklir di kawasan seluas 25 hektar di Texas. "Saya pikir Amerika akan membeli pusat pembangkit tenaga nuklir dari China dalam lima tahun mendatang," ujarnya menambahkan.

Majalah *TIME*, Edisi 6 Maret 2006 menulis, Presiden George W. Bush mendarat di New Delhi pekan ini. India dan AS berharap membuka segel peralihan perang dingin dari mitra antagonis menjadi mitra strategis.

Jika Anda menginginkan cuplikan dunia yang berubah, lihatlah foto-foto upacara Mei lalu di Moskow untuk menandai peringatan ke 60 berakhirnya Perang Dunia II.

Pada pertemuan para pemimpin dunia tersebut, Jerman berjabat tangan dengan Prancis, Jepang dengan Inggris, dan Presiden Amerika mengajak mitra Rusianya berdiri di bawah bendera berlambang palu dan arit, di depan patung Lenin. ■ SB, SH



SEKOLAH GRATIS SETENGAH HATI

Dengan alasan keterbatasan dana, orangtua murid masih harus mengeluarkan dana ratusan ribu rupiah untuk membeli buku wajib.

Seorang ibu yang anak pertamanya duduk di kelas empat SD mengeluh, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli buku wajib di sekolah sang anak. Tak tanggung-tanggung, uang yang harus dikeluarkannya itu sampai ratusan ribu.

Banyak orangtua murid di Jakarta memiliki keluhan yang sama. Rata-rata mereka mengeluarkan uang untuk membeli buku antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu rupiah. Seperti dilaporkan harian *Pelita*, 15 Februari 2005, SMP 33 Manggarai, Jakarta Selatan memungut uang buku Rp 500 ribu untuk satu tahun. Alasan yang sama juga dipakai SD 07 Bukit Duri, Jakarta Selatan yang memungut uang buku Rp 400 ribu.

Meski pungutan uang buku itu sudah menjadi hal yang seringkali terjadi, mestinya tahun ini hal itu sudah tidak terjadi lagi di setiap SD dan SMP negeri di DKI Jakarta. Pemrov DKI sudah menyiapkan Rp 500 miliar untuk menyuksidi biaya operasional SD dan SMP negeri sehingga seluruh siswa dibebaskan dari biaya maupun iuran dalam bentuk apapun.

Tak heran, dengan adanya kasus-kasus pungutan untuk buku di beberapa sekolah, sekolah gratis yang dijanjikan Pemrov dianggap masih setengah hati dan terancam gagal.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Sylvia Murni menyatakan, kasus-kasus seperti yang terjadi pada SD 07 Bukit Duri dan SMP 33 Manggarai itu merupakan pelanggaran. Sebab, kedua sekolah itu tidak termasuk kategori sekolah percontohan koalisi atau sekolah standar nasional yang mendapat dispensasi untuk menerima sumbangan dari orangtua murid, karena biaya operasionalnya lebih besar.

Anehnya, alokasi dana pengadaan buku per tahun untuk siswa tidak merata. Dengan alasan dana masih terbatas, dana pengadaan buku terpaksa bergiliran beberapa kelas. Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2005, dana pengadaan buku untuk siswa kelas 1, 4 dan 7 (1 SMP). APBD 2006, dilanjutkan untuk siswa kelas 2, 5 dan 8 (2 SMP). Tahun 2007, baru untuk 3, 6

dan 9 (3 SMP).

Untuk kelas-kelas yang belum mendapat dana, sekolah dilarang mengoordinir pembelian buku secara langsung maupun lewat koperasi sekolah. Sementara untuk sekolah yang sudah mendapatkan dana pengadaan buku, buku tersebut menjadi milik sekolah. Siswa hanya meminjam.

Harian *Pelita* tampaknya cukup *concern* terhadap masalah ini. Di edisi 17 Februari 2006, harian ini menurunkan berita bahwa Pemrov DKI tetap akan menjalankan program sekolah gratis, meski APBD DKI Jakarta 2006 ditolak Menteri Dalam Negeri. APBD sebesar Rp 17, 9 triliun itu mencakup program sekolah gratis dan tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp 2 juta per bulan.

Sudah Waktunya

Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendukung kampanye wajib belajar. Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.

Kebijakan pemerintah mengalokasikan

dana kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk bantuan operasional sekolah lebih maju dari kebijakan pemberian beasiswa untuk siswa miskin pada masa-masa sebelumnya. Akan tetapi, kebijakan yang ditempuh pemerintah dinilai masih belum serius dan setengah-setengah sehingga tidak bisa menjamin siswa dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan dasar secara gratis.

Menurut Sekretaris Koalisi Pendidikan Ade Irawan, seperti ditulis harian *Kompas*, sebenarnya DKI Jakarta merupakan contoh yang baik sebagai acuan pelaksanaan sekolah gratis. Selama tiga tahun terakhir, Pemrov DKI Jakarta menyalurkan *block grant* untuk biaya operasional, buku perpustakaan, tambahan kesejahteraan guru, dan lain-lainnya yang diserahkan langsung kepada sekolah. Akan tetapi, kenyataannya pungutan-pungutan kepada siswa terus saja berlangsung.

Kebijakan pendidikan gratis yang setengah-setengah ini, menurut Ade, akan mengakibatkan tidak ada jaminan bagi semua anak pada usia wajib belajar dapat bersekolah tanpa ada kesulitan pembiayaan. Akibatnya, target penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada 2008 yang beberapa kali ditunda kemungkinan besar akan gagal kembali. ■ RH



Gratis, tapi buku harus beli

RAJU-EMAN PUN AKHIRNYA BERPELUKAN

Kalau saja sejak awal kedua orangtua Raju dan Eman mau berdamai, pengadilan terhadap Raju tak akan terjadi. Setelah sempat 'mengundang reaksi' banyak pihak, mereka pun akhirnya berdamai.



Raju berpelukan dengan Eman

Berkelahi hingga menangis, kemudian baikan dan main bersama lagi, memang ciri khas anak-anak. Terkadang kejengkelan orangtua belum reda, mereka sudah kembali bermain bersama. Tapi, tidak dengan kasus Raju. Anak bernama lengkap Muhammad Azwar (8 th) ini harus terseret-seret sampai ke pengadilan dan sempat ditahan beberapa waktu karena berkelahi dengan Arman-syah (14 th) alias Eman.

Kedua bocah Sekolah Dasar Negeri 056633 Desa Paluh Manis, Gebang, Langkat ini sama-sama terluka akibat perkelahian itu. Namun, luka Eman lebih parah, sehingga kedua orangtuanya tidak terima. Dengan membawa catatan hasil visum dokter, mereka lalu melaporkan Raju ke kantor polisi. Raju pun diproses hukum hingga pengadilan.

Dari proses interogasi hingga sidang di Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pang-

kalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dijalani Raju sebagai hukuman panjang dalam hidupnya. Dalam imajinasinya, polisi, hakim, ruang tahanan menjadi sosok traumatis bagi dirinya. Wajah ketakutannya terlihat jelas di setiap jepretan kamera wartawan.

Kasus ini kemudian mengundang reaksi banyak kalangan. Bukan saja dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang kemudian bersedia menjadi kuasa hukum Raju, tapi juga dari kalangan akademisi dan anggota DPRD Medan, Psikolog Seto Mulyadi dan lain-lain. Rata-rata menghimbau persidangan segera dihentikan. Bahkan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas memanggil hakim Tiurmaida H Pardede, hakim tunggal dalam kasus ini.

Busyro menyayangkan tindakan hakim yang memerintahkan penahanan Raju, apalagi ia diinapkan di tempat penahanan orang dewasa. Menurutnya, hakim seharusnya tak perlu kaku dalam menangani

kasus anak-anak. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut dibantah pihak Pengadilan Negeri Langkat di Stabat. Pihak pengadilan, bahkan hakimnya sendiri menyatakan bahwa mereka telah bertindak sesuai prosedur.

"Kenakalan Raju, bukan kenakalan anak-anak biasa," kata Hakim Tiurmaida suatu ketika. Alasan itulah yang kemudian dipakainya untuk terus melanjutkan persidangan, kendati banyak pihak menghimbau untuk segera menghentikannya. Padahal hakimnya adalah juga seorang ibu, yang mestinya tahu betul bagaimana menghadapi kenakalan anak-anak.

Raju benar-benar menjadi pesakitan. Menurut Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang, kejadian tersebut sebenarnya bisa dihindari andaikata polisi, jaksa dan hakim mengetahui *the state of the arts* dari penanganan terhadap delinkuensi anak di dunia.

Sementara itu, apakah keluarga Arman-syah menginginkan hukuman berat bagi Raju? Ani br Sembiring, orangtua Arman-syah menyatakan, keluarga mereka sebenarnya sudah tidak permasalahan lagi kasus perkelahian itu. "Kami sudah mengadakan perjanjian damai. Saya telah menerima uang 1 juta untuk biaya ganti pengobatan," ujar Ani seperti dikutip *Kompas*, 24/2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Medan kemudian memprakarsai perdamaian itu. Sehingga Raju dan Eman pun bisa kembali berpelukan.

Namun, hukum tetaplah hukum. Kendati kesepakatan damai telah terlaksana, persidangan terhadap Raju tetap dilanjutkan. Pada akhirnya, Rabu (8/3) hakim tunggal Pengadilan Negeri Stabat Tiurmaida Pardede memutuskan Raju terbukti bersalah melakukan penganiayaan. Putusan tersebut kemudian diikuti dengan ketetapan hakim yang menyerahkan Raju dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina.

Sebelumnya Jaksa Aprianto Naibaho menuntut terdakwa telah melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana Junto UU Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak. ■ #D



www.indonesiabourse.com.go.id

KARUHUN DI KAMPUNG NAGA

Menjadi obyek riset, penelitian dan wisata karena kekhasan budayanya. Sayangnya, sementara ditutup untuk umum karena konflik antara tetua adat dengan pemerintah.

Kampung di pinggir Sungai Ciwulan itu memang unik. Jajaran rumah panggung dari bambu dan kayu serta beratap ijuk, daun nipah atau alang-alang, menambal kental atmosfer tradisional di desa itu. Kampung Naga, namanya.

Tak ada naga di desa itu. Nama itu diambil dari kata 'nagawir' dalam bahasa Sunda, yang artinya lereng bukit. Menuju kampung itu memang harus menuruni anak tangga di lereng yang kemiringannya hampir 45 derajat.

Dengan luas areal kurang lebih empat hektar, lokasinya terletak pada ruas jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya - Bandung melalui Garut, yaitu kurang lebih pada kilometer ke-30, ke arah Barat kota Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Rumah-rumah yang berjajar itu berjumlah sekitar 108, ditambah sebuah mesjid, sebuah balai pertemuan, dan sebuah lumbung padi. Rumah tinggal harus menghadap selatan atau utara. Bahan bangunan tidak boleh tembok, melainkan kayu atau bambu. Cat tembok juga dilarang, kecuali kapur atau cat meni.

Penduduk tidak punya perabot seperti kursi, meja dan tempat tidur. Selain itu, tidak boleh ada pintu yang berlawanan arah, karena dipercaya akan menyebabkan rezeki yang masuk ke pintu depan

akan keluar lewat pintu belakang.

Islam merupakan agama yang dianut penduduk Kampung Naga. Namun, pelaksanaan ibadahnya agak berbeda dengan pemeluk Islam lainnya. Seperti ditulis harian *Indo Pos*, 15 Februari 2006, penduduk Kampung Naga hanya sholat lima waktu di hari Jumat saja. Kegiatan mengaji anak-anak dilakukan Minggu dan Rabu malam. Untuk orang dewasa pada Kamis malam.

Kepatuhan pada adat leluhur menjadi daya tarik wisatawan. Mereka melakukan berbagai upacara adat dan upacara hari-hari besar Islam, misalnya Upacara Bulan Mulud atau Alif dengan melaksanakan 'Pedaran' (pembacaan sejarah leluhur). Proses ini dimulai dengan mandi di Sungai Ciwulan dan wisatawan boleh mengikuti acara tersebut dengan syarat harus patuh pada aturan yang ada.

Upacara menyepi dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga pada hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Upacara ini dianggap sangat penting dan wajib dilaksanakan, tanpa kecuali baik laki-laki maupun perempuan.

Upacara yang paling menarik perhatian wisatawan adalah Hajat Sasih yang diselenggarakan bertepatan dengan hari-hari besar Islam. Upacara ini merupakan upacara ziarah dan membersihkan makam. Sebelumnya, para peserta upacara harus melaksanakan beberapa tahap upacara. Mereka harus mandi dan membersihkan diri dari segala kotoran di sungai Ciwulan.

Pendapatan Tambahan

Wisatawan lokal maupun asing yang datang, biasanya akan disambut dengan ramah. Kampung ini memang menjadi salah satu obyek wisata andalan Pemda Tasikmalaya. Ada penduduk setempat yang akan mengantar berkeliling kampung dan menjelaskan adat istiadat mereka.

Ketika berkeliling kampung, akan terlihat kehidupan khas pedesaan berjalan seperti di tempat-tempat lain. Petani bekerja di sawah, para pengrajin sibuk menenun dan menganyam, sama sekali tak terusik dengan kedatangan wisatawan.

Penduduk mendapatkan tambahan penghasilan dari menjual kerajinan tangan kepada wisatawan. Mereka biasanya membuat tas, sandal maupun tempat makanan kecil dari anyaman.

Sayang sekali, saat ini para tetua adat di kampung itu sepakat untuk sementara menutup kampungnya sejak 6 Februari lalu. Konflik itu, seperti dilaporkan, dipicu oleh kebijakan Pemda Tasikmalaya yang dengan sepihak menaikkan tarif retribusi parkir hingga 100 persen sejak November 2005. Pasalnya, tidak sesen pun uang retribusi itu masuk ke kas kampung Naga maupun warga. Padahal, wargalah yang membersihkan areal parkir.

Akibat penutupan itu, selain turis, sejumlah lembaga penelitian, sekolah dan universitas tidak dapat melakukan penelitian di kampung tersebut. Saat ini, DPRD Tasikmalaya tengah membentuk Pansus untuk mencari jalan keluar yang terbaik. ■ RH

BACAAN PARA EKSEKUTIF



BERITAINDONESIA
MAJALAH BERITA PILIHAN

*All in One
One for All*

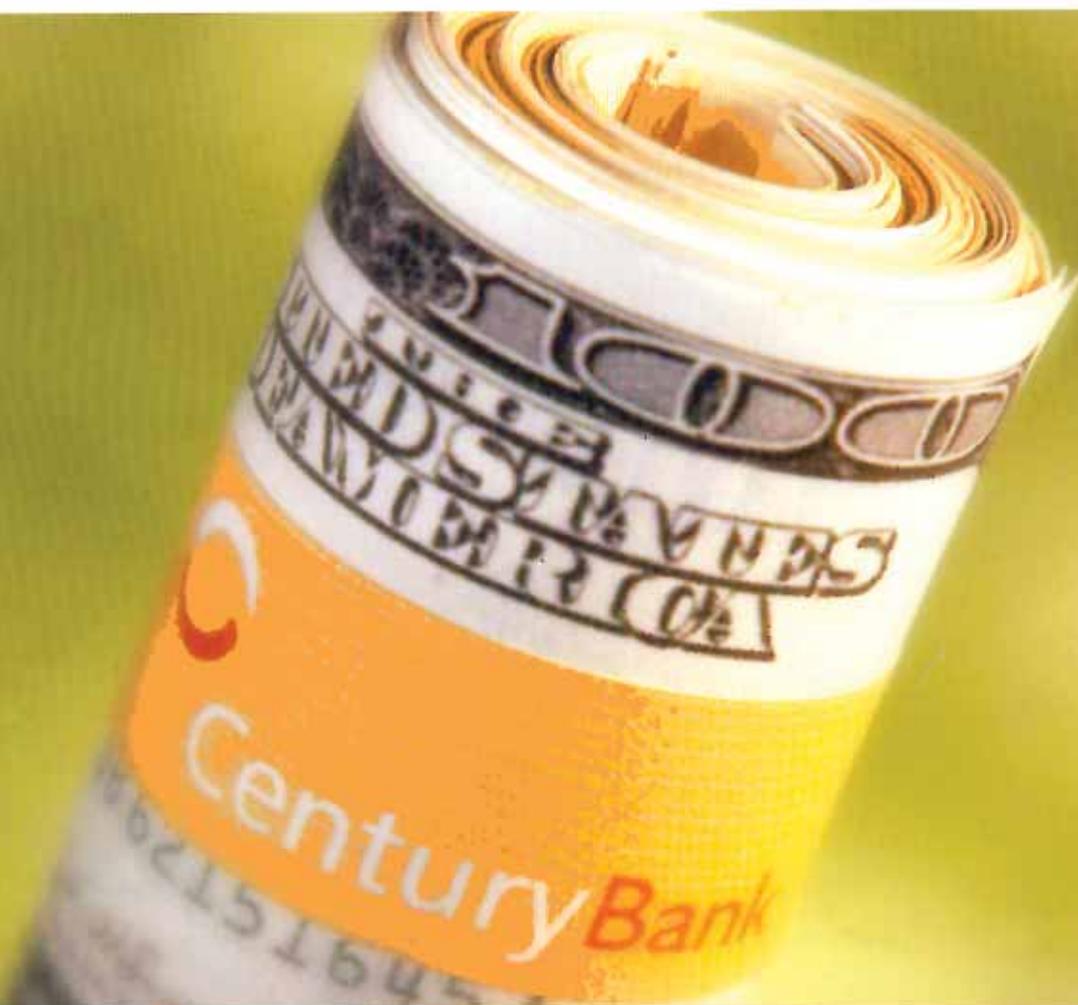


CenturyBank

Century *d* Valas Khusus

Deposito Dollar "Masuk Dollar Keluar Dollar"

Century Bank dengan bangga menghadirkan Deposito Dollar dengan keunggulan khusus. Melalui "Century *d* Valas Khusus", Anda kini bisa menikmati keuntungan deposito dalam mata uang US Dollar yang hanya bisa Anda dapatkan di sini. Tidak seperti deposito dollar yang selama ini Anda temui, melalui "Century *d* Valas Khusus", Anda bisa menikmati kembali jumlah investasi Anda saat jatuh tempo tanpa melalui proses konversi ataupun dikenakan biaya-biaya lainnya.



PT Bank Century Tbk.

Kantor Pusat: Sentral Senayan I Building, 1st, 2nd, 16th floor Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, Indonesia Telp. (021) 572 4180 Fax. (021) 572 443/46